



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA

LAPORAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Capaian Pembangunan Daerah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Capaian Pembangunan Daerah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah/LKjIP Kabupaten Bangka tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Melalui laporan ini kami menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka selama Tahun 2022 atau merupakan laporan tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020, sebagai bentuk konsistensi kami terhadap komitmen menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan ini disusun melalui pendekatan sistem perencanaan strategis yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama.



Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, perguruan tinggi, swasta, media massa serta seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi motivasi untuk berbuat lebih inovatif dan kreatif demi perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula dengan kekurangan yang masih ada menjadi bahan introspeksi konstruktif sehingga dapat menjadi sumber input yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka di masa mendatang.

Harapan kami semoga Laporan Capaian Pembangunan Daerah/LKjIP Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan:

- Bahan informasi bagi *stakeholder* terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022;
- Bahan evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memberikan umpan balik (*feed back*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan efektif.

Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Ridho, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.



Sungailiat, Maret 2023

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-2
1.2. Kondisi Umum Wilayah	I-2
1.2.1. Kondisi Geografis.....	I-2
1.2.2. Kondisi Demografis.....	I-3
1.3. Administrasi Pemerintahan	I-6
1.3.1. Struktur Kewilayahan	I-6
1.3.2. Kelembagaan Perangkat Daerah.....	I-7
1.3.3. Aparatur Pemerintahan.....	I-9
1.3.4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.....	I-10
1.4. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan	I-12
1.4.1. Permasalahan Pembangunan Tahun 2022	I-12
1.4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2022.....	I-25
II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Visi	II-3
2.2. Misi.....	II-4
2.3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran	II-8
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-10
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	II-11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.1.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	III-4
3.1.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	III-17



3.1.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.....	III-22
3.1.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.....	III-28
3.1.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	III-35
3.1.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.....	III-49
3.1.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.....	III-54
3.1.8. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat.....	III-72
3.1.9. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur.....	III-77
3.1.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan.....	III-86
3.1.11. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa.....	III-105
3.1.12. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan.....	III-111
3.1.13. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-117
3.2. Realisasi Anggaran.....	III-125
3.3. Efisiensi Anggaran.....	III-128
IV. PENUTUP.....	IV-1

Lampiran

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Tahun 2022;
2. Matrik Formula Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022;
3. Matrik Pengukuran Kinerja Anggaran Program Tahun 2022;
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (*unaudited*);
5. Pernyataan Telah Direviu oleh APIP atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022;
6. Pohon Kinerja (*Cascading*) RPJMD Pemkab Bangka Tahun 2019-2023;
7. Prestasi/Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jarak Ke Sungailiat	I-2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km ²) Kepadatan per Km ² di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	I-3
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	I-4
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022.....	I-5
Tabel 1.5	Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	I-6
Tabel 1.6	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	I-7
Tabel 1.7	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Menurut Golongan Tahun 2022	I-9
Tabel 1.8	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	I-10
Tabel 1.9	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bangka Tahun 2022	I-10
Tabel 1.10	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	I-14
Tabel 1.11	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perpustakaan	I-15
Tabel 1.12	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	I-15
Tabel 1.13	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan	I-15
Tabel 1.14	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan.....	I-16
Tabel 1.15	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	I-16
Tabel 1.16	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I-17
Tabel 1.17	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial	I-18
Tabel 1.18	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	I-18
Tabel 1.19	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	I-19



Tabel 1.20	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan.....	I-19
Tabel 1.21	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perhubungan.....	I-19
Tabel 1.22	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Komunikasi dan Informatika	I-20
Tabel 1.23	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pariwisata.....	I-20
Tabel 1.24	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian.....	I-21
Tabel 1.25	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kelautan dan Perikanan	I-22
Tabel 1.26	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Koperasi dan UMKM	I-22
Tabel 1.27	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan.....	I-23
Tabel 1.28	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perindustrian	I-23
Tabel 1.29	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanaman Modal	I-23
Tabel 1.30	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Ketenagakerjaan	I-24
Tabel 1.31	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Lingkungan Hidup	I-24
Tabel 1.32	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Sub Urusan Bencana	I-25
Tabel 1.33	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-26
Tabel 1.34	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-27
Tabel 1.35	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-32
Tabel 1.36	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-34
Tabel 1.37	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-34
Tabel 1.38	Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020	I-36
Tabel 1.39	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020	I-38



Tabel 2.1	Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 ...	II-9
Tabel 2.2	Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022	II-10
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	II-12
Tabel 3.1	Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran	III-1
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2022	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi).....	III-4
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	III-5
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-6
Tabel 3.6	Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-8
Tabel 3.7	Perkembangan Indeks SPBE Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022	III-8
Tabel 3.8	Indeks SPBE Kabupaten Bangka Berdasarkan Rataan Indeks SPBE Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022	III-9
Tabel 3.9	Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2021-2022.....	III-10
Tabel 3.10	Perkembangan Komposit Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022	III-12
Tabel 3.11	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	III-13
Tabel 3.12	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	III-15
Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	III-16
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel)	III-18
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap RPJMD (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel).....	III-19



Tabel 3.16	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.....	III-21
Tabel 3.17	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel).....	III-22
Tabel 3.18	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	III-22
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat)	III-23
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD.....	III-24
Tabel 3.21	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.....	III-26
Tabel 3.22	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat).....	III-27
Tabel 3.23	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat).....	III-27
Tabel 3.24	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat).....	III-29
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)	III-31
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Standar Nasional	III-31
Tabel 3.27	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.....	III-33
Tabel 3.28	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat).....	III-34
Tabel 3.29	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat).....	III-34
Tabel 3.30	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-36



Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-39
Tabel 3.32	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	III-45
Tabel 3.33	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-48
Tabel 3.34	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-48
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk).....	III-50
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk).....	III-51
Tabel 3.37	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	III-52
Tabel 3.38	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)	III-53
Tabel 3.39	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk).....	III-53
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)	III-55
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)	III-57
Tabel 3.42	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.....	III-67
Tabel 3.43	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda).....	III-71
Tabel 3.44	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda).....	III-71
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)	III-72
Tabel 3.46	Pengeluaran Perkapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022	III-73
Tabel 3.47	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD.....	III-74



Tabel 3.48	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	III-74
Tabel 3.49	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat).....	III-76
Tabel 3.50	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)	III-76
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur).....	III-80
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur).....	III-81
Tabel 3.53	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur.....	III-83
Tabel 3.54	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	III-84
Tabel 3.55	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur) ...	III-85
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan).....	III-87
Tabel 3.57	Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kategori Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022	III-89
Tabel 3.58	Objek Wisata di Kabupaten Bangka.....	III-91
Tabel 3.59	Event-Event Wisata di Kabupaten Bangka Tahun 2022	III-94
Tabel 3.60	Daftar Hotel/Penginapan/Homestay dan Jumlah Tamu di Kabupaten Bangka Tahun 2022	III-96
Tabel 3.61	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata Di Kabupaten Bangka Tahun 2022.....	III-98
Tabel 3.62	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD.....	III-100
Tabel 3.63	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan.....	III-101
Tabel 3.64	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)...	III-104



Tabel 3.65	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)	III-104
Tabel 3.66	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	III-106
Tabel 3.67	Permasalahan PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-106
Tabel 3.68	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022	III-107
Tabel 3.69	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	III-108
Tabel 3.70	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa.....	III-109
Tabel 3.71	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	III-110
Tabel 3.72	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa).....	III-111
Tabel 3.73	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	III-112
Tabel 3.74	Perkembangan Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022.....	III-113
Tabel 3.75	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD.....	III-113
Tabel 3.76	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan.....	III-114
Tabel 3.77	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan).....	III-115
Tabel 3.78	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan).....	III-116
Tabel 3.79	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	III-117
Tabel 3.80	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup).....	III-121
Tabel 3.81	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III-122
Tabel 3.82	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	III-124



Tabel 3.83	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	III-124
Tabel 3.84	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.....	III-124
Tabel 3.85	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka	III-127
Tabel 3.86	Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2022	III-129



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”	III-16
Grafik 3.2	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-25
Grafik 3.3	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat).....	III-28
Grafik 3.4	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022	III-29
Grafik 3.5	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)	III-35
Grafik 3.6	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-36
Grafik 3.7	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019-2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-38
Grafik 3.8	Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022	III-40
Grafik 3.9	Rekap Faktor Determinana Balita Stunting di Kabupaten Bangka Menurut Aplikasi e-PPGBM (Agustus 2022)	III-41
Grafik 3.10	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)	III-49
Grafik 3.11	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)	III-51
Grafik 3.12	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk).....	III-54
Grafik 3.13	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-58
Grafik 3.14	Perkembangan Usia Harapan Lama Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-58
Grafik 3.15	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022.....	III-59
Grafik 3.16	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022	III-60



Grafik 3.17	Perkembangan pengeluaran Per Kapita Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022	III-60
Grafik 3.18	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda) ...	III-71
Grafik 3.19	Pengeluaran Perkapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022.....	III-73
Grafik 3.20	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat).....	III-77
Grafik 3.21	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	III-80
Grafik 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2022 Terhadap Ralisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD.....	III-81
Grafik 3.23	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	III-85
Grafik 3.24	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 ..	III-88
Grafik 3.25	Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Bulan Tahun 2020-2022	III-90
Grafik 3.26	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan).....	III-105
Grafik 3.27	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2021 – 2022 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	III-116
Grafik 3.28	Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022	III-118
Grafik 3.29	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran 2022 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup).....	III-125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Tahun 2018-2020.....	I-31
Gambar 2.1	Visi Misi Bangka Bermartabat RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023.....	II-4
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 1 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023.....	II-5
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023.....	II-6
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 3 RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023	II-7
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 4 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023.....	II-7
Gambar 2.6	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 5 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023.....	II-8
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Pemerataan Infrastruktur	III-78
Gambar 3.2	<i>Logical Framework</i> Kualitas Infrastruktur	III-79
Gambar 3.3	Event Jelajah Alam Sepintu Sedulang (JELASS) Adventure Trail Tahun 2022.....	III-94
Gambar 3.4	Desa Wisata Sungai Upang Desa Tanah bawah Kecamatan Puding Besar	III-95
Gambar 3.5	Promosi Pariwisata Melalui Instagram <i>tic_bangka</i> dan Website <i>exotic.bangka.go.id</i>	III-99
Gambar 3.6	Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka.....	III-103



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Capaian Pembangunan Daerah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 ini disusun tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bahan evaluasi untuk melihat tingkat capaian kinerja dengan baik maka pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah/LkjIP ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022, membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah RPJMD, serta membandingkan dengan standar nasional. Metode komparasi pengukuran ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Kabupaten Bangka.



Laporan Capaian Pembangunan Daerah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun, disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kabupaten Bangka yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke empat RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sesuai dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2022, yang ditujukan untuk “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Teknologi Infomasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 telah ditetapkan 13 sasaran strategis dengan 21 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran seluruhnya adalah sebagai berikut:

- 13 Indikator Kinerja Sasaran atau 61,90 % Melebihi Target (MT)
- 5 Indikator Kinerja Sasaran atau 23,81 % Sesuai Target /Tercapai (T)
- 3 Indikator Kinerja Sasaran atau 14,29 % Belum Mencapai Target/Tidak Tercapai (TT)

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 masih mencapai rata-rata **102,02% dengan kategori kinerja Melebihi Target (MT)**. Dari sisi pemanfaatan anggaran dalam pencapaian target indikator, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 mencapai **91,22 % dengan efisiensi anggaran sebesar 12,57% atau setara 128.245.574.021,73 dengan efektivitas anggaran mencapai 114,11%**. Pencapaian Kinerja ini didorong oleh komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kerja sama yang terpadu dari seluruh *stakeholder* pembangunan baik swasta, masyarakat, perguruan tinggi serta media massa yang fokus dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Selain itu, berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2022 diketahui bahwa indikator kinerja utama dengan realisasi tertinggi yang termasuk dalam kategori melebihi target (MT) yang ditetapkan yakni indikator ***Spending of Money*** dengan realisasi sebesar 122,23 persen, sedangkan indikator kinerja utama



dengan realisasi kinerja terendah yang termasuk dalam kategori tidak tercapai (TT) yakni **Indeks SPBE** dengan tingkat realisasi hanya sebesar 67,03 persen. Namun, di luar itu terdapat 2 indikator lain yang tidak mencapai target adalah Indeks Pembangunan Gender (99,94 persen) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (99,75 persen).

Untuk pencapaian indikator kinerja utama yang tidak mencapai target (TT) Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil langkah-langkah strategis sebagai bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Indeks SPBE, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Bangka akan menetapkan *Master Plan* TIK Kabupaten Bangka, menerapkan manajemen SPBE sesuai rencana yang telah ditetapkan, penambahan layanan untuk pengelolaan barang milik negara/daerah, layanan data terbuka berbasis elektronik, layanan kepegawaian, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan publik, serta perlu dilakukan reviu dan perbaikan untuk semua layanan SPBE agar saling terintegrasi.
2. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, Pemerintah Kabupaten Bangka akan meningkatkan kolaborasi *pentahelix* antar pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga ke tingkat desa, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, agar pembangunan berbasis gender berhasil dengan baik dan tepat sasaran, pendekatan pembangunan yang mengakomodir pengarusutamaan gender terutama kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses pembangunan serta mengaktifkan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani dan melakukan pendampingan baik secara fisik, psikologi dan hukum yang dilakukan secara profesional dan terpadu.



3. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengupayakan penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan melakukan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam konsep *good government*. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 5 menjelaskan bahwa “penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja”.

Selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan bahwa “Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan”. Adapun laporan kinerja dijelaskan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban dan bukti pelaksanaan kinerja kepada publik.



1.2. Kondisi Umum Wilayah

1.2.1. Kondisi Geografis

Secara formal-legal, pembentukan Kabupaten Bangka ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka menjadi salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah 2.950,68 Km², terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten, serta dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Selengkapnya nama-nama kecamatan, luas wilayah dan jaraknya dari ibu kota kabupaten tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jarak Ke Sungailiat

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jarak ke Sungailiat (Km)
		(Km ²)	%	
1	Sungailiat	146,38	4,96	0
2	Belinyu	546,50	18,52	54
3	Merawang	164,40	5,57	21
4	Mendo Barat	570,46	19,33	33
5	Pemali	127,87	4,33	15
6	Bakam	488,10	16,54	38
7	Riau Silip	523,68	17,75	42
8	Puding Besar	383,29	12,99	32

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Bangka



1.2.2. Kondisi Demografis

Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi suatu wilayah karena menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang lebih besar, maka suatu wilayah memiliki pasar yang lebih besar pula, apalagi jika ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai. Dengan kemampuan dan sumber daya penduduk dan tenaga kerja yang baik, maka kemungkinan suatu wilayah berkembang akan lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang berpenduduk lebih sedikit dan sumber daya manusia yang lebih rendah. Dari aspek lain, semakin besar jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu wilayah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang semakin besar.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebanyak 327.395 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut kecamatan, luas daerah (Km²) dan kepadatan per Km² di Kabupaten Bangka tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km²),
dan Kepadatan Penduduk per Km² di Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa per km ²)
1	Sungailiat	147,05	94.190	147,05
2	Belinyu	515,48	50.225	515,48
3	Merawang	215,89	30.713	215,89
4	Mendo Barat	685,64	50.378	685,64
5	Pemali	140,46	34.950	140,46
6	Bakam	426,26	18.828	426,26
7	Riau Silip	625,91	28.297	625,91
8	Puding Besar	272,10	19.813	272,1
	Total	3.028,79	327.394	108,09

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023 (data diolah)



b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari data penduduk Kabupaten Bangka tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yakni penduduk laki-laki sebanyak 167.890 jiwa atau 51,28% dan penduduk perempuan sebanyak 159.504 jiwa atau 48,71% dari seluruh penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungailiat	47.746	46.444	94.190	102,80
2	Belinyu	25.626	24.599	50.225	104,17
3	Merawang	15.731	14.982	30.713	105,00
4	Mendo Barat	26.212	24.166	50.378	108,47
5	Pemali	17.837	17.113	34.950	104,23
6	Bakam	9.784	9.044	18.828	108,18
7	Riau Silip	14.598	13.699	28.297	106,56
8	Puding Besar	10.356	9.457	19.813	109,51
	Total	167.890	159.504	327.394	105,26

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023 (data diolah)

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bangka beberapa tahun terakhir cenderung didominasi kelompok umur usia muda 10-14 tahun dengan proporsi pada tahun 2022 sebesar 9,97 persen, serta kelompok umur 5-9 tahun dengan proporsi sebesar 8,99 persen. Sementara kelompok umur usia tua \geq 75 tahun merupakan penduduk terkecil dari seluruh penduduk Kabupaten Bangka dengan proporsi hanya sebesar 1,70 persen saja. Selengkapnya struktur penduduk di Kabupaten Bangka menurut kelompok umur tahun 2022 tertera pada tabel 1.4.



Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022

Kelompok Umur	2020	2021	2022
0 – 4	7,52	7,56	5,84
5 – 9	9,82	9,62	8,99
10 – 14	9,53	9,72	9,97
15 – 19	8,67	7,9	8,11
20 – 24	8,00	8,1	8,20
25 – 29	7,17	7,11	7,25
30 – 34	8,58	8,29	7,51
35 – 39	8,52	8,62	8,41
40 – 44	7,85	8,06	8,70
45 – 49	6,22	6,57	6,87
50 – 54	5,07	5,19	5,71
55 – 59	4,10	4,14	4,35
60 – 64	3,61	3,54	3,59
65 – 69	2,53	2,67	2,93
70 – 74	1,44	1,52	1,87
≥ 75	1,39	1,39	1,70
Jumlah	100	100	100

Sumber : Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2023

d. Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Tenaga kerja merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial. Ditinjau dari sisi ekonomi kebutuhan manusia akan pekerjaan adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian pula sebaliknya sektor-sektor usaha membutuhkan tenaga kerja (sumber daya manusia) untuk menggerakkan roda perekonomian. Sementara dari sisi sosial kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan erat dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan ekonomi.



Tabel 1.5
Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	Persentase			Rataan
	2020	2021	2022	
Primer	32,88	44,54	28,67	35,36
Sekunder	24,06	11,38	29,96	21,80
Tersier	43,06	44,08	41,37	42,84
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja pada sektor primer sebesar 32,88 persen, meningkat menjadi 44,54 persen pada tahun 2021, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 28,67 persen pada tahun 2022. Untuk sektor sekunder penyerapan tenaga kerja sebesar 24,06 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 11,38 persen pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 29,96 persen pada tahun 2022. Sementara untuk sektor tersier penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 sebesar 43,06 persen, meningkat menjadi 44,08 persen pada tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan menjadi 41,37 persen pada tahun 2022.

1.3. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka mengalami perkembangan yang relatif cepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan diri dalam rangka kemandirian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.3.1. Struktur Kewilayahan

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan, 62 desa, dan 294 dusun/lingkungan sebagaimana tergambar pada tabel 1.6 di bawah ini.



Tabel 1.6
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan
di Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun/ Lingkungan
1	Mendo Barat	-	15	76
2	Merawang	-	10	33
3	Puding Besar	-	7	23
4	Sungailiat	12	1	50
5	Pemali	-	6	21
6	Bakam	-	9	28
7	Belinyu	7	5	34
8	Riau Silip	-	9	29
Jumlah		19	62	294

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Bangka

1.3.2. Kelembagaan Perangkat Daerah

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan beberapa kali penataan kelembagaan Perangkat Daerah terakhir pada tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Selain itu penataan kelembagaan dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Secara rinci kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;



- d. Dinas Daerah, terdiri dari 18 Dinas Daerah, yaitu :
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A;
 3. Dinas Sosial Tipe B;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 6. Dinas Perhubungan Tipe C;
 7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 13. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 16. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
 17. Dinas Perikanan Tipe A
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B;
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Sungailiat Tipe A;
 2. Kecamatan Belinyu Tipe A;
 3. Kecamatan Riau Silip Tipe A;
 4. Kecamatan Mendo Barat Tipe A;



5. Kecamatan Bakam Tipe A;
6. Kecamatan Puding Besar Tipe A;
7. Kecamatan Pemali Tipe A;
8. Kecamatan Merawang Tipe A;

1.3.3. Aparatur Pemerintahan

Aparatur pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka terus mengalami perubahan dan dinamika dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional dan melayani, salah satunya melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, serta penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja aparatur daerah.

Kondisi ASN di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 menurut golongan terdiri dari 10 orang Golongan I (0,28 persen), Golongan II sebanyak 454 orang (12,49 persen), Golongan III sebanyak 2.565 orang (70,54 persen), dan Golongan IV sebanyak 607 orang (16,69) persen dari seluruh aparatur yang ada di Kabupaten Bangka, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.7
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	I	6	4	10	0,28
2	II	239	215	454	12,49
3	III	878	1.687	2.565	70,54
4	IV	260	347	607	16,69
Jumlah		Jumlah	1.383	2.353	3.636

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2023

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bangka menurut tingkat pendidikan terdiri dari SD sebanyak 7 orang atau sebesar 0,19 persen dari total jumlah ASN di Kabupaten Bangka, SLTP sebanyak 15 orang atau sebesar 0,41 persen, SLTA sebanyak 446 orang atau sebesar 12,27 persen, Diploma I sebanyak 17 orang atau sebesar 0,47 persen, Diploma II sebanyak 67 orang atau sebesar 1,84 persen, Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 536 orang atau sebesar 14,74 persen, Diploma IV sebanyak 48 orang atau 1,32 persen, Strata 1 sebanyak 2.304



orang atau sebesar 63,37 persen, Strata 2 sebanyak 193 orang atau sebesar 5,31 persen, dan Strata 3 sebanyak 3 orang atau hanya 0,08 persen dari keseluruhan ASN yang ada di Kabupaten Bangka. Secara detail, jumlah ASN Kabupaten Bangka menurut tingkat pendidikan tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 1.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	4	3	7	0,19
2	SLTP	11	4	15	0,41
3	SLTA	264	182	446	12,27
4	D.I	5	12	17	0,47
5	D.II	34	33	67	1,84
6	D.III / SM	116	420	536	14,74
7	D.IV	31	17	48	1,32
8	S.1	816	1.488	2.304	63,73
9	S.2	100	93	193	5,31
10	S.3	2	1	3	0,08
Jumlah		1.383	2.253	3.636	100,00

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2023

1.3.4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Ketersediaan aparatur pemerintah yang profesional, sarana dan prasarana pendukung serta sistem manajemen yang baik merupakan beberapa bagian penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif, dan efisien. Secara detail, jumlah sarana dan prasarana pemerintah daerah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.9
Jumlah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Jumlah	%	Keterangan
1	Tanah	bidang	1.093	0,07	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal, Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan, Tanah



					untuk Bangunan Industri, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga, Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah, Tanah Basah, Tanah Kering, Tanah Hutan, Tanah Lapangan Olahraga, Tanah untuk Bangunan Bersejarah, Tanah untuk Makam, Tanah untuk Taman, Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam, Tanah untuk Jalan, Tanah untuk Bangunan Air dan Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	Peralatan dan mesin	unit	256.180	15,33	Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-Rambu, Peralatan Olahraga
3	Gedung dan Bangunan	unit	5.592	0,33	Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	unit	11.083	0,66	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, Jaringan irigasi, bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/ baku, bangunan air kotor, bangunan air lainnya, instalasi air minum/ bersih, instalasi air kotor, instalasi gardu listrik, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telepon
5	Aset Tetap Lainnya	unit	1.397.303	83,61	Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Aset Tetap Dalam Renovasi
Jumlah			1.671.251	100,00	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, 2023



Sarana dan prasarana pemerintahan di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 didominasi oleh aset tetap lainnya dengan jumlah sebanyak 1.397.303 unit atau sebesar 83,61 persen, kemudian diikuti oleh peralatan dan mesin sebanyak 256.180 unit atau sebesar 15,33 persen. Sementara sisanya yaitu jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 11.083 unit atau 0,66 persen; gedung dan bangunan sebanyak 5.592 atau 0,33 persen; dan tanah sebanyak 1.093 bidang atau 0,07 persen.

1.4. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan

1.4.1. Permasalahan Pembangunan Tahun 2022

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
- mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
- terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
- memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Selain berpedoman pada norma-norma tersebut di atas, identifikasi masalah juga memperhatikan permasalahan yang dirumuskan oleh DPRD melalui pokok-pokok pikiran DPRD, memperhatikan permasalahan yang didapatkan dari proses Musrenbang, melihat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan data-data yang ditampilkan pada gambaran umum kondisi daerah.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras untuk perbaikan. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan berdasarkan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka yang terkait langsung dengan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 sebagai berikut:

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan sasaran 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, 2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, dan 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.
- Urusan Pendidikan terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
- Urusan Kesehatan terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
- Urusan Pengendalian Penduduk dan KB terkait dengan sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- Urusan Sosial terkait dengan sasaran Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Perhubungan terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
- Urusan Pariwisata terkait dengan sasaran Meningkatkan Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
- Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, dan Urusan Koperasi dan UMKM terkait dengan sasaran 1) Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa, dan 2) Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
- Urusan Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Bencana terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan pada unsur penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut.



Tabel 1.10
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Analisis	Permasalahan
1	<p>Data Makro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 61,17 dengan predikat B - Hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dengan predikat BB - Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebesar 2,77 dengan kategori Cukup - Indeks Profesionalitas ASN sebesar 63,73 - Opini hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 rata-rata sebesar 84,33 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi, karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. - Belum optimalnya capaian evaluasi AKIP, walaupun tahun 2019 sudah mendapat predikat BB, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan - Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah - Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan - Distribusi pegawai belum proporsional sesuai dengan formasi dan kebutuhan. - Belum optimalnya penempatan pegawai dalam hal kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan dan tugas. - Belum optimalnya penerapan sistem e-kinerja ASN - Terbatasnya kemampuan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan ASN - Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

b. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perpustakaan sebagai berikut.



Tabel 1.11
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Perpustakaan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - perpustakaan daerah 1 unit, dengan jumlah pengunjung tahun 2020 sebanyak 1.504 orang - perpustakaan keliling 1 unit - perpustakaan desa/kelurahan 36 unit - Taman Bacaan Masyarakat 10 unit - tenaga pustakawan berjumlah 3 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - rendahnya minat baca dan budaya baca siswa maupun masyarakat - belum optimalnya pemerataan kelembagaan perpustakaan/taman baca di tingkat desa/kelurahan - terbatasnya jumlah tenaga pustakawan berdasarkan jurusan dan jenjang kependidikan - Pelayanan perpustakaan masih belum berbasis teknologi informasi dengan jaringan yang sangat terbatas - jumlah koleksi perpustakaan yang masih belum memenuhi standar baik buku cetak ataupun buku berbasis <i>e-book</i>

c. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut.

Tabel 1.12
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan penerbitan akta Perkawinan tahun 2020 sebesar 217 - Cakupan penerbitan KTP EI 98% - Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun 94% - Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 98% - Cakupan Penerbitan Akta Kematian 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan

d. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 1.13
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masih di bawah standar nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang berkisar 8,23



No	Analisis	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 8,24 tahun sementara standar nasional 8,34 tahun - angka harapan lama sekolah tahun 2020 12,77 tahun sementara standar nasional 12,95 tahun - masih adanya anak usia sekolah (7-15 tahun) yang tidak sekolah, terutama pada jenjang SMP (usia 13-15 tahun) 	<p>tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi kenaikan Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI dan Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs

e. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 1.14
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan

No	Analisis	Permasalahan
1	<p>Data Makro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kematian Ibu belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 61,99/100.000 kematian dengan capaian 80,24/100.000 KH (absolut ada 5 Kematian Ibu dari 6.231 KH). - Angka Kematian Bayi (AKB) belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,81/1000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Bayi mencapai 4,81/1000 KH (absolut ada 30 Kematian Bayi dari 6.231 Kelahiran Hidup). 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil. - Belum maksimalnya sosialisasi terkait konsumsi gizi ibu hamil, dan pencegahan kehamilan di usia dini.

f. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut.

Tabel 1.15
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Analisis	Permasalahan
1	<p>Data Makro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> Kabupaten Bangka sebesar 2,50 masih termasuk tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - masih ada sebagian masyarakat yang menolak program KB - sebagian besar PUS



No	Analisis	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pasangan usia subur sampai dengan tahun 2020 sebesar 51.938 PUS - Jumlah peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2020 sebesar 40.804 peserta - Jumlah Keluarga Prasejahtera pada tahun 2020 sebesar 281 Keluarga - Jumlah Keluarga Prasejahtera 1 pada tahun 2020 sebesar 2.385 Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> masih enggan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang - masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang program KB

g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

Tabel 1.16
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Analisis	Permasalahan
1	<p>Data Makro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2020 sebesar 88,48 - tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 44,56 pada tahun 2020 (BKKBN Bangka Belitung, 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender - Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan - Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender - Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional - Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik - Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak

h. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan pada urusan Sosial sebagai berikut.



Tabel 1.17
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 4,51%, menurun dibandingkan 4,92% di tahun 2019	- belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar - belum seluruh masyarakat miskin ter-cover layanan PBI-BPJS Kesehatan - data masyarakat miskin yang belum up to date dan terintegrasi - dampak COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin, karena dilakukan penanganan dengan baik sehingga kemiskinan tidak bertambah

i. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut.

Tabel 1.18
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 78,26% - proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 98,07 % - proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 88,70 % - ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah tahun 2020 sebesar 32,28 %	- belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik - Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah - keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya - dampak COVID-19 salah satunya pembatalan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berasal dari DAK Fisik dan DID pada tahun 2020, sehingga kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten akan menurun

j. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pembangunan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut.



Tabel 1.19
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - lingkungan pemukiman kumuh tahun 2020 sebesar 0,024 % - persentase rumah tidak layak huni tahun 2020 sebesar 2,6 % - 95,18 % masyarakat terlayani sanitasi dasar - 98,71 % masyarakat memiliki akses air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses penyediaan air bersih yang masih belum memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan - Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara - Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota - keterbatasan APBD untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni - dampak COVID-19 yaitu pembatalan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2020 termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum

k. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanahan sebagai berikut.

Tabel 1.20
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - lahan yang bersertifikat pada tahun 2020 sebesar 33,33% 	<ul style="list-style-type: none"> - sebagian masyarakat tidak bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan sarana umum (pembangunan/ pelebaran jalan, siring, pasar, dll) jika tidak ada ganti rugi dari pemerintah - masih ada aset lahan milik Pemkab Bangka yang belum memiliki sertifikat - sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki

l. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perhubungan sebagai berikut.

Tabel 1.21
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perhubungan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada



No	Analisis	Permasalahan
	terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 2,30%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya penyediaan lampu penerangan jalan umum - masih rendahnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya - tingginya angka kecelakaan lalu lintas

m. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Tabel 1.22
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka tahun 2020 pada angka 2,77 termasuk kategori Cukup	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi termasuk internet di daerah pedesaan, bahkan masih ada desa yang belum terlayani internet sama sekali - Belum optimalnya integrasi sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Bangka

n. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan Pariwisata sebagai berikut.

Tabel 1.23
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pariwisata

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebanyak 91.563 orang dengan pertumbuhan -3,77 - Kontribusi investasi sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek – objek wisata daerah - masih rendahnya investasi di sektor pariwisata - belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata - belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya. - minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait) - kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk



No	Analisis	Permasalahan
	dibanding total investasi pada tahun 2019 sebesar 0,15%	ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat - produksi dan pengembangan cinderamata khas daerah masih sangat terbatas - kondisi darurat COVID-19 mengakibatkan hal-hal sbb : <ul style="list-style-type: none"> ➢ adanya pembatasan bahkan pelarangan penerbangan dan perjalanan kapal penumpang sehingga akses keluar masuk terhambat ➢ aturan <i>social distancing</i> mengakibatkan event-event pariwisata tidak dapat dilaksanakan ➢ jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri menurun drastis ➢ banyak objek wisata yang tidak beroperasi ➢ kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu cukup lama

o. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanian sebagai berikut.

Tabel 1.24
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 21,5 % - Nilai Tukar Petani tahun 2020 sebesar 113.46	- Penurunan produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. - Penurunan harga komoditas pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mengikuti harga dunia - Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakat miskin terhadap akses sumber daya pertanian

p. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut.



Tabel 1.25
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 27.110,51 Ton dengan nilai produksi Rp. 1.068.306.297.750,- - jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 3.455,52 Ton dengan nilai produksi Rp. 234.509.161.100,- - Nilai Tukar Nelayan tahun 2020 sebesar 113,20 	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan sub sektor Perikanan dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan. - sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai - ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan - masih adanya <i>illegal fishing</i> (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat - masih rendahnya produksi perikanan budidaya - rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi

q. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Permasalahan pembangunan pada urusan Koperasi dan UMKM sebagai berikut.

Tabel 1.26
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Koperasi dan UMKM

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah koperasi tahun 2020 sebanyak 207 unit - koperasi yang aktif sebanyak 136 unit atau 66,34 % - jumlah UMKM pada tahun 2020 sebanyak 5.197 UMKM (OSS) 	<ul style="list-style-type: none"> manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik produktivitas koperasi dan UMKM masih rendah - kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah

r. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perdagangan sebagai berikut.



Tabel 1.27
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 21.74 %	- masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk lokal ke luar daerah - belum optimalnya upaya peningkatan kualitas produk lokal - perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan

s. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan pada urusan Perindustrian sebagai berikut.

Tabel 1.28
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perindustrian

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 20,21%	- perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya. - Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan - kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri

t. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan Penanaman Modal sebagai berikut.

Tabel 1.29
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanaman Modal

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - jumlah realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.947.222.662.996,- (PMDN) dan	- Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. - Belum optimalnya upaya untuk



	USD 24.832.103,39 (PMA)	melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM. - Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi
--	-------------------------------	---

u. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada urusan Tenaga Kerja sebagai berikut.

Tabel 1.30
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Ketenagakerjaan

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - angka pengangguran meningkat pada tahun 2020 sebesar 5,42 dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 3,80 %	- kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah

v. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

Tabel 1.31
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Lingkungan Hidup

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2020 mencapai 62,22 - Jumlah sampah yang dikelola di TPS baru mencapai 98,91%	- Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Bangka - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk sampah. - Masih minimnya bank sampah dan TPS3R - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih terutama masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan - Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena aktivitas penambangan, perluasan pemukiman penduduk, dan kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang - Belum optimalnya penegakan aturan terkait tata ruang yang dampaknya merugikan usaha pelestarian lingkungan



w. **Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana**

Permasalahan pembangunan pada urusan Trantibumlinmas sub urusan Penanggulangan Bencana sebagai berikut.

Tabel 1.32
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Sub Urusan Bencana

No	Analisis	Permasalahan
1	Data Makro - Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bangka sebesar 168,40 termasuk kategori tinggi menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah yang rawan ancaman bencana.	- Koordinasi antar instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal, karena BPBD sebagai instansi koordinator baru dibentuk pada tahun 2020 - Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana - Belum tersedianya database identifikasi daerah rawan bencana - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti <i>illegal logging</i> , <i>illegal mining</i> , membuang sampah sembarangan, dsb.

1.4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2022

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara meringkaskan isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan.

Berdasarkan data dan informasi dalam permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi isu strategis di Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 1.33
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	5,04	4,51	2,93	-0,73

Sumber : BPS Kabupaten Bangka

Trend pertumbuhan ekonomi terlihat cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,04%, kemudian turun menjadi 4,51% pada tahun 2018, dan kembali mengalami perlambatan yang sangat signifikan hingga menyentuh -0.73% saja pada tahun 2020.

Menurunnya fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global, kondisi tersebut diperkuat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berkontraksi 4,37% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,17%. Hal ini tentu saja mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan momentum pertumbuhan ekonomi regional.

Upaya yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian, perlu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan menjadi daya ungkit, yaitu membangun industri pertanian, perikanan, dan pariwisata tetapi belum berjalan maksimal. Padahal sektor ini memiliki peran dalam meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat wisata pada umumnya, yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum, perlu meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan agar lebih optimal.

Selanjutnya, masih lemahnya struktur dan kinerja industri dan pertanian dikarenakan hampir seluruh komoditas pertanian berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Berbagai langkah telah diambil untuk melakukan transformasi ekonomi, diantaranya melalui pembangunan sarana dan prasarana pembangunan sektor strategis, namun masih belum memadai, sehingga perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat.



Minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan, sehingga penyerapan tenaga kerja belum maksimal. Sementara, penyerapan tenaga kerja yang besar dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan tetapi belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai.

Sektor-sektor di atas yang mensupport tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Bangka perlu terus dilakukan penguatan dan optimalisasi, agar tidak terjadi penurunan indikator yang dijadikan tolak ukur yang dapat menunjukkan arah pergerakan ekonomi kearah positif. Indikator tersebut meliputi pengeluaran per kapita, pendapatan daerah dan angka kemiskinan.

Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian tahun 2021 adalah resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian nasional termasuk Kabupaten Bangka hingga tahun 2022.

2. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan bagian dari area reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 telah mengamanatkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu : mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.34
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	45,58	58,00	57,68	60,80	61,17



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka pada tahun 2020 sebesar 61,17 dengan kategori “B” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 60,80. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, antara lain :

- Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi atau pencabutan beberapa peraturan yang dinilai tidak harmonis
- Menyusun peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja RPJMD dan pengembangan e-gov telah dilakukan, namun masih focus pada kebutuhan tata kelola internal; dan
- Melakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun guna memastikan keselarasan struktur organisasi dengan peta proses bisnis yang juga telah ditindaklanjuti dengan rencana restrukturisasi di beberapa OPD.

Walaupun Indeks Reformasi Birokrasi sudah mendapat kategori “B”, akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka antara lain :

- Telah melakukan penunjukan agen perubahan, namun agen perubahan yang ditunjuk belum mampu memberikan kontribusi dalam perubahan budaya kerja di masing-masing unit kerjanya.
- Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti: belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
- Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*, pengembangan karir serta kompetensi pegawai;
- Telah menetapkan unit kerja Zona Integritas pada unit kerja strategis dan memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat, namun upaya-upaya pembangunan ZI pada unit kerja tersebut dinilai belum optimal.
- Belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap OPD, peningkatan hanya terlihat dari pemanfaatan aplikasi dan penerapan kebijakan yang bersifat umum, belum terlihat adanya inovasi-inovasi dari



masing-masing OPD dalam memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.

- Hasil pengukuran Indeks Integritas Jabatan sebesar 2,73 dari skala 4 dan Indeks Integritas Organisasi sebesar 3,20 dari skala 0-4 menunjukkan masih ada *gap* sehingga masih ada ruang perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem integritas.
- Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan Indeks 3,33 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan masih ada *gap* atau selisih antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
- Hasil survey persepsi korupsi dengan Indeks 3,31 dalam skala 4 menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka isu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi masih harus menjadi fokus perhatian pada perencanaan pembangunan tahun 2022.

3. Akses Teknologi Informasi

a. Teknologi Informasi Pemerintahan

Penguatan tata kelola pelayanan dapat dilakukan secara efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja yang produktif. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka tahun 2020 sebesar 2,77 dengan kategori baik, namun dengan demikian pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih harus dioptimalkan. Pemanfaatan TIK sudah diterapkan untuk perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa, maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyaknya data yang belum terintegrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan



pemerataan kualitas layanan. Meskipun demikian, saat ini penerapan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan khususnya di perdesaan masih belum maksimal sehingga pemerataan kualitas pendidikan melalui TIK masih belum efektif. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan juga masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan *platform digital* seperti *telemedicine*, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif. Dalam bidang ekonomi, industri, maupun jasa, pemanfaatan TIK juga dapat memberikan dampak yang besar. Namun demikian, saat ini pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim, sehingga manfaat TIK bagi petani dan nelayan belum signifikan seperti memberikan informasi harga yang paling aktual dan memperluas jaringan penjualan kepada nelayan. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi kreatif, pemanfaatan TIK berdampak besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

b. Teknologi Informasi Sektor Private

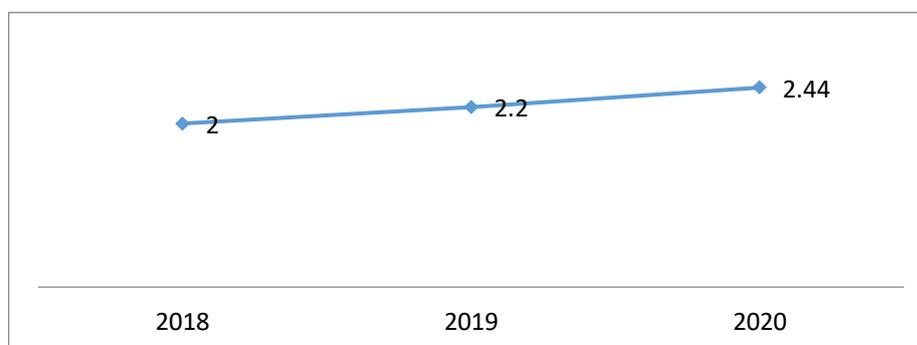
Sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi Kabupaten Bangka adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagai jasa perdagangan ritel. Pengembangan teknologi informasi diperkirakan akan menjadi salah satu penggerak ekonomi UMKM dan investasi serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan teknologi yang terus meningkat tajam dari tahun ke tahun, dilakukan demi mengimbangi kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin besar. Dalam setiap aspek kehidupan, selalu ada teknologi digital yang membantu kita sehari-hari, menjadikan aktivitas lebih efisien. Pertumbuhan PDRB yang cukup signifikan dari sektor komunikasi ini menjadi bukti nyata bahwa pandemi mendorong masyarakat Kabupaten Bangka untuk segera melakukan transisi ke era digital. Untuk itu perlu upaya-upaya yang tidak biasa agar industri telekomunikasi tumbuh sehat. harga dapat turun, pengguna makin banyak karena tarif makin terjangkau. Selain itu perlu disiapkan sejumlah program prioritas seperti pertumbuhan e-commerce, industri kreatif,



keuangan inklusif dan UMKM Go Digital. Berikut ini Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB dari tahun 2018-2020.

Gambar 1.1
Kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bangka

Era digital sudah bukan lagi perkara masa depan, namun sudah menjadi realita bagi seluruh populasi dunia termasuk masyarakat pedesaan. Karena itu perlu digitalisasi Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun, Rata-rata Indeks Desa membangun Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari 0,6760 pada tahun 2019 menjadi 0,6839 pada tahun 2020. Akan tetapi jumlah desa dengan status desa Mandiri hanya terdapat satu desa. Desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang rendah. Pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dengan teknologi informasi atau e-commerce dan mengembangkan produk unggulan berdaya saing di pasar. Penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa dan informasi melalui internet atau fasilitas dalam jaringan sudah harus dikembangkan oleh masyarakat desa karena konsumen e-commerce selalu meningkat setiap tahunnya.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi perhatian semua pihak karena peluang 'e-commerce' untuk menjual produk melalui daring maka perlu didukung beberapa hal yakni kualitas produk, sarana informasi dan telekomunikasi, kualitas



sumber daya manusia (pelaku usaha) dan permodalan. "Pemerintah desa harus melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat baik melalui karang taruna maupun pemuda di desa.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Reformasi Kesehatan

Indikator keberhasilan layanan kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.35
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,52	70,56	70,73	70,99	71,06

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Pembangunan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan ekonomi. Generasi sehat dan sejahtera adalah generasi yang diharapkan akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju. Kesehatan menjadi podasi penting dalam pembangunan, dengan rumusan bahwa (1) pencapaian standar tertinggi kesehatan merupakan hak asasi setiap individu, tanpa membedakan suku, agama, kepentingan politik, maupun kondisi ekonomi dan sosial; (2) ketimpangan dalam promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit, akan berkoleraasi negatif dengan kemajuan pembangunan; (3) kesehatan aset sekaligus sumber daya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. (4) indikator kesehatann berhubungan eran dengan kinerja perekonomian dan kesejahteraan.

Perhatian nasional dan daerah terhadap kesehatan sudah sangat tinggi akan tetapi pelaksanaan yang belum maksimal dikarenakan beberapa factor belum maksimal dalam pencapaian target, misalnya sumber daya manusia di bidang kesehatan masih kurang dan belum tersebar secara merata, dan kurangnya partisipasi/kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.



Pada masa pandemic Covid-19, ledakan pasien yang tinggi perlu dilakukan perbaikan dalam pembangunan kesehatan, dengan melakukan reformasi di beberapa komponen kesehatan yang sudah ada, yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah. Reformasi kesehatan meliputi 8 (Delapan) area yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan DPTK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan indentifikasi terhadap permasalahan kesehatan terjadi dan berkembang di masyarakat di Kabupaten Bangka, terdapat permasalahan sebagai berikut :

- Kurang luasnya jangkauan pelayanan kesehatan pasca pandemi Covid-19 khususnya pelayanan vaksin, dengan sistem layanan di Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama yang terdekat bagi masyarakat.
- Untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, perlu dilakukan optimalisasi dan penguatan yaitu pencegahan dan penurunan angka stunting, angka persalinan yang menggunakan fasilitas kesehatan, pelayanan imunisasi dasar lengkap, melakukan standarisasi tenaga kesehatan Puskesmas, jumlah dokter spesialis yang dibutuhkan oleh RSUD, peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi, dan pelayanan surveilans.
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum merata, menyebabkan fasilitas kesehatan tidak dimanfaatkan secara maksimal, seperti partisipasi masyarakat terkait vaksin, yang mengharuskan pelayanan dilakukan door to door kepada masyarakat.
- Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pemberian pemahaman terkait masalah kesehatan kepada masyarakat belum maksimal.
- Kurang pelayanan surveilans di Puskesmas.
- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan.



b. Reformasi Pendidikan

Indikator pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rataan lama pendidikan. Angka pencapaian indikator pendidikan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.36
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,37	12,58	12,68	12,76	12,77
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,96	8,19	8,20	8,23	8,24

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Jika dilihat dari angka pencapaian indikator, belum tercapainya angka standard sesuai dengan program nasional untuk pendidikan dasar. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas dan kemampuan tenaga pendidik, penyebaran tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tidak merata, kurangnya fasilitas dan alat peraga pendidikan, lingkungan sosial dan ekonomi anak didik yang tidak mendukung sehingga banyak anak yang putus sekolah., serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat menghambat penerimaan pelayanan.

c. Reformasi Perlindungan Sosial Berkeadilan

Indikator perekonomian masyarakat direpresentasikan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel 2. 113 berikut ini :

Tabel 1.37
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	11.279	11.420	12.043	12.480	12.416

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020



Pengeluaran per kapita menjadi indikator penting dalam menghitung angka kemiskinan penduduk. Untuk menekan angka kemiskinan salah satunya dengan integrasi penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bangka, masih terkendala pada pendataan yang belum maksimal, baik untuk program jaminan sosial, rumah tangga miskin dan rentan, dan penerima bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional. Pendataan yang akurat menjamin penduduk miskin, rumah tangga miskin dan rentan dapat diintervensi dengan tepat pengeluaran per kapita tidak mengalami penurunan, sehingga angka kemiskinan tidak mengalami kenaikan.

Selain itu, pelayanan sosial pada hakekatnya diperlukan oleh semua orang. Kita semua pada suatu masa tertentu dalam kehidupan, pasti memerlukan pelayanan sosial baik atas nama pribadi atau bagi anggota keluarga lainnya. Pelayanan sosial sangat diperlukan pada saat krisis menimpa masyarakat yang mengalami berbagai gangguan seperti gangguan kesehatan mental, kelahiran bayi dengan kecacatan, perceraian keluarga atau kematian seseorang yang menjadi “tulang punggung” keluarga. Masyarakat akan menjadi sangat tergantung dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu sangat diperlukan pelayanan dan perlindungan sosial yang berkeadilan.

Semua masyarakat tidak boleh berada dalam posisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun diprioritaskan bagi mereka yang lemah, pelayanan sosial hendaknya tidak lagi bersifat residual yang seringkali *ad-hoc*, temporer, tidak berkelanjutan dan tidak pasti. Di Kabupaten Bangka pertumbuhan penduduk, perubahan demografi, pergeseran pola-pola keluarga memberi pesan jelas bahwa pelayanan sosial sebaiknya semakin mendekati prinsip institusional-universal. Pelayanan sosial semakin dituntut tidak hanya mampu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap sejumlah pemerlu perlindungan (*beneficiaries*)



5. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Perlu upaya percepatan pemenuhan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur pengembangan pusat-pusat produksi wilayah, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarana perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanian.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran diantaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan/sanitasi) belum maksimal. Hal ini terutama karena keterbatasan APBD Kabupaten Bangka. Sementara keterlibatan swasta sangat minim dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial.

Tabel 1.38
Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	70,00	73,18	73,25	74,59	78,26
2	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	96,76	97,20	97,85	98,07	98,07
3	Persentase Rumah	86,81	91,67	91,69	94,12	95,18



No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020*
	Tangga Terlayani Sanitasi Dasar					
4	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	97,04	90,07	91,69	98,71	98,71
5	Persentase Rumah Layak Huni	97,83	94,97	98,01	97,40	97,40

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2020 proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 78,26 %, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 98,07 %, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik mencapai 88,70 %, masyarakat yang terlayani sanitasi dasar baru mencapai 95,18 %, masyarakat yang memiliki akses air bersih baru mencapai 98,71 %, dan masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni mencapai 97,40 %.

Berdasarkan data di atas, pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian (investasi, pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dll), serta kualitas SDM (kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, sanitasi, dll), yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harus diperhatikan juga pemerataan penyediaan infrastruktur antar wilayah Kecamatan agar terjadi pemertaan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kecamatan.

6. Daya Saing Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata adalah sektor ekonomi potensial dan bersifat *sustainable* di Kabupaten Bangka sehingga diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir di mana jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata 86.966 orang per tahun, yang diikuti dengan peningkatan *spending of money tourism* sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.39
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	72.309	75.618	77.130	90.714	91.563
2	<i>Spending Of Money Tourism</i> (Milyar)	7,11	7,65	8,77	16,31	16,31

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka, 2020

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan pariwisata salah satunya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Melalui penetapan KEK Pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Bangka. Kemungkinan hal ini sangat besar bisa terwujud karena KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi beberapa hal juga masih menjadi kendala dan penghambat dalam pembangunan pariwisata antara lain :

- Penyediaan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata unggulan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
- Kemitraan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha pariwisata belum optimal
- Pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2020 menyebabkan sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Bangka mengalami kemerosotan yang sangat besar, terutama akibat aturan *social distancing* dan *physical distancing* yang menyebabkan tempat-tempat wisata kehilangan pengunjung.



7. Produksi dan Daya Saing Sektor Industri

Penurunan aktivitas masyarakat dan dunia usaha adalah imbas dari Pandemi Covid19, sehingga tentu mengganggu rantai pasok dan utilitas industry. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekonomi harus berfokus kepada pemilihan industry yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja dan memiliki *multiflier effect* terkait dengan transmansi ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bangka juga tidak bisa dilepaskan dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan besar dan eceran dan lain-lain yang adalah merupakan sektor-sektor unggulan daerah. Fokus pembangunan industri dilaksanakan berbasiskan sektor industri yang menggunakan bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Karenanya fokus industrialisasi harus beriringan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan seluruh sub sektornya untuk menjamin ketersediaan input industri. Berikut merupakan grafik kontribusi 5 sektor unggulan ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bangka.

Sektor industri pengolahan berperan penting dalam upaya mengenjot nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sector andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Bangka mulai kurun waktu 2016 investor mulai tertarik untuk berinvestasi di bidang perdagangan dan industri. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) namun tidak diiringi dengan kenaikan investasi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), oleh karena itu perlu upaya lebih bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan nilai investasi.

8. Produksi dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian memiliki beberapa peranan yaitu mensejahterakan petani, menyediakan kebutuhan pangan, sebagai wahana pemerataan pembangunan, sebagai pasar input bagi pengembangan agroindustri, menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan nasional, dan mempertahankan kelestarian sumber daya. Selain itu secara statistik dapat dilihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi yang kuat di era pandemi covid 19 dengan tetap



tumbuh positif sebesar 6,26%. Akan tetapi laju pertumbuhan yang positif tersebut belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di Kabupaten Bangka cenderung bersifat fluktuatif, besar kecilnya angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk-produk lain.

Pertanian juga memiliki fungsi ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan, hal-hal yang perlu diperhatikan antarlain adalah, kualitas pangan, ketersediaan pangan dalam jangka panjang dan juga keanekaragaman jenis pangan sehingga penduduk Kabupaten Bangka bebas dari kelaparan. Salah satu bentuk pembangunan pangan berkelanjutan adalah melalui diversifikasi pangan. Melalui diversifikasi pangan diharapkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok berupa beras dapat ditekan, pola pangan harapan dapat terwujud, serta dapat meningkatkan pemanfaatan atau pengoptimalan potensi lokal, baik berupa potensi tanaman lokal maupun sumber daya manusia.

Selain ketahanan pangan, pertanian juga berperan penting dalam penyedia lapangan pekerjaan. Sekitar 30 persen penduduk Kabupaten Bangka bekerja di sektor pertanian. Pembangunan industri pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pada umumnya serta meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian, semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan.

9. Daya Saing Sektor UMKM

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global. Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Bangka dengan kontribusi mencapai ±57,24 persen dari total PDRB Kabupaten Bangka. Berdasarkan data Dinas UMKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 11.000 pelaku usaha berasal dari UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 79,01 persen dari total tenaga kerja.



Secara umum kinerja UMKM Kabupaten Bangka masih relatif rendah untuk itu ada beberapa hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM seperti, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, perluasan area pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Pelaku UMKM juga sangat membutuhkan bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, relaksasi/penundaan bayaran pinjaman, penundaan pembayaran pajak, serta kemudahan administrasi dalam pengajuan pinjaman. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri terutama untuk bersaing dengan produk asing.

10. Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang harus menjadi fokus pemerintah pada perencanaan pembangunan tahun 2022 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bangka dengan potensi pertambangan timah yang besar tentu saja memiliki potensi perusakan lingkungan yang tidak kecil baik di daratan maupun di perairan dan laut. Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 berada pada angka 62,22, sehingga masih perlu upaya lebih besar untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.
- b. Isu *Green Economy* yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.
- c. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.



- d. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka karena dampak kerusakan lingkungan yang massif pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, wabah penyakit dan sebagainya yang akan memerlukan biaya sangat besar untuk menanganinya.
- e. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan SDA dan kualitas mutu lingkungan hidup. Kabupaten Bangka masih terdampak besar dalam lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, penebangan hutan dan eksploitasi legal perikanan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan kebijakan yang harus dilakukan karena terkait dengan permasalahan ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, serta keselamatan generasi mendatang. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran lima tahun yang ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka 2005-2025. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah: ***"Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera"***.

Visi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor potensial (*leading sectors*) yang dimiliki kabupaten Bangka selama ini berupa industri dan perdagangan yang terkait dengan perkebunan seperti lada, karet dan kelapa sawit, sub sektor perikanan darat dan laut serta sub sektor pariwisata. Pada tahap awal, upaya untuk memantapkan pengembangan sektor-sektor unggulan/potensial ini akan menjadi prioritas untuk mampu mencapai tahapan menjadi daerah industri dan perdagangan yang mengolah dan memasarkan hasil-hasil perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka 2005-2025 di atas akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan berikut :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung;
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif;



6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan arahan RPJPD Kabupaten Bangka, pada tahap pembangunan lima tahun ketiga, upaya untuk melakukan reformasi ekonomi menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif akan semakin ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor unggulan daerah melalui pembangunan industri yang mengolah sektor unggulan daerah akan dikembangkan sebagai industri pendukung (*supporting industries*) dalam konteks pembangunan industri nasional yang menerapkan pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dalam upaya membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kemandirian lokal. Upaya untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan berupa kesenjangan antar daerah (*backwash effect*) dan kelompok masyarakat harus pula dijadikan prioritas pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat yang dirugikan dari proses pembangunan serta pembangunan kewilayahan lainnya.

Pengembangan kawasan pariwisata yang selama ini telah dicanangkan, secara perlahan mulai direalisasikan pada periode ini. Kawasan pariwisata dicirikan dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan jasa dan sektor UMKM. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Di samping itu, mengingat pengembangan kawasan pariwisata ini menggunakan potensi alam, budaya dan atraksi, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (*local social culture*).

Sejalan dengan hal tersebut, agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di era global ini, upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif akan terus ditingkatkan, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, hal yang paling penting dan mendasar adalah upaya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM harus mulai diprioritaskan penanganannya



dalam upaya untuk mendukung paradigma pembangunan kemandirian lokal yang menempatkan faktor manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan.

Guna mewujudkan paradigma ini, birokrasi daerah juga perlu melakukan pembenahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggung jawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas.

2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Bangka dalam RPJMD tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“BANGKA SETARA”

Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu **Bangka** dan **Setara**. Kata **Bangka** merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata **Setara** adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.



2.2. Misi

Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi “Bangka Setara”, maka diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- 4) Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- 5) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Gambar 2.1

Visi dan Misi Bangka Setara RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023





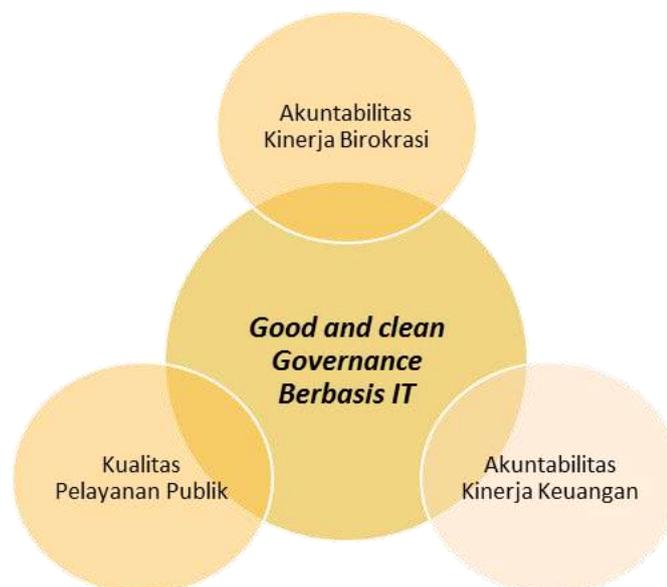
Penjelasan masing-masing Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi

Persoalan kehidupan masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan yang semakin bervariasi sesuai tuntutan perubahan lingkungan harus mendapat pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat yang bermutu melalui tata kelola pemerintahan oleh aparatur yang profesional berlandaskan prinsip *good and clean governance* yang ditunjukkan kinerja birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai misi kesatu ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 1
RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh semakin membaiknya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan



kesehatan menjadi faktor strategis dibarengi dengan peningkatan kesetaraan gender.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 2
RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023



3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah

Pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pengembangan potensi daerah dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 3
RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023



4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.

Sektor pariwisata dengan fungsi *multiplier effect*-nya merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Keberadaan destinasi pariwisata baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata hasil buatan manusia termasuk infrakstruktur dan industri pariwisata pendukungnya yang terus dikembangkan secara berkelanjutan, serta ditetapkannya KEK Pariwisata Sungailiat, menjadi Kabupaten Bangka sebagai menjadi gerbang dan destinasi utama pariwisata berskala internasional bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke pulau Bangka.

Untuk mencapai misi keempat ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 4
RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023





5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Potensi sumber daya alam yang melimpah baik yang tersimpan di dalam maupun di permukaan bumi serta di lautan dalam wilayah Kabupaten Bangka merupakan sumber daya yang sangat penting. dalam menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Penambahan nilai guna ekonomi tersebut diciptakan melalui pengembangan inovasi dan teknologi produksi komoditas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk dari industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan yang berdaya saing serta peningkatan investasi baik nasional maupun luar negeri. Secara berkelanjutan, Untuk mencapai misi kelima ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Kerangka Berpikir Perencanaan Integratif Misi 5
RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023



2.3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Pada tanggal 30 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Perubahan yang dilakukan



mencakup perumusan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang wajib diimplementasikan pada tahun 2021.

Rumusan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 dijelaskan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
				Indeks SPBE
				Indeks Profesionalitas ASN
			1.2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Sebelumnya
			1.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	2.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
			2.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Angka Stunting
			2.3. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i>
			2.4. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender
				Status Kabupaten Layak Anak



				Status Kabupaten Layak Pemuda
			2.5. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita
Misi 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	3.1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur
				Indeks Pemerataan Infrastruktur
Misi 4 : Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	4.1 Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money</i>
Misi 5 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	Tujuan 5 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	1.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB
			5.2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
			5.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Resiko Bencana

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022

Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
**Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Indeks SPBE	Kategori Indeks



		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka
		Angka Stunting	Angka
6	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i>	Indeks
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Indeks
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori
		Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah per orang per tahun
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks
		Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money</i>	Milyar Rupiah
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB	Indeks
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks
		Indeks Resiko Bencana	Indeks

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB
		Indeks SPBE	Indeks	2,76
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,95
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,26
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,79
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,28
		Angka Stunting	Persen	1,68
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka	2,35
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,89
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
		Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori	Pratama
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah per orang per tahun	12.640
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	43,36
		Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	84,22
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money</i>	Milyar Rupiah	126,22
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB	Indeks	88,54
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,255



13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	65,07
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	168,40



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/ target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	> 100%	Melebihi Target	MT
2	= 100%	Tercapai	T
3	< 100%	Tidak Tercapai	TT
4	n/a	Tidak Ada Target	



Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan.

IKU tersebut diukur dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian IKU Kabupaten Bangka Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN S.D 2022 TERHADAP KONDISI AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	BB	100,00	A	89,13
Indeks SPBE	Indeks	2,77	2,76	1,85	67,03	3,00	61,67
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,64	63,95	64,00	100,08	75,01	85,32
Opini Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,47	83,00	85,27	102,73	85,40	99,85
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,26	8,27	100,12	9,04	91,48
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,77	12,79	12,80	100,08	12,95	98,84
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,06	71,28	71,37	100,13	71,44	99,90
Angka Stunting	Tahun	1,96	1,68	1,34	120,24	0,00	98,66
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka	2,69	2,35	2,33	100,85	2,3	98,70



Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,49	88,89	88,84	99,94	89,13	99,67
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	Madya	100,00	Utama	90,00
Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	100,00	Utama	90,00
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah per orang pertahun	12.416	12.640	12.863	101,76	12.859	100,03
Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	23,22	43,36	45,13	104,08	44,29	101,90
Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	82,92	84,22	89,10	105,79	75,43	118,12
<i>Spending Of Money</i>	Milyar Rupiah	84,15	126,22	154,28	122,23	151,47	101,86
Indeks PDRB	Indeks	81,95	88,54	91,60	103,46	73,28	125,00
Indeks Gini	Indeks	0,262	0,255	0,219	114,12	0,264	117,05
Indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	62,22	65,07	64,91	99,75	65,10	99,71
Indeks Resiko Bencana	Indeks	168,40	168,40	168,40	100,00	140,00	79,71

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022, diketahui bahwa 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran atau sebesar 61,90 persen termasuk dalam kategori Melebihi Target (MT), sebanyak 5 (lima) indikator kinerja utama atau sebesar 23,81 persen termasuk dalam kategori Tercapai (T), sementara 3 (tiga) indikator kinerja utama lainnya atau sebesar 14,29 persen termasuk kategori Tidak Tercapai (TT).

Indikator kinerja utama dengan realisasi tertinggi yang termasuk dalam kategori melebihi target yang ditetapkan yakni **Spending of Money** dengan realisasi sebesar 122,23 persen, sedangkan indikator kinerja utama dengan realisasi kinerja terendah yang termasuk dalam kategori tidak tercapai yakni **Indeks SPBE** dengan tingkat realisasi hanya sebesar 67,03 persen.



Indikator kinerja sasaran yang dipaparkan pada tabel di atas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 merupakan gambaran kinerja tahun keempat untuk sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, lebih lanjut akan diuraikan analisis pencapaian masing-masing sasaran.

3.1.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan pemerintah pusat dan daerah. Jantung *good governance* itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas berbagai penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan, dari kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel secara signifikan akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan dan dilaksanakan untuk seluruh program yang berorientasi pada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik.

Indikator kinerja dan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	100,00	T
2.	Indeks SPBE	Indeks	2,76	1,85	67,03	TT



3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,95	64,00	100,08	MT
Rata-rata Capaian					89,04	TT

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja atas indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi sebesar 89,04 persen termasuk kategori Tidak Tercapai (TT) atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan dari 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Indeks SPBE yang ditargetkan sebesar 2,76 dan hanya terealisasikan sebesar 1,85, sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten mencapai target (T) dengan target BB, dan indikator Indeks Profesionalitas ASN Melebihi Target (MT) dari target 63,95 tercapai 64,00.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	BB	100,00	A	89,13
2	Indeks SPBE	Indeks	2,25	2,76	1,85	67,03	3,00	61,67
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,86	63,95	64,00	100,08	75,01	85,32



Pada tabel di atas terlihat bahwa indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten tercapai targetnya dengan kategori yang sama dengan tahun sebelumnya, indikator Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun peningkatannya relatif kecil. Sementara satu indikator yaitu Indeks SPBE mengalami perlambatan.

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka tahun 2022 menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2022, capaian Indeks SPBE tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 67,03 persen. Pencapaian Indeks SPBE sampai dengan tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 61,67 persen ketercapaian.

Pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2022 tercapai 100,08 persen. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 baru mencapai 85,32 persen, sehingga masih perlu dilakukan langkah-langkah cepat dan tepat agar target akhir masa RPJMD dapat dicapai pada tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan di bawah ini.

a. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 71,31 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka “sangat baik”, walaupun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Secara detail, rincian perkembangan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka periode 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi AKIP
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT		NILAI		
		2021	2022	2020	2021	2022*
1.	Perencanaan Kinerja	30	30	23,57	23,75	23,76
2.	Pengukuran Kinerja	25	30	18,00	18,15	17,51



NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT		NILAI		
		2021	2022	2020	2021	2022*
3.	Pelaporan Kinerja	15	15	10,30	10,40	10,78
4.	Evaluasi Internal	10	25	6,37	6,53	19,26
5.	Capaian Kinerja	20	-	13,26	13,44	
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	71,50	72,27	71,31
Kategori Tingkat Akuntabilitas				BB	BB	BB

Sumber : LHE AKIP Kabupaten Bangka 2020, 2021 dan 2022*

Dilihat dari tabel di atas nilai hasil evaluasi padan tahun 2022 mengalami penurunan, namun nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi pada tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun pada level organisasi perangkat daerah.

b. Indeks SPBE

Perkembangan nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan hasil pemantauan SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Indeks SPBE Kabupaten Bangka turun dari 2,25 pada tahun 2021 menjadi 1,85 pada Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, evaluasi SPBE tahun 2021 menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari 37 indikator menjadi 47 indikator, ada penambahan aspek domain manajemen. Nilai aspek-aspek yang



menjadi komponen penyusun Indeks SPBE mengalami perkembangan yang fluktuatif sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.6

Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN INDEKS SPBE	2020	2021	2022
1.	Indeks Domain Kebijakan	2,88	2,70	2,70
2.	Indeks Domain Tata Kelola	2,43	1,60	1,00
3.	Indeks Domain Manajemen	-	1,00	1,00
4.	Indeks Domain Layanan	2,91	2,94	2,38
IndeksSPBE		2,77	2,25	1,85
Predikat		Baik	Cukup	Cukup

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bangka, 2022

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

**Perkembangan Indeks SPBE Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	
		2021	2022
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,60	3,01
2	Kabupaten Bangka	2,25	1,85
3	Kabupaten Bangka Selatan	2,88	3,01
4	Kabupaten Belitung	2,40	3,02
5	Kabupaten Belitung Timur	2,15	2,70
6	Kabupaten Bangka Barat	2,27	2,30
7	Kabupaten Bangka Tengah	2,76	2,80
8	Kota Pangkalpinang	2,10	2,22

Sumber : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka tahun 2022 adalah peringkat terbawah dari 7 kabupaten/kota



yang dinilai dan masih berada dibawah Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga diperlukan kerja keras untuk kinerja yang sangat besar serta upaya-upaya khusus untuk dapat mengejar ketertinggalan Kabupaten Bangka dari kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Indeks SPBE seluruh Indonesia di masing-masing tingkatan, maka Indeks SPBE Kabupaten Bangka masih cukup rendah dibandingkan rata-rata Indeks SPBE daerah kabupaten seluruh Indonesia, rata-rata kota dan provinsi di seluruh Indonesia, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8

**Indeks SPBE Kabupaten Bangka Berdasarkan Rataan Indeks SPBE
Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022**

NO	INDEKS	KAB. BANGKA		RERATA NASIONAL		RERATA PROVINSI		RERATA KABUPATEN		RERATA KOTA	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2021
1	SPBE	2,25	1,85	2,24	2,35	2,46	2,74	2,11	2,17	2,29	2,50
2	Domain Kebijakan	2,70	2,70	2,21	2,39	2,26	2,69	2,13	2,23	2,23	2,61
3	Domain Tata Kelola	1,60	1,00	1,89	1,85	2,14	2,27	1,73	1,64	1,91	1,98
4	Domain Manajem en	1,00	1,00	1,23	1,32	1,31	1,51	1,17	1,21	1,26	1,36
5	Domain Layanan	2,94	2,38	2,81	2,97	3,10	3,45	2,66	2,79	2,88	3,18

Sumber : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi Indeks SPBE Kabupaten Bangka berada di bawah rata-rata Indeks SPBE nasional, rata-rata kabupaten se-Indonesia, rata-rata Indeks SPBE provinsi dan kota se-Indonesia. Dari jenis komponen pembentuk Indeks SPBE Kabupaten Bangka untuk domain kebijakan SPBE Kabupaten Bangka sudah berada diatas seluruh rata-rata nasional, provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk domain tata laksana dan domain manajemen Kabupaten Bangka paling rendah dari seluruh rata-rata



nasional, kabupaten, provinsi, dan kota se Indonesia. Untuk domain layanan Kabupaten Bangka juga paling rendah dari seluruh rata-rata nasional, kabupaten, provinsi, dan kota se Indonesia.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bangka mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan pada domain tata laksana dan domain layanan. Untuk mengetahui lebih rinci capaian komponen pembentuk Indeks SPBE dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.9

Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2021-2022

NO	INDEKS	NILAI	
		2021	2022
	SPBE	2,25 (Cukup)	1,85 (Cukup)
1	Domain Kebijakan SPBE	2,70	2,70
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,70	2,70
2	Domain Tata Kelola SPBE	1,60	1,00
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50	1,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50	1,00
	Penyelenggaraan SPBE	2,00	1,00
3	Domain Manajemen SPBE	1,00	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,00
	Audit TIK	1,00	1,00
4	Domain Layanan SPBE	2,94	2,38
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,90	2,20
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00	2,67

Sumber : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PAN dan RB, 2021 dan 2022

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan walaupun Indeks SPBE Kabupaten Bangka berada pada predikat “Cukup” namun



masih banyak diperlukan upaya perbaikan dan loncatan guna meningkatkan Indeks SPBE Kabupaten Bangka secara signifikan.

Pada domain kebijakan SPBE, Pemkab Bangka sudah mempunyai semua kebijakan SPBE yang dibutuhkan, namun kebijakan-kebijakan yang ada masih belum mengatur kebijakan integrasi antar layanan SPBE. Untuk itu perlu dilakukan reviu dan perbaikan kebijakan yang ada agar dapat mendukung proses integrasi layanan SPBE.

Pada domain tata kelola SPBE, *Master Plan* TIK Kabupaten Bangka perlu segera ditetapkan dengan memperhatikan antara lain: penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan Peta Rencana SPBE, proses pembangunan aplikasi SPBE harus memenuhi siklus pembangunan aplikasi sesuai perencanaan, dan kolaborasi antar unit kerja dalam penerapan SPBE harus dilaksanakan sesuai perencanaan.

Pada domain manajemen SPBE semua aspek indikator masih belum terpenuhi, masih diperlukan upaya lebih keras untuk peningkatan nilai domain manajemen dengan menerapkan manajemen SPBE sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan disertai bukti-bukti penerapannya dan melaksanakan audit TIK secara berkala.

Untuk domain layanan SPBE Kabupaten Bangka sudah menerapkan hampir semua layanan, baik Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik maupun Layanan Publik Berbasis Elektronik. Untuk perbaikan masih perlu penambahan layanan untuk pengelolaan barang milik negara/daerah, layanan data terbuka berbasis elektronik, layanan kepegawaian, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan publik, serta perlu dilakukan reviu dan perbaikan untuk semua layanan SPBE agar saling terintegrasi.

c. Indeks Profesionalitas ASN

Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dengan realisasi pada tahun 2022 yang sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 0,14 poin (dari 63,86 menjadi 64,00).

Pertumbuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dicapai dari pertumbuhan kualifikasi yang diukur dari indikator riwayat pendidikan formal,



pertumbuhan kompetensi yang diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, pertumbuhan kinerja yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN, dan pertumbuhan tingkat disiplin yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Komposit pencapaian unsur penunjang Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10
Perkembangan Komposit Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022

NO	UNSUR PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS	HASIL PENILAIAN 2020	HASIL PENILAIAN 2021	HASIL PENILAIAN 2022
1.	Unsur kualifikasi	11,78	12,69	12,83
2.	Unsur Kompetensi	21,61	21,06	21,06
3.	Unsur Kinerja	25,29	25,11	25,11
4.	Unsur Disiplin	4,99	5,00	5,00
Total		62,64	63,86	64,00

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2022

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dari tahun 2020 dengan nilai 62,64 mengalami sedikit kenaikan di tahun 2021 menjadi 63,86 dan tahun 2022 terus mengalami peningkatan walaupun yang sangat kecil yaitu sebanyak 0,14 dari tahun sebelumnya menjadi 64,00. Namun demikian Indeks Profesionalitas ASN belum pulih kembali seperti sebelum pandemi covid-19, hal ini karena masih terbatasnya kesempatan dan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN yang salah satu alasannya fokus pembiayaan masih pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal tersebut merupakan salah satu penyebab Indeks Profesional ASN Kabupaten Bangka Tahun 2022 hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan:

1. Banyaknya ASN yang dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga perlu diikutsertakan pada diklat struktural yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang jabatan yang diampunya.



2. Adanya keterbatasan penyelenggara diklat struktural yang terakreditasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pilihan terdekat untuk mengirimkan peserta diklat.
3. Adanya pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional, diperlukan diklat fungsional sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah antara lain :

Tabel 3.11

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Penyusunan pohon kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan perangkat daerah dibawahnya belum menggambarkan kerangka logis dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021	- Penyempurnaan seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran strategis, pohon kinerja, dan indikator kinerja utama) seluruh Perangkat Daerah serta keberlanjutan implelementasi manajemen kinerja.
- Pemanfaatan aplikasi silakip dalam pengukuran kinerja dan realisasi anggaran belum maksimal	- Perlu dilakukan penyempurnaan aplikasi silakip yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup memberikan informasi tentang analisis capaian kinerja dan data pembanding capaian kinerja serta belum digunakan sepenuhnya untuk perencanaan	- Melakukan perbaikan kualitas dokumen laporan kinerja perangkat daerah



<p>kinerja tahun berikutnya.</p>	
<p>- Belum terdapat pedoman evaluasi internal yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 dan rekomendasi hasil evaluasi belum secara maksimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah</p>	<p>- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja selanjutnya</p>
<p>- Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab Bangka belum secara eksplisit memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi arsitektur, domain arsitektur SPBE dan muatan Peta Rencana SPBE.</p>	<p>- Arsitektur SPBE kedepan akan diperbaiki. Penjelasan tentang visi misi akan ditambahkan dan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK akan disesuaikan dengan muatan rencana induk SPBE serta menyertakan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai akan dilakukan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola Kabupaten Bangka</p>
<p>- Pemkab Bangka belum menerapkan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE serta belum melaksanakan audit secara maksimal terhadap infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE</p>	<p>- Semua aspek Penerapan Manajemen SPBE kedepannya akan segera diterapkan secara maksimal</p>



Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi didukung oleh pelaksanaan 11 (sebelas) Program, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4) Program Pengelolaan Arsip
- 5) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 6) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 7) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 8) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 9) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 10) Program Kepegawaian Daerah
- 11) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Efektifitas program - program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi mencapai 88,79 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 89,04 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 100,28 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	88,79	89,04	100,28	Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran



terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi mencapai 0,25 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (89,04 persen) terhadap realisasi anggaran program (88,79 persen) sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.13

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)**

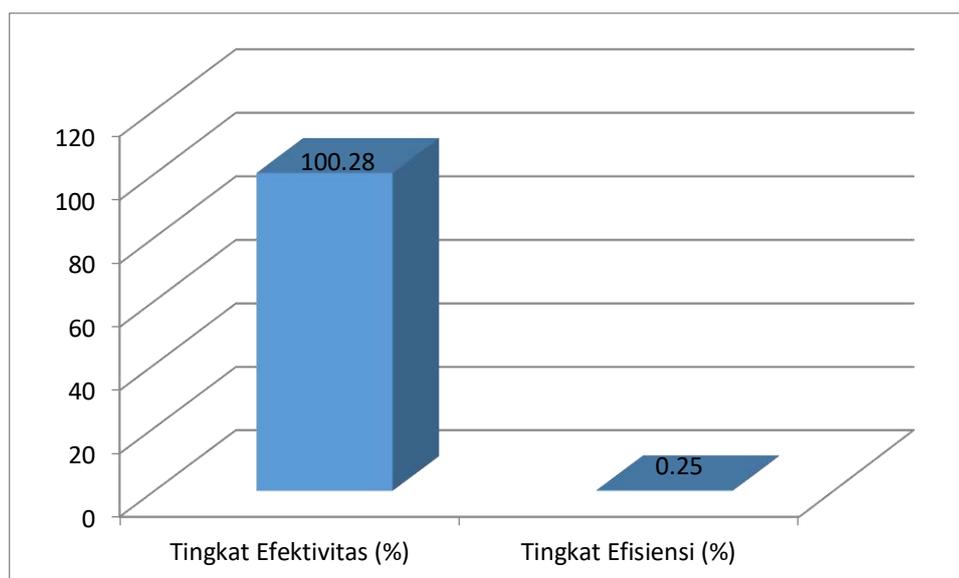
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	720.833.146.677,00	640.013.944.575,15	88,79	89,04	0,25

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi tahun 2022 dapat dilihat dari Grafik berikut:

Grafik 3.1

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi"**





3.1.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan upaya Pemerintah Daerah selaku Entitas Akuntansi dalam menyajikan laporan keuangannya agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diungkap secara memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal yang efektif dan handal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah merupakan alat ukur yang membuktikan bahwa keuangan daerah telah dikelola secara transparan dan akuntabel.

Opini WTP memiliki arti penting bagi berbagai pihak. Laporan Keuangan dengan opini WTP dapat menginformasikan kepada publik bahwa anggaran pemerintah daerah yang diamanatkan oleh rakyat telah dikelola sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices). Opini WTP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mengetahui bahwa pajak dan sumber-sumber lain keuangan telah dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan. Opini WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi suatu keharusan. Karenanya pengelolaan keuangan yang transparan menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka setiap tahunnya dengan target indikator kinerja WTP.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor: 81.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten Bangka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Target, realisasi dan capaian kinerja atas sasaran dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.14

**Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	100,00	T
Rata-rata Capaian					100,00	T

Capaian kinerja atas Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel sebagaimana disajikan pada tabel di atas ditargetkan mendapat opini WTP pada tahun 2022 dan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu memperoleh opini WTP dengan capaian kinerja sebesar 100 persen yang termasuk dalam kriteria Tercapai (T).

Capaian kinerja ini diperoleh melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Capaian kinerja Wajar Tanpa Pengecualian ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memperhatikan Sistem Pengendalian Internal serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja WTP pada tahun 2022 mengukuhkan capaian kinerja WTP beberapa tahun-tahun sebelumnya. Selama periode RPJMD Tahun 2019-2023, Kabupaten Bangka telah berhasil meraih opini WTP selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Kabupaten Bangka secara konsisten berhasil menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap pengelolaan keuangan negara dan



daerah yang telah sangat baik sehingga pengelolaan keuangan telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Capaian kinerja tahun 2022, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya telah sangat konsisten berada pada target yang ditetapkan. Bahkan jika dibandingkan target jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, maka capaian tahun 2022 telah sesuai dengan kondisi akhir yang diharapkan. Secara detil perbandingan capaian kinerja atas Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah daerah disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,00

Capaian WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2021 yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022 telah menyamai capaian Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga memperoleh opini WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerahnya pada tahun yang sama. Capaian ini juga telah sama dengan capaian tingkat nasional. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 nomor: 50.a/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan perjalanan panjang dalam membangun tata kelola pengelolaan keuangan daerah



yang baik. Capaian kinerja atas Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel yang telah berjalan sesuai dengan tracknya tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Komitmen dan integritas pimpinan dan pengelola kegiatan
2. Sistem Pengendalian Internal yang memadai
3. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
5. Peningkatan kualitas laporan keuangan
6. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan pengelolaan barang milik Daerah
8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan dan kinerja, dan
9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menurut BPK masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai dampak kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Pengamanan administrasi atas asset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya tertib.
2. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib.
3. Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada beberapa perangkat daerah yang belum tertib
4. Masih terdapat kekurangan volume dalam pekerjaan.

Sebagai tindaklanjut atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh BPK diatas, beberapa upaya pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi semakin akuntabel sebagaimana rekomendasi BPK adalah sebagai berikut :



Tabel 3.16

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel**

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Pengamanan administrasi atas asset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya tertib	Mengoptimalkan pencatatan, pengamanan dan inventarisasi BMD yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan
Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada beberapa perangkat daerah yang belum tertib	Melakukan pengawasan atas perbaikan permasalahan-permasalahan penatausahaan aset perangkat daerah
Masih terdapat kekurangan volume dalam hasil pekerjaan	Melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel ini didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Realisasi keuangan atas pelaksanaan program-program di atas untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada tahun 2022 adalah sebesar 96,75 persen. Berdasarkan realisasi keuangan tersebut dan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 persen, maka tingkat efektivitas pelaksanaan program-program dimaksud untuk mencapai sasaran pada tahun 2022 mencapai 103,36 persen atau sangat efektif. Rincian tingkat efektivitas program dalam mencapai Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.17

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)**

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	96,75	100,00	103,36	Sangat Efektif

Selanjutnya ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,75 persen, tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada tahun 2022 mencapai 3,25 persen sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.18

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)**

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	152.585.132.035,00	147.622.503.233,00	96,75	100,00	3,25

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

3.1.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat

Sejalan dengan Visi Bangka Setara, Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya membangun tata pemerintahan yang baik, dengan memberikan aksentuasi pada penguatan kinerja pembangunan dan penataan pelayanan publik.

Hal ini dirasa sangat mendesak karena kedua faktor ini bukan hanya berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada daya saing investasi. Berbagai studi di banyak negara menunjukkan daerah-daerah yang memiliki kinerja, prosedur, mekanisme dan



pelayanan publik yang baik selalu menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk karena dinilai memiliki “resiko investasi rendah”.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud berikut target dan capaiannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022

(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	85,27	102,73	MT
Rata-rata Capaian					102,73	MT

Secara detail, tabel di atas memberikan informasi bahwa terjadi perubahan kinerja yang sangat signifikan dalam pencapaian sasaran. Justifikasinya adalah peningkatan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 83,00 di tahun 2022, ternyata terealisasi hingga mencapai 85,27 dengan persentase capaian sebesar 102,73 persen sehingga termasuk kategori Melebihi Target (MT). Kenaikan tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka kepada masyarakat sudah termasuk klasifikasi sangat baik.

Sejatinya, pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan berjalan menuju pada peningkatan derajat pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah mulai dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang sudah disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dalam rangka menjamin pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Indikator peningkatan IKM diukur berdasarkan nilai IKM Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang diperoleh dari hasil survey terhadap 1600 Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangka (8 Kecamatan, 62 desa dan 19 kelurahan) terhadap kinerja program seluruh Perangkat Daerah yang ada di



dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan metode *slovin* dengan *margin of error* 2,44 persen.

Berdasarkan hasil survey persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemkab Bangka tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2023, didapat nilai IKM Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mencapai 85,27. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mutu kinerja Pemkab Bangka berada dalam kategori A (81,25 – 100,00) atau Sangat Baik, dengan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka merasa puas terhadap kinerja Pemkab Bangka dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*), Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan dengan kinerja terbaik dengan nilai rata-rata mencapai 94,93, kemudian Urusan Kesehatan di peringkat kedua dengan rata-rata mencapai 89,33 serta Urusan Pendidikan di peringkat ketiga dengan rata-rata mencapai 87,71.

Selanjutnya perbandingan antara capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,47	80,13	85,27	85,40	99,85

Sumber: Hasil Penghitungan IKM Pemkab Bangka Tahun 2021, 2022 dan 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap realisasi indikator sasaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi IKM tahun 2020 berada pada 78,47, kemudian mengalami



peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 menjadi 80,13, selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 85,27. Realisasi pada tahun 2022 ini hampir memenuhi target akhir jangka menengah yang sebesar 85,40 dengan persentase kinerja sebesar 93,83 persen.

Namun, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga sasaran tersebut secara berkesinambungan akan terus diupayakan dan ditingkatkan.

Grafik 3.2
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022



Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka telah berjalan dengan dukungan sumber daya aparatur yang kompeten serta struktur organisasi perangkat daerah yang efisien sehingga pemenuhan kebutuhan publik dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia serta tepat sasaran;
2. Pengembangan dan penerapan inovasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangka sehingga berdampak positif terhadap kualitas kinerja pelayanan publik;
3. Dukungan sistem pelayanan dan sarana prasarana pendukung.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal,



Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Sekretariat Daerah yaitu:

1. Program Pencatatan Sipil;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
7. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya diuraikan beberapa permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel 3.21

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah pemberi pelayanan	- Meningkatkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik prosedur maupun persyaratan pelayanan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.22

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022

(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	95,50	102,73	107,57	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang diukur berdasarkan satu indikator sebesar 102,73 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 95,50 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 107,57 persen atau sangat efektif.

Sementara efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya anggaran dalam menunjang pencapaian sasaran digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022

(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	87.246.501.870,00	83.321.752.564,00	95,50	102,73	7,23

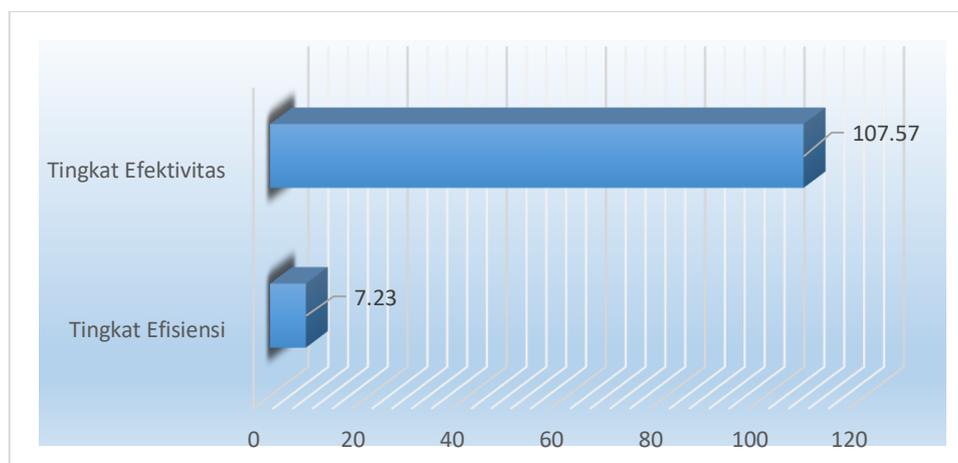
Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pagu belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp.87.246.501.870,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp.83.321.752.564,00 atau sebesar 95,50 persen, sementara capaian kinerja sasaran sebesar 102,73 persen, sehingga terdapat efisiensi sebesar 7,23 persen.



Grafik 3.3

**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat)**



3.1.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pendidikan di suatu negara memiliki peran penting untuk pembangunan bangsa, Pendidikan masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah disetiap jenjang pendidikan. Indikator ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan sistem pendidikan yang diselenggarakan. Indikator ini juga dapat dijadikan tolak ukur yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan. Indikator ini juga digunakan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2022, dilakukan pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang tertera pada tabel berikut:



Tabel 3.24
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)

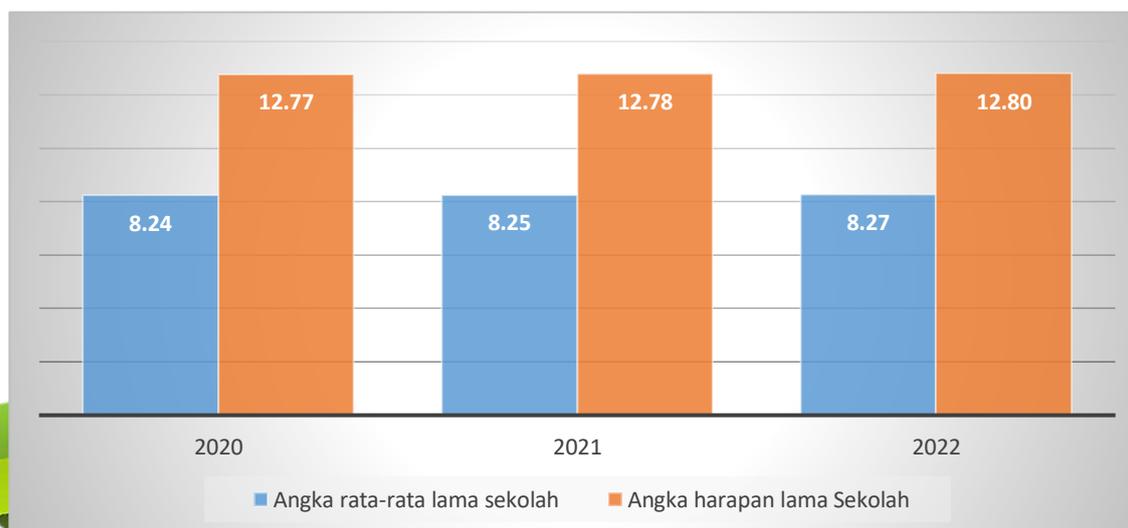
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,26	8,27	100,12	MT
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,79	12,80	100,08	MT
Rata- Rata Capaian					100,10	MT

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian sasaran adalah 100,10 persen yang berarti kinerja sasaran termasuk kategori Melebihi Target.

Tabel di atas memberikan informasi kinerja yang sangat komprehensif dalam mendukung pencapaian sasaran. Pertama, terlihat dari indikator sasaran Angka Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 8,26 tahun pada tahun 2022, ternyata terealisasi 8,27 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,12 persen yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam kategori Melebihi Target. Selanjutnya indikator Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 12,79 tahun pada tahun 2022, terealisasi 12,80 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,08 persen. Ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.4
Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022





Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka selama tahun 2020-2022 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,24 tahun, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8,25 tahun dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,27 tahun. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah tersebut dipengaruhi menurunnya angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat untuk mengikuti pendidikan penyeteraan (pendidikan paket A/B/C).

Angka harapan lama sekolah mengindikasikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Searah dengan peningkatan angka rata – rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka selama tahun 2020 – 2022 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jika pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah sebesar 12,77 tahun, maka pada tahun 2021 terkoreksi menjadi 12,78 tahun dan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 12,80 tahun pada tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3.25

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2022 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,27	8,89	93,02
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,80	12,88	99,37

Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap masing – masing indikator sasaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Realisasi indikator angka rata – rata lama sekolah kondisi pada tahun 2021 mencapai 8,25 tahun sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 8,27 tahun atau tumbuh sebesar 0,02 persen. Capaian sampai dengan tahun 2022 terhadap kondisi akhir RPJMD (2023) baru mencapai 93,02 persen atau kurang 6,08 persen dari target yang seharusnya dicapai. Angka harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) baru mencapai 99,37 persen atau kurang 0,63 persen, sehingga kedepan, untuk angka harapan lama sekolah dan angka rata – rata lama sekolah di setiap jenjang pendidikan, perlu dilakukan akselarasi kinerja agar pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka, berjalan dengan maksimal sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Standar Nasional

Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	12,18	12,80
Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,69	8,11	8,27

Sumber : BPS Kabupaten Bangka , 2023

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari dari angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang dalam kurun beberapa



tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja walaupun tidak signifikan karena belum tuntasnya pandemi covid-19. Angka rata – rata lama sekolah meningkat dari 8,25 tahun menjadi 8,27 tahun sedangkan angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,78 tahun menjadi 12,80 tahun. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional, angka rata – rata lama sekolah kabupaten masih di bawah standar nasional (8,69 tahun), linier dengan angka harapan lama sekolah yang juga masih dibawah standar nasional (12,69 tahun). Apabila ditelaah secara spesifik, rendahnya peningkatan angka rata – rata lama sekolah kabupaten menjadi pemicu terjadinya degradasi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan standar provinsi, kedua komposit IPM tersebut masih diatas standar provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di kabupaten lebih tinggi dibandingkan standar provinsi yang hanya sebesar 12,18 tahun untuk angka harapan lama sekolah dan sebesar 8,11 tahun untuk angka rata – rata lama sekolah.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penguatan program untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
2. Kemudahan akses menuju ke sarana pendidikan
3. Besaran pendapatan per kapita masyarakat
4. Penyesuaian kurikulum terutama pendidikan dasar sesuai standar.
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
6. Peningkatan kemampuan dan pemerataan tenaga pendidik

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 5 (lima) program pendukung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui beberapa OPD, program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan. (DINDIKPORA)
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (DINDIKPORA)
3. Program Pembinaan Perpustakaan. (DKP)
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (BADAN KESBANGPOL)

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat antara lain :



Tabel 3.27

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya angka rata – rata lama sekolah yang berkisar 8,27 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kembali program perburuan anak putus sekolah (Bunaktuslah) dalam rangka menekan angka putus sekolah sampai ke level desa dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> pendidikan yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; - Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin - Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyekolahkan semua tenaga pengajar ke jenjang pendidikan Strata I - Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II - Memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar. - Melakukan pengawasan secara berkala kepada tenaga tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum sekolah
<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan tenaga pengajar antar wilayah belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah. - Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil.
<ul style="list-style-type: none"> - Akses menuju sarana pendidikan jauh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan



Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	100,10	86,50	115,72	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 100,10 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 86,50 persen sehingga tingkat efektivitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 115,72 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	111.886.648.010,07	96.783.011.914,00	86,60	100,00	13,50

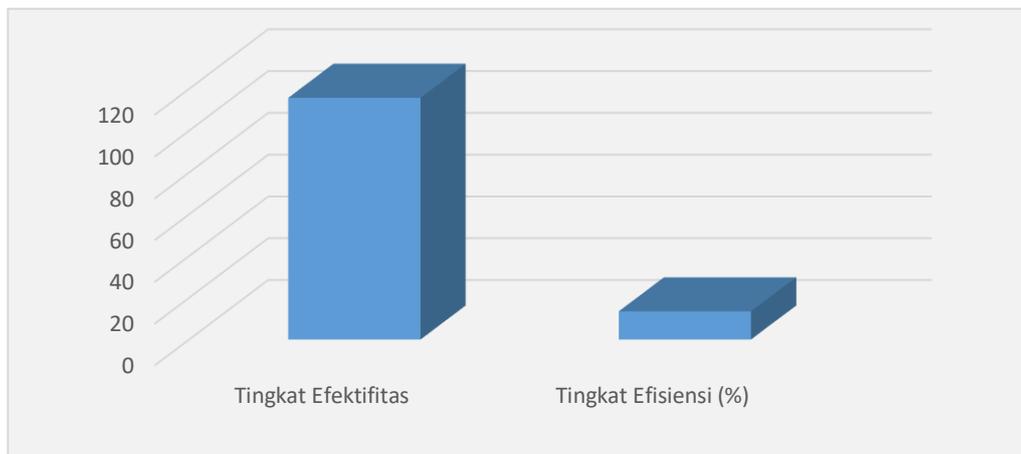
Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (unaudited), 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp.111.886.648.010,07,- dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp.96.783.011.914,00 atau sebesar 86,60 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 13,50 persen.



Grafik 3.5

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat)**



3.1.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial dan ekonomi. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, kualitas kesehatan masyarakat adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat serta harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.30

**Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)**

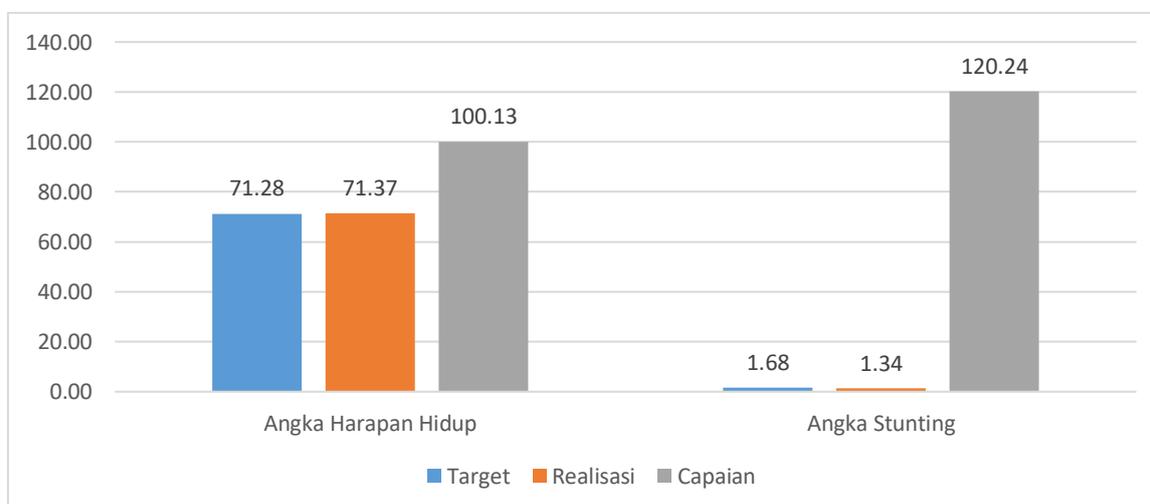
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,28	71,37	100,13	MT
2.	Angka Stunting	%	1,68	1,34	120,24	MT
Rata - Rata Capaian					110,18	MT

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 110,18 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” telah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” terdiri dari angka usia harapan hidup, penurunan angka stunting. Untuk indikator sasaran Angka Stunting adalah indikator yang menunjukkan semakin kecil angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik. Sedangkan untuk nilai indikator angka usia harapan hidup, semakin tinggi nilai indikator semakin baik.

Grafik 3.6

**Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)**





Untuk angka usia harapan hidup tahun 2022 mencapai usia 71,37 tahun. Angka ini telah mencapai target yang dibuat yaitu 71,28 tahun, dengan capaian sasaran sebesar 100,13 persen. Angka usia harapan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa status kesehatan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Banyak hal yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, antara lain faktor kesehatan, faktor ekonomi, lingkungan, budaya dan pendidikan. Dengan meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2022 menunjukkan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu meningkatnya usia harapan hidup juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Bangka mencapai 71,37 berarti bahwa setiap bayi yang lahir hidup di Kabupaten Bangka mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai usia 71,37 tahun.

Selanjutnya Angka Stunting pada tahun 2022 sebesar 1,34 persen. Angka ini lebih rendah dibanding target yang ditetapkan yaitu 1,68 persen, dengan capaian sasaran yang cukup tinggi yaitu 120,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk menurun. Gizi buruk dapat disebabkan oleh adanya penyakit infeksi atau penyakit penyerta pada balita serta pola asuh orangtua tentang pemberian makanan sehat yang kurang baik sehingga menyebabkan asupan makanan anak menjadi tidak seimbang. Dengan menurunnya persentase balita gizi buruk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa status gizi balita di Kabupaten Bangka semakin baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulan di 231 Posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka, ketersediaan panti rehabilitasi gizi/*Therapeutic Feeding Centre* di Puskesmas Bakam dan Puskesmas Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi, Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk, pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dana Bantuan Operasional Puskesmas dan Alokasi Dana



Desa di beberapa desa turut mendukung penyediaan logistik PMT balita. Puskesmas juga melakukan berbagai inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita. Fokus pemerintah pusat terhadap masalah gizi stunting juga meningkatkan kualitas pencatatan dan pemantauan status gizi balita melalui ePPGBM (Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik) yang dilanjutkan dengan intervensi dan pemantauan perbaikan status gizi.

Grafik 3.7
Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019 – 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)



Perkembangan indikator kinerja sasaran selama 2019-2022 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan trend capaian yang terus mengalami hasil yang cukup baik. Angka usia harapan hidup meningkat dari 70,99 tahun di tahun 2019 terus meningkat menjadi 71,06 di tahun 2020, pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,14 dan pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 71,37 . Angka Stunting menurun signifikan dari 5,05 persen di tahun 2019 terus menurun menjadi 1,96 di tahun 2020 dan 1,68 tahun 2021 terus menurun menjadi 1,34 pada tahun 2022.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2022 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,37	71,44	99,90
2.	Angka Stunting	%	1,68	1,34	0	98,66

Angka usia harapan hidup pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin baik sehingga pola hidup sehat semakin meningkat.

Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi kabupaten lokus intervensi penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2022 terdapat 11 desa lokus yaitu Neknang, Maras Senang, Riding Panjang, Saing, Mendo, Cengkong Abang, Air Duren, Penagan, Kota Kapur, Rukam dan Gunung Muda.

Dalam penginputan melalui e-PPGBM (Elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) terdapat 3 indikator pengukuran yaitu menurut BB/U (menentukan Sangat Kurang, Kurang, Berat Badan Normal dan Resiko Lebih), menurut TB/U (Menentukan Sangat Pendek, Pendek, Normal dan Tinggi) dan Menurut BB/TB (Menentukan Gizi Buruk, Gizi Kurang, Normal, Resiko Gizi Lebih, Gizi Lebih dan Obesitas).

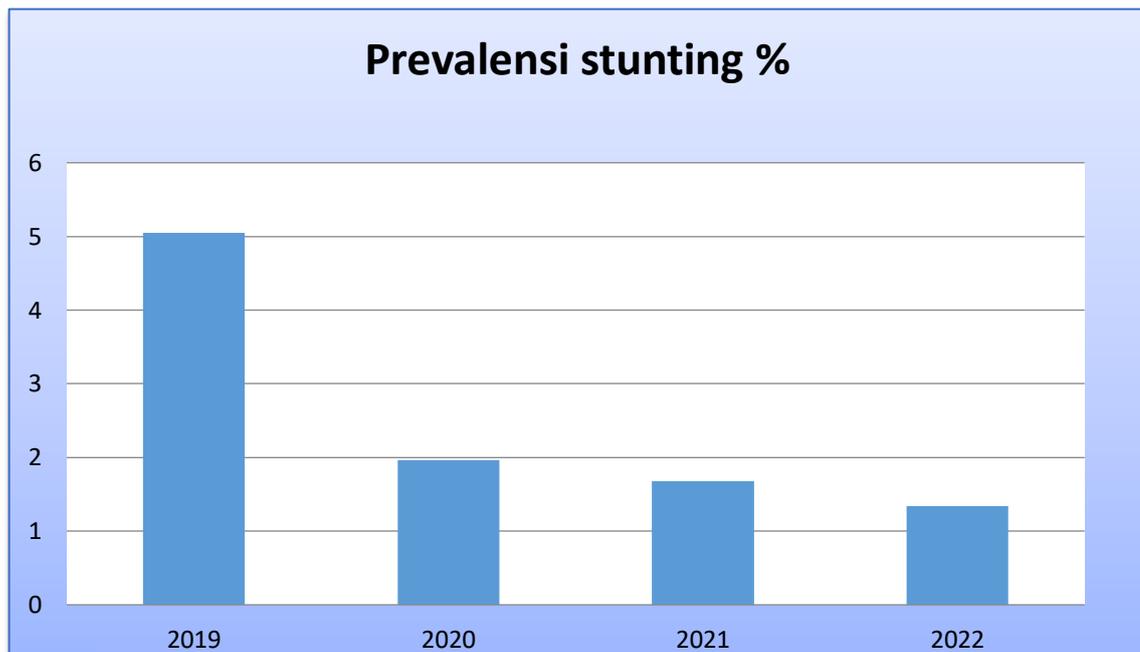
Hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi e-PPGBM yang bertujuan untuk memudahkan kerja Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam menentukan status gizi balita. Informasi status gizi tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan kategori status gizinya sehingga dapat ditentukan intervensi yang akan diberikan oleh tenaga pelaksana gizi (TPG) Puskesmas dalam hal ini status gizi yang di tentukan yaitu stunting (PB/U atau TB/U < -2 SD).



Prevalensi stunting balita Kabupaten Bangka dari Tahun 2019-2022 berdasarkan data e-PPBGM sebagai berikut: tahun 2019 sebesar 5,05%, turun menjadi 1,96% pada tahun 2020, menurun kembali 1,68% pada tahun 2021 dan 1,34% pada Agustus tahun 2022. Tren prevalensi stunting di Kabupaten Bangka berdasarkan aplikasi e-PPGBM tahun 2020 -2022 pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.8

Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

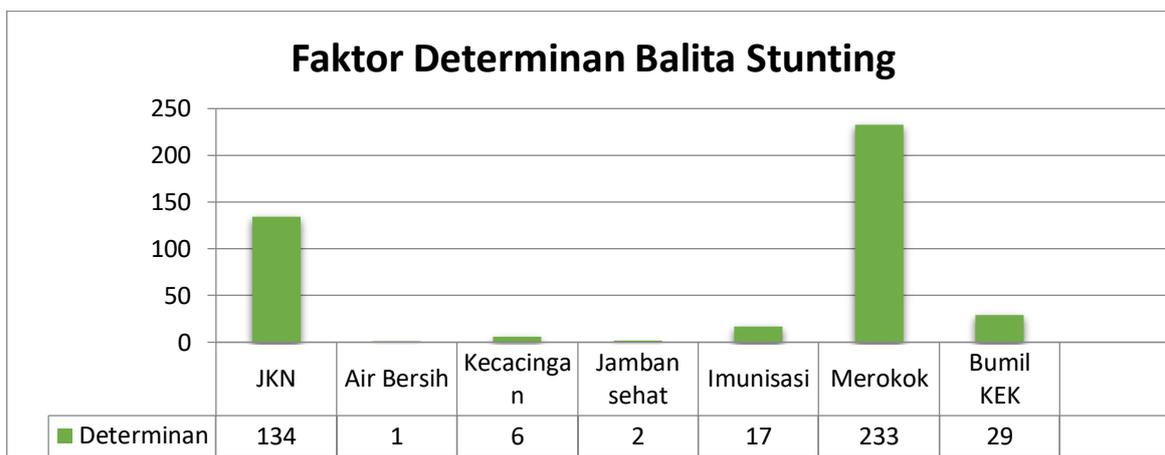


- Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah balita stunting sebanyak 551 dari 28.061 balita yang diukur atau sebesar 1.96% dengan persen entry 91,45%.
- Sedangkan bulan Agustus 2021, jumlah balita stunting sebanyak 452 balita dari 26.915 balita yang diukur atau sebesar 1.68% dengan persen entry 94.5%
- Pada Agustus 2022, jumlah balita stunting sebanyak 329 balita dari 24.553 balita diukur (1.34%) dengan persen entry sebesar 93.2%
- Dari Tahun 2020- 2022 adanya Tren Penurunan prevalensi stunting pada Balita sebesar 0.62% disertai dengan peningkatan persen entry sebesar 19.9%



Faktor determinan yang memerlukan perhatian pada anak stunting adalah masih tingginya anggota keluarga yang merokok, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.9
Rekap Faktor Determinan Balita Stunting di Kabupaten Bangka
Menurut Aplikasi e-PPGBM (Agustus 2022)



Dari rekap Riwayat Tindakan pada balita stunting yang dapat dilihat pada e-PPGBM terdapat faktor determinan sebagai berikut :

- a) 134 balita tidak memiliki Jaminan Kesehatan
- b) 1 balita tidak punya air bersih
- c) 6 balita pernah mengalami kecacingan
- d) 2 balita tidak mempunyai jamban sehat
- e) 17 balita belum Imunisasi lengkap
- f) 233 Anggota rumah tangga balita masih merokok
- g) 29 ibu balita sewaktu hamil KEK

Dari semua faktor determinan yang perlu perhatian adalah anggota keluarga yang merokok dan balita yang belum mempunyai JKN atau BPJS. Faktor determinan yang paling tinggi adalah adanya anggota rumah tangga balita merokok pada 233 balita stunting. Selain itu faktor determinan yang tertinggi kedua adalah tidak punya jaminan kesehatan (134). Masih adanya anggota rumah tangga merokok akan berisiko terhadap tingginya angka penyakit pernafasan pada balita sehingga akan memperberat terjadinya masalah gizi. Tingginya balita yang belum mempunyai jaminan kesehatan karena sebagian penduduk belum



mampu membayar atau menunggak pembayaran sehingga tidak mendaftarkan balita pada JKN atau keanggotaan PBI kadang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil entry data status gizi melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 ada 11 desa lokus stunting, namun berdasarkan persentase 11 desa sudah dibawah 20% (batas kronis). untuk desa stunting kronis $\geq 20\%$ = 0 desa, sedangkan prevalensi balita stunting hasil e PPGM pada bulan Agustus 2022 yang diunduh pada bulan Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 1,34%. Secara Umum Kabupaten Bangka termasuk kategori aman berdasarkan standar WHO yaitu prevalensi stunting balita dibawah 20%.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam RPJMD maka dapat dilihat bahwa capaian sasaran kedua indikator sasaran sudah menunjukkan tren meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan setiap tahun terjadi perbaikan yang signifikan terhadap kinerja program kesehatan Pemerintah kabupaten Bangka. Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari kontribusi APBD dalam mendukung capaian kinerja indikator-indikator sasaran.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang memiliki angka stunting tinggi yang penanganannya bersifat kolektif dari berbagai kalangan baik dari penyediaan pangan, pengetahuan tentang konsumsi pangan, layanan kesehatan maupun sarana sanitasi sehingga permasalahan stunting dapat dituntaskan dengan baik.
2. Pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan gizi balitas secara rutin setiap bulan di 231 Posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka.
3. Tersedianya panti rehabilitasi gizi/Therapeutic Fedding Center di Puskesmas Bakam dan Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi.
4. Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk.
5. Pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk.



6. Kegiatan inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita.
7. Layanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang siap melayani kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat yang terintegrasi dalam sistem aplikasi di android. Masyarakat hanya perlu menginstal aplikasi tersebut ke android, sehingga bila terjadi peristiwa kegawatdaruratan masyarakat hanya perlu mengakses aplikasi tersebut dan bantuan gawat darurat segera datang;
8. Kehamilan yang beresiko tinggi dapat dideteksi sedini mungkin dan dipantau melalui program aplikasi “Si Resti Cikar”. Pelaksanaannya dilakukan oleh kader atau masyarakat yang mau dan mampu untuk melakukan pemantauan.
9. Semakin meningkatnya koordinasi antara bidan dan SPOG dalam menangani kehamilan beresiko tinggi;
10. Program Anak Bangka Sehat Cerdas adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Bangka yang terpadu / terintegrasi baik secara lintas program maupun lintas sektor dalam penerapannya terjadi di setiap siklus kehidupan secara seimbang dengan menggugah kesadaran tentang hak dan kewajiban seteiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dala memberi / menerima layanan kesehatan untuk menyongsong kehidupan yang berkualitas;
11. Akses ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya semakin mudah;
12. Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pelayanan kesehatan.
13. Ditetapkannya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka.
14. Pembinaan Pelayanan kesehatan peduli Remaja (PKPR) dan PKRT (perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dalam mempersiapkan reproduksinya.
15. Pelaksanaan Program pelayanan Kesehatan antara lain: Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi



- Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Dukungan alokasi dana desa yang diperuntukan mengatasi masalah kesehatan dalam wilayah desa masing-masing.
 17. Penanganan anak gizi buruk di Puskesmas Rawat inap sudah ada dibentuk Tim Asuhan gizi yang sudah mendapat Pelatihan tata Laksana
 18. Dalam rangka menurunkan AKI di Kabupaten Bangka, Dinas Kesehatan perlu melakukan penguatan dalam melaksanakan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas Poned dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas, serta pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA dan Temenin.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 6 (Enam) program prioritas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terutama pada program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (DINDIKPORA)
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINKES)
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DINKES)
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (DINKES)
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DINPANPERTAN)

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat antara lain :



Tabel 3.32

**Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) 	<ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi konsumsi pangan lokal melalui gerakan penganekaragaman pangan berbasis B2SA - sosialisasi gerakan SENJA SELAPIS RATA KASIH JUJUR SABILI (senin Jagung, Selasa Pisang, Rabu Talas Kamis Singkong, Jumlat Bijur sabtu Gemili)
<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku kunci rumah tangga 1000 HPK yang bermasalah, faktor determinan yang perlu perhatian adalah anggota keluarga yang merokok dan balita yang belum mempunyai JKN atau BPJS. 	<ul style="list-style-type: none"> - memberi kan penyuluhan PHBS dengan pendekatan komunikasi antar pribadi (KAP) oleh petugas promkes kepada rumah tangga tentang bahaya merokok dan dampak terpapar merokok akibat orangtua atau anggota keluarga ada yang merokok di rumahtangga. - Pendekatan juga dapat dilakukan melalui kunjungan rumah terintegrasi dengan PIS-PK memberikan edukasi dan konseling dampak stunting yang disebabkan resiko terpapar asap merokok dan memberi sanksi bagi anggota keluarga yang merokok yang mempunyai balita stunting dengan tidak mendapat bantuan PBI. - Membantu keluarga dan bayi yang belum mendapat JKN dan PBI, mendata peserta PBI dengan tepat sasaran
<ul style="list-style-type: none"> - belum semua posyandu aktif 	<ul style="list-style-type: none"> - seluruh OPD terkait ikut meningkatkan pemberdayaa masyarakat untuk berpartisipasi di Posyandu



<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikitnya tenaga kesehatan yang terlatih yang ditempatkan di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pelaksanaan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas PONED dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas
<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka penyakit tidak menular 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka.
<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya layanan internet di daerah tertentu sehingga menghambat layanan SPGDT 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerjasama dengan aparaturnya desa setempat sehingga dapat menginformasikan melalui kantor desa maupun layanan publik pemerintahan terdekat
<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah armada ambulance dan tenaga medis yang mendukung layanan SPGDT 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas layanan SPGDT
<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kehamilan yang tidak diinginkan sehingga beresiko pada kesehatan ibu dan bayi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan ibu hamil oleh petugas kesehatan dan kader dapat menekan angka kematian ibu melahirkan - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyediaan gizi keluarga untuk mengurangi angka balita gizi buruk - Menggiatkan peran ibu-ibu PKK di desa dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak - Pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA - Mengoptimalkan pelaksanaan program



	<p>Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pelayanan kelas ibu hamil dengan melibatkan peran serta suami maupun keluarga dalam peningkatan pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta sehingga cepat dan tanggap dalam pengambilan keputusan. - Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait dalam menundaan kehamilan bagi pasangan usia subur yang beresiko dan menderita penyakit, - Peningkatan penyediaan PONED dan PONEK selama 24 jam, tetap melakukan pelayanan Kesehatan ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir sesuai dengan pedoman covid 19 dengan memanfaatkan buku KIA, - Mengoptimalkan pemantauan ibu hamil resiko tinggi dengan melakukan kunjungan rumah (membuat kesepakatan terlebih dahulu) serta melaksanakan inovasi masa berkarya (manajemen sasaran berbasis kader wilayah)
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki sarana NICU untuk menangani kasus neonatal 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan sarana NICU pada fasilitas kesehatan rujukan
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga dokter spesialis 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan tenaga dokter spesialis



Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	92,72	130,65	140,91	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dapat dicapai sebesar 140,91 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	109.808.970.658,00	101.819.438.501,36	92,72	140,91	48,19

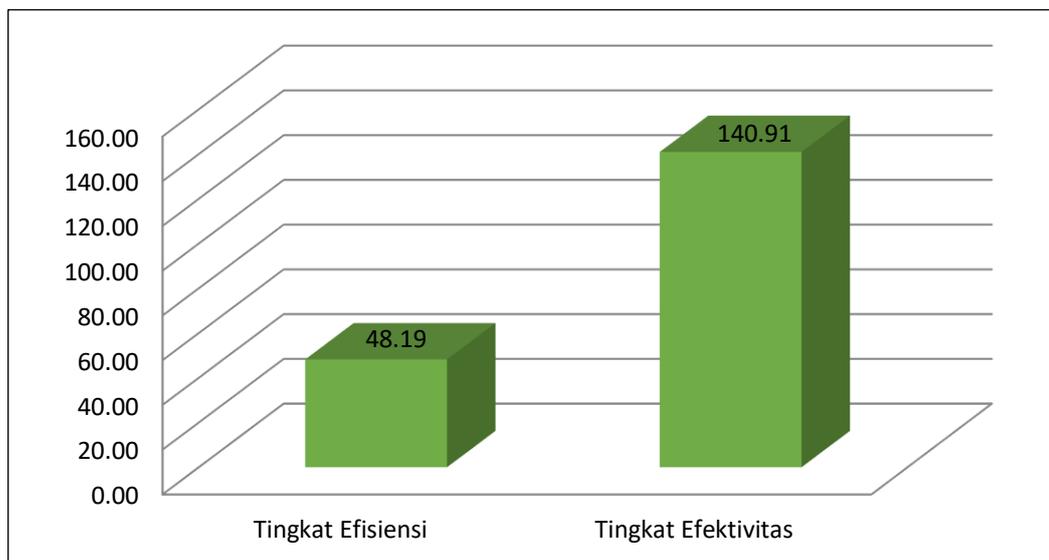
Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 109.808.970.658,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 101.819.436.501,36 atau sebesar 92,72 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 48,19 persen.



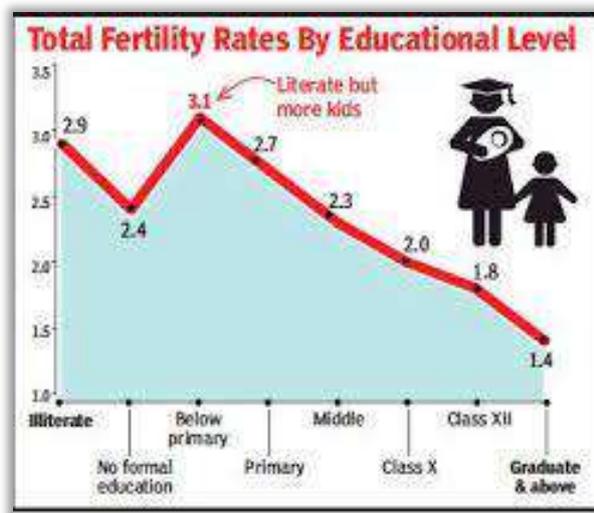
Grafik 3.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat)



3.1.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tidak serta merta hanya dapat dilihat dari seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Namun juga mencakup aspek yang lebih esensial seperti halnya ekonomi,



Pendidikan maupun Kesehatan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan



keluar. Selisih antara kematian dan kelahiran disebut pertumbuhan alamiah (*natural increase*).

Seiring dengan berkembangnya zaman, di Kabupaten Bangka sendiri pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan masalah sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, seperti kebutuhan sandang dan pangan serta meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas. Kepadatan penduduk tersebut tentu saja menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga harus ada upaya yang dipilih atau diprogramkan oleh pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut antara lain melalui program keluarga berencana. Selain itu, usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk melalui sistem bidang kesehatan adalah pembangunan keluarga sejahtera yaitu meningkatkan jumlah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,35	2,33	100,85	MT
Rata-rata Capaian					100,85	MT

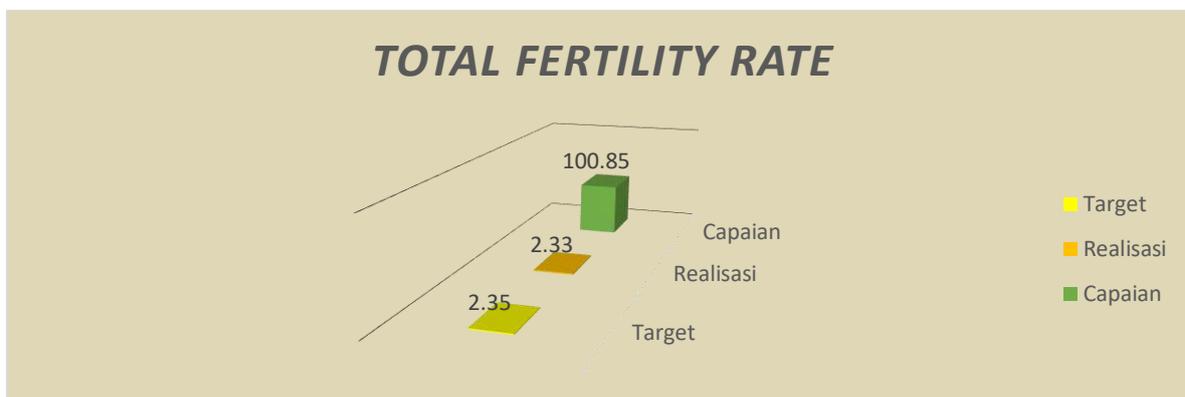
Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,85 persen yang berdasarkan derajat kinerja



dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “terkendalnya laju pertumbuhan penduduk” telah melebihi target.

Grafik 3.11

**Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)**



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran adalah *Total Fertility Rate*. Indikator sasaran *Total Fertility Rate* adalah indikator yang menunjukkan semakin rendah angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik.

Total Fertility Rate tahun 2022 mencapai angka 2,33. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 2,35, dengan capaian sasaran sebesar 100,85 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.36

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,50	2,33	2,35	100,85

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran agar menekan laju pertumbuhan penduduk semakin baik, sebagai berikut :



1. Sinergitas antar lembaga, pemerintah/pemerintah, masyarakat dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, agar tingkat kelahiran pada wanita usia subur berhasil dengan baik dan tepat sasaran.
2. Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program PUS dalam ber-KB mendorong keberhasilan dalam program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
4. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat terhambat.

Beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain:

Tabel 3.37

**Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk**

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Masih rendahnya Tingkat Pendidikan .	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan - Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan - Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan.
- Masih rendahnya Pengeluaran per kapita perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan. - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan. - Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan



Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari 3 (Tiga) program prioritas beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Ada pun program prioritas yang dimaksud yakni :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
3. Program Pengendalian Penduduk

Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bangka diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.38

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)**

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	79,69	100,85	126,55	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 100,85 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)**

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	4.226.136.700	3.367.817.724	79,69	100,85	21,16

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2021 (unaudited)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp.4.226.136.700,- dengan realisasi belanja mencapai Rp.3.367.817.724,- atau sebesar 79,69%, sementara capaian kinerja sasaran mencapai 100,85 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 21,16 %.

Grafik 3.12

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk)**



3.1.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan distribusi sumberdaya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil. Pembangunan harus mengintervensi kebutuhan sumber daya tersebut sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda



memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,89	88,84	99,94	TT
2.	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	100	T
3.	Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori	Pratama	Pratama	100	T
Rata-rata Capaian					99,98	TT

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 99,98 persen hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda belum mencapai target.

a. Indeks Pembangunan Gender

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) 2030 dengan menetapkan prinsip *no one left behind*.



Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Untuk itu harus dipastikan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga. Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Kesetaraan gender salah satu faktor yang diperhatikan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Kesetaraan gender meliputi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, Pengarusutamaan Gender PUG diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara



adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.41

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,36	88,84	89,13	99,67
2.	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	Utama	50,00
3.	Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori	Pratama	Pratama	Madya	50,00

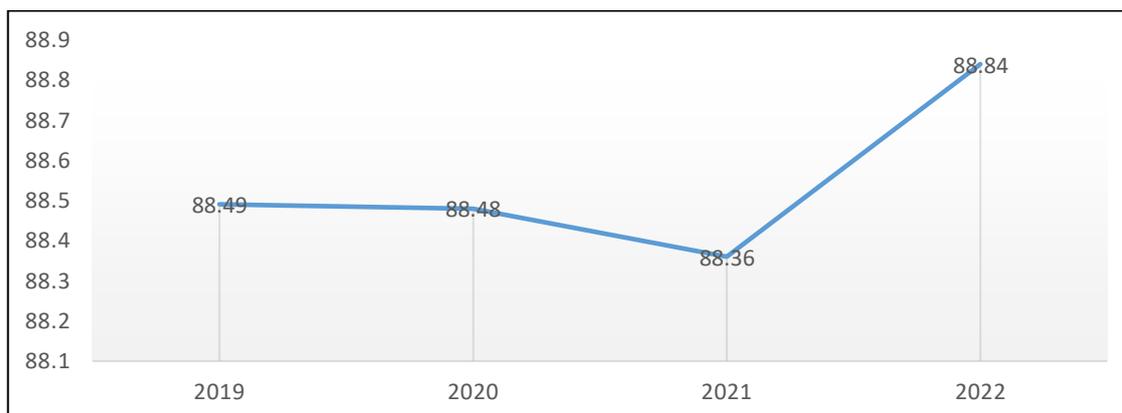
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang fluktuatif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan laki-laki dan perempuan.

Indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik. Secara detail, rincian perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 3.13

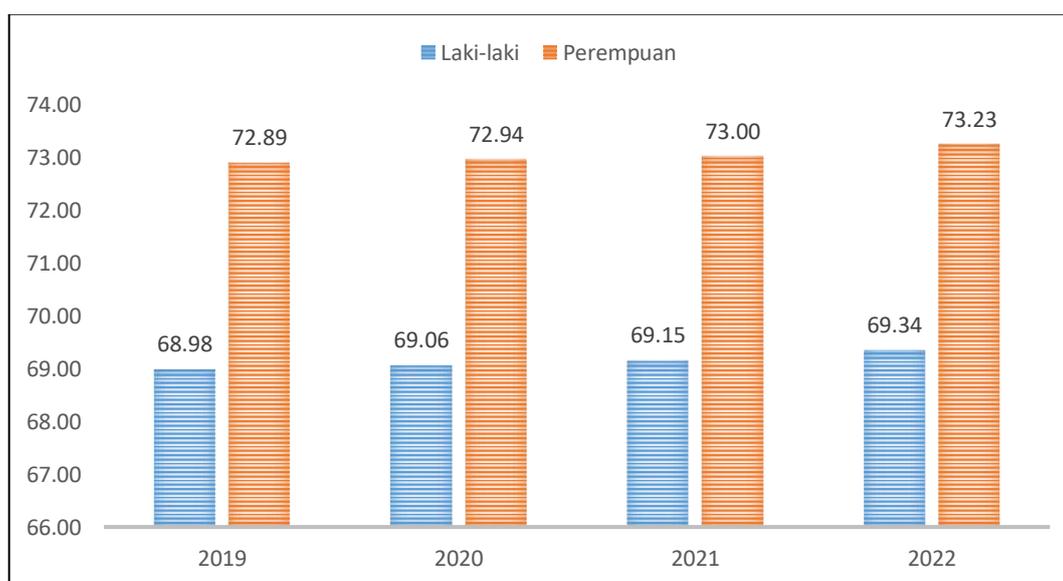
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022



Di bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya. Tahun 2022 usia harapan hidup perempuan sebesar 73,23 artinya setiap bayi perempuan yang lahir di tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73 tahun. Sedangkan untuk usia harapan hidup laki-laki pada tahun 2022 sebesar 69,34 yang artinya setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,34 tahun. Besaran angka Usia Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

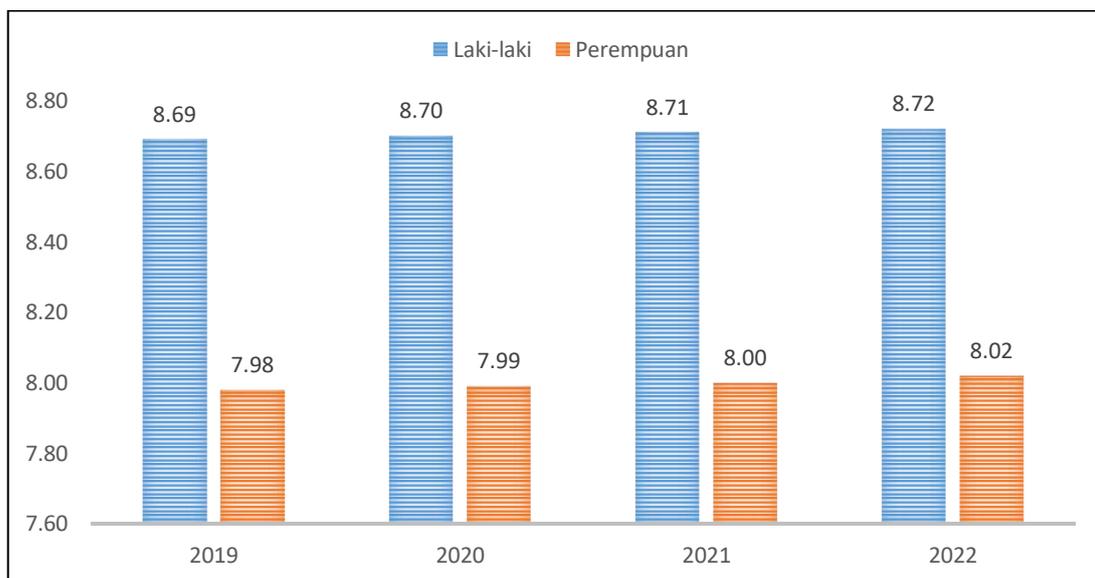




Di bidang pendidikan, capaian pembangunan menunjukkan kesenjangan terutama antara perempuan dan laki-laki pada pendidikan yang ditamatkan perempuan di tingkat dasar dan menengah. Rata-rata lama sekolah (RLS) di tahun 2022 untuk perempuan yaitu sebesar 8,02 dan rata rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,72. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang pendidikan diketahui bahwa pada tahun 2022 HLS perempuan sebesar 13,14 menunjukkan bahwa anak perempuan usia 7 tahun memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 13,14 tahun sedangkan HLS laki-laki sebesar 12,78 yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12,78 tahun atau setara diploma 1. Besaran angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.15

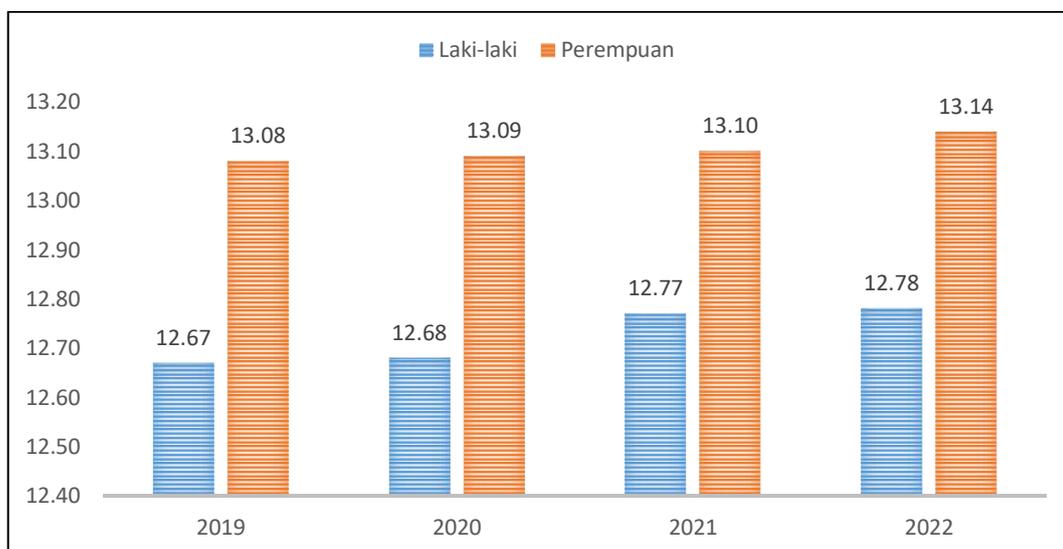
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022**





Grafik 3.16

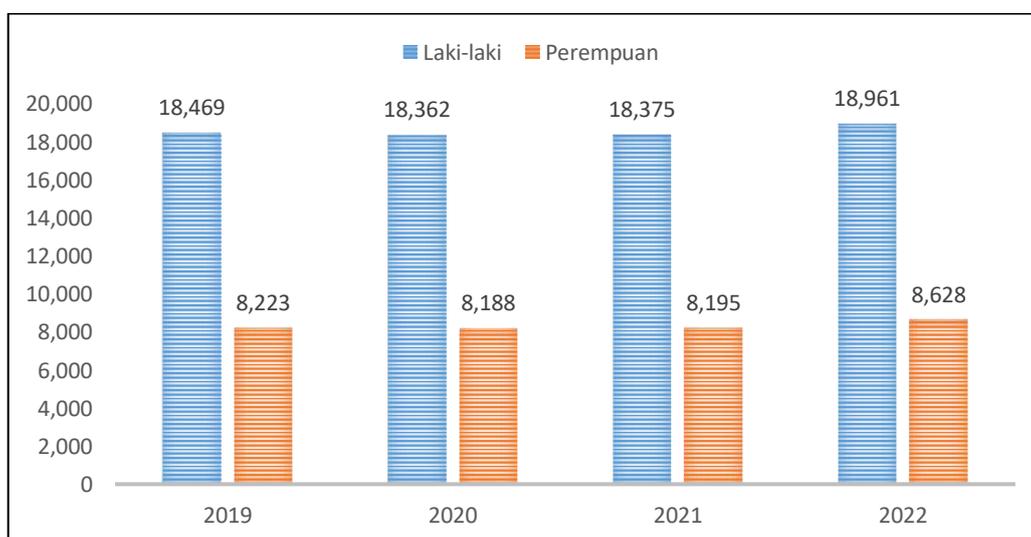
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022**



Indeks Pembangunan Gender juga diukur dari pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita perempuan yaitu sebesar Rp.8.628.000,- lebih rendah dibanding laki-laki yaitu sebesar Rp. 18.961.000,-. Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi perempuan dalam satu bulan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.17

**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022**





Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target capaian indikator kesetaraan gender semakin baik, sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka.
2. Kolaborasi Pentahelix antara pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga ke tingkat desa, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, agar pembangunan berbasis gender berhasil dengan baik dan tepat sasaran.
3. Pendekatan pembangunan yang mengakomodir pengarusutamaan gender terutama kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan
4. Memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses pembangunan
5. Keaktifan lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam menyajikan data dan melaksanakan tugas menangani dan pendampingan baik secara fisik, psikologi dan hukum dilakukan secara professional dan terpadu.

b. Status Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pembangunan kabupaten yang layak anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan di Kabupaten Bangka.



Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu bangsa, karena anak adalah aset pembangunan masa depan dan eksistensi bangsa. Pemenuhan dan perlindungan hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B UUD 1945). Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan pemenuhan hak anak dengan pengintegrasian aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak pada setiap pembangunan yang dilakukan. Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan pemenuhan hak anak dengan pengintegrasian aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak pada setiap pembangunan yang dilakukan. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan terhadap hak anak adalah menyediakan fasilitas, aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (*sustainable development*). Pemenuhan hak anak pun harus dilakukan ada 13 (Tiga belas) hak anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tidak semua anak beruntung mendapatkan perlindungan haknya, sebagian anak mendapat diskriminasi, kekerasan dan kesalahan pola asuh, dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Implikasi dari persoalan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyelenggarakan penghargaan



Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2018. Penghargaan ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong keluarga-keluarga, Masyarakat, Media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.

Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk melindungi dan memenuhi hak anak dalam dokumen pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator capaian kinerja Kabupaten/Kota layak Anak. Dokumen ini juga menunjukkan seberapa besar dukungan sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan Kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak. Sejak dicanangkannya pelaksanaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengikuti penghargaan. Kabupaten Bangka, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mengimplemetasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan KLA, dengan menggunakan pendekatan *Holistic*, *Integrative*, *Tematic*, dan *Spasial* dengan melibatkan Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Swasta, Akademisi, dan Media (Pentahelix), untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah KLA.

Status Kabupaten Layak Anak tahun 2022 mencapai status Madya. Status ini telah mencapai target tahun 2022 yang dibuat yaitu status Madya, dengan capaian sasaran sebesar 100,00 persen. Sedangkan target akhir RPJMD adalah status utama, sehingga capaian terhadap target RPJMD baru mencapai 50 persen. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target capaian indikator kabupaten layak anak adalah:



1. Kebijakan dalam pemenuhan dan pengembangan KLA dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi/pusat, masyarakat/komunitas, swasta, akademisi, media .
2. Pengembangan Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak.
3. Peran orang tua dan guru dalam pola asuh dan pola didik terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua dan guru dengan memberikan fasilitasi bimbingan dan pelatihan, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak anak di rumah dan disekolah.
4. Peningkatan Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down sebagai upaya pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya konsep layak anak di Kabupaten Bangka.
5. Sosialisasi dan edukasi terutama di kalangan pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

c. Status Kabupaten Layak Pemuda

Pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa patriotism.

Fokus pembangunan pemuda ditetapkan dalam 3 (tiga) hal. Ketiga hal itu meliputi penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi dan pencegahan perilaku berisiko pemuda termasuk pencegahan perilaku negatif (perundungan, intoleransi, HIV, NAPZA, seks bebas, dan sebagainya).

Potensi pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka memerlukan sesuatu pengintegrasian dalam pengelolaanya. Pemuda adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan harus dioptimalkan mengingat



jumlah penduduk yang tergolong usia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk yang kurang produktif. Setiap pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Karenanya diperlukan suatu sistem layanan pemuda yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan social, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk melindungi dan memenuhi hak pemuda dalam dokumen pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator capaian kinerja Kabupaten Layak Pemuda.

Aspek Kabupaten Layak Pemuda yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain:

1. Tersedianya regulasi kepemudaan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bangka Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kepemudaan
2. Tersedianya anggaran kepemudaan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.



3. Tersedianya program kepemudaan yang terdiri dari:
 - Penyadaran : Perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan NAPZA
 - Pemberdayaan : Partisipasi pemuda dalam pendidikan Formal dan Non Formal, Tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda
 - Pengembangan : Tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda dan tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan
4. Pelembagaan partisipasi pemuda. Pelembagaan Partisipasi pemuda terdiri dari organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi Kepelajaran.

Status Kabupaten Layak Pemuda Tahun 2022 mencapai status pratama. Status ini telah mencapai target yang dibuat yaitu status pratama, dengan capaian sasaran sebesar 100,00 persen. Pada Periode akhir RPJMD Status Kabupaten Layak Pemuda pada status Pratama. Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disingkat KLP adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target capaian indikator kabupaten layak pemuda adalah:

1. Kebijakan dalam pemenuhan dan pengembangan KLP dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi/pusat, masyarakat/komunitas, swasta, akademisi, media.
2. Potensi pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
3. Tersedianya Pelembagaan Kepemudaan di berbagai Aspek sehingga menjadi wadah bagi pengembangan dan pembangunan kepemudaan.



4. Kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* sebagai upaya pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Pemuda.

Beberapa permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.42

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1. Peningkatan Kesetaraan Gender	
- Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan masih rendah di banding laki-laki dan masih di bawah angka nasional	- Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan - Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan - Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan.
- Pengeluaran per kapita perempuan masih rendah dibanding laki-laki dan masih di bawah angka nasional	- Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan. - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan. - Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan
- Masih rendahnya fasilitas umum, yang berbasis gender	- Menyediakan fasilitas umum dengan sarana berbasis gender
- Masih rendahnya	- Mengoptimalkan peran serta Lembaga



partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender	Lembaga dalam	masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. Kualitas Anak		
- Persentase Kelembagaan optimal	Nilai Aspek belum	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak - Menyediakan data profil anak mulai dari tingkat desa sampai kabupaten - Mengoptimalkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak
- Persentase klaster kebebasan optimal	pemenuhan hak sipil dan kebebasan belum	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan SDM penyelenggara registrasi kelahiran yang telah mendapatkan pelatihan KHA; - Meningkatkan peranan forum anak dalam percepatan kepemilikan kutipan akte kelahiran; - Meningkatkan sinergitas LM, DU, dan MM; - Menetapkan peraturan/kebijakan tentang fasilitas (Informasi Layak Anak); - Penyediaan SDM penyelenggara ILA yang dilatih KHA; - Pengoptimalan partisipasi anak untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah - Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan



	informasi secara gratis.
- Belum optimalnya pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pencegahan perkawinan anak. - penguatan program PUSPAGA; - Optimalisasi SDM pada pusat layanan yang dilatih KHA. - Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.
- Belum optimalnya pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Sekolah Ramah Anak yang terstandarisasi - Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah. - Optimalisasi Pusat Kreativitas Anak yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas.
- Pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa / Kelurahan Layak Anak yang belum menyeluruh	<p>Penetapan Perdes Desa Layak Anak</p> <p>Peningkatan pembentuk Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan.</p> <p>Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>
3. Kualitas Pemuda	
- Belum optimalnya pemenuhan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Perda tentang Kepemudaan - Penyediaan data Profil Kepemudaan
- Belum Optimalnya akses Pemuda dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; - Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya



	<p>dan agama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; - Optimalisasi program kewirausahaan kepemudaan dan pelibatan pemuda dalam sektor ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda masih menghadapi masalah <i>Character Building</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi program kepeloporan kepemudaan, Program perlindungan pemuda dan organisasi kepemudaan - Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, didukung oleh pelaksanaan oleh 5 (Lima) Program, yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A)
- b. Program Perlindungan Perempuan (DP2KBP3A)
- c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (DP2KBP3A)
- d. Program Perlindungan Khusus Anak (DP2KBP3A)
- e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (DINDIKPORA)

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda mencapai 82,00 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 99,98 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 121,93 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 3.43

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)**

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	82,00	99,98	121,93	Sangat Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda mencapai 17,98 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (99,98 persen) terhadap realisasi anggaran program (82,00 persen) sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 3.44

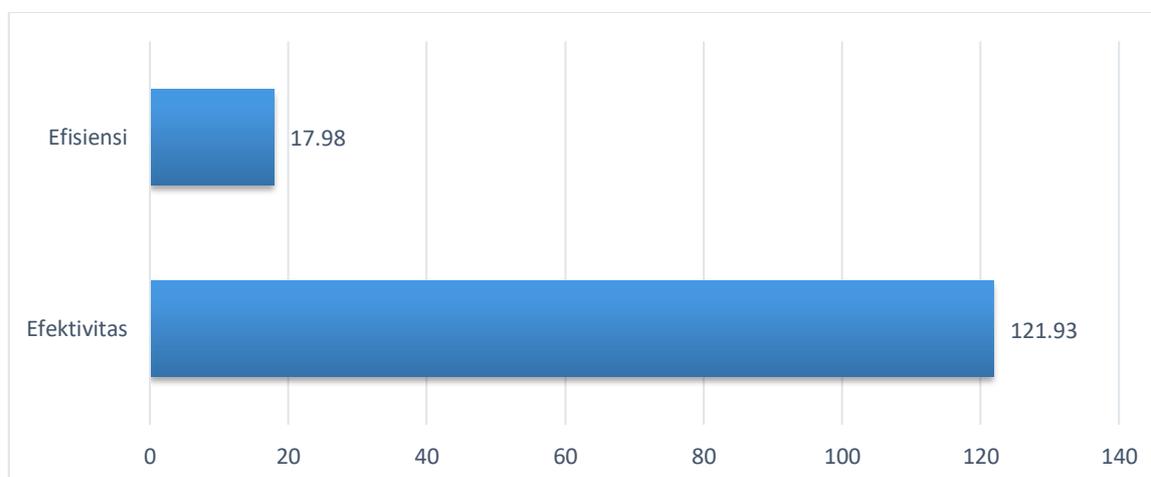
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)**

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	3.454.495.500	2.832.635.869	82,00	99,98	17,98

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Grafik 3.18

**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)**





3.1.8. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat

Peningkatan standar hidup layak masyarakat di Kabupaten Bangka dapat diukur dari pencapaian indikator sasaran Pengeluaran Perkapita Disesuaikan. Pengeluaran perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran perkapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan standar pertumbuhan ekonomi penduduk serta sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sekaligus pembandingan tingkat kemakmuran masyarakat.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat berikut target dan capaiannya dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.45

**Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah per Orang per Tahun	12.640	12.863	101,76	MT
Rata-rata Capaian					101,36	MT

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat dilihat dari indikator sasaran Pengeluaran Perkapita Disesuaikan sudah mencapai sasaran yang ditargetkan. Pengeluaran Perkapita ditargetkan sebesar 12.640 dan terealisasi sebesar 12,863 atau realisasi capaian sebesar 101,76 persen.

Perekonomian Kabupaten Bangka pada periode 2020-2022, cenderung mengalami stagnasi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang tentunya juga dialami oleh



Kabupaten Bangka, namun kondisi ini beranjak membaik di tahun 2022 seiring dengan berkurangnya kasus pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya pengeluaran perkapita dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.46

**Pengeluaran Perkapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022**

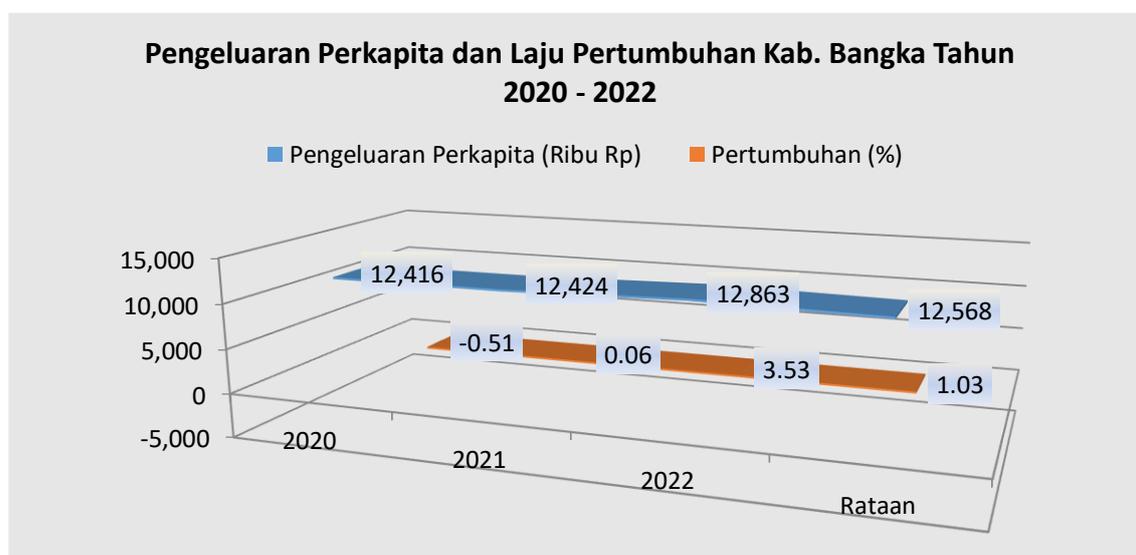
Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	12.416	-0,51
2021	12.424	0,06
2022	12.863	3,53
Rataan	12.568	1,03

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2022

Pengeluaran perkapita Kabupaten Bangka tahun 2020-2022 cenderung mengalami stagnasi dari 12.416 juta rupiah dengan laju pertumbuhan -0,51 persen pada tahun 2020 menjadi 12.424 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 0,06 persen di tahun 2021, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 12.863 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 3,53 persen pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan rata-rata 1,03 persen.

Grafik 3.19

**Pengeluaran Perkapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022**





Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah per Orang per Tahun	12.424	12.863	12.859	100,03

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan terhadap indikator sasaran Pengeluaran Perkapita dalam periode 2021-2022. Pada tahun 2021 capaian pengeluaran perkapita sebesar 12.424 juta rupiah dan menjadi 12.863 juta rupiah pada tahun 2022. Sementara dilihat dari target tingkat capaian pada tahun 2022 terhadap jangka menengah telah mencapai 100,03.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal meningkatkan Pengeluaran Perkapita masyarakat, antara lain :

Tabel 3.48

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Masih dihadapkan pada situasi pemulihan akibat Pandemi covid 19, kenaikan harga-harga komoditas yang mendorong terjadinya inflasi tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan Untuk UMKM - Revitalisasi UMKM Dan Pariwisata - Pelatihan Enterpreunership Terintegrasi Bursa Kerja - APBD Berbasis Padat Karya - Fasilitasi Kemudahan Investasi - Integrasi Dan Transformasi Bantuan Sosial



Pada tahun 2022, perekonomian dapat dikatakan belum stabil, hal ini tentunya imbas dari pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir serta terjadinya inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi sering kali disebabkan oleh krisis global, kesalahan manajemen, kurangnya produksi, dan perubahan sistem ekonomi. Inflasi salah satu indikator perekonomian yang penting, laju perubahannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan masalah makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Dengan inflasi yang tinggi akan menyebabkan kecenderungan peningkatan terhadap harga barang dan jasa umum secara terus menerus selama periode tertentu. Kemudian peningkatan tersebut akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil langkah strategis melalui inovasi “Mikro Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Industri Kecil dan Menengah. Inovasi ini telah terbukti mampu mendorong keberlangsungan UMKM dan IKM untuk meningkatkan produktivitasnya dengan melakukan transformasi UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi perijinan dan pemasaran, sertifikasi laik higiene dan sertifikat halal, kemitraan strategis, serta peningkatan *value added* dan *value chain*. Pemkab Bangka juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pelatihan kewirausahaan mandiri Industri Kecil Menengah (IKM).

Banyak hal yang dilakukan Pemkab Bangka dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, karena diharapkan dengan membaiknya ekonomi masyarakat maka daya beli masyarakat juga ikut meningkat dan tentunya berpengaruh pada besaran pengeluaran masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat didukung oleh pelaksanaan 3 (Tiga) Program, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial (DINSOS)
2. Program Rehabilitasi Sosial (DINSOS)
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DINSOS)

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas Program-Program yang dilaksanakan untuk mencapai



sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat mencapai 95,35 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 101,76 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 106,73 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.49
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	95,35	101,76	106,73	Sangat Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat mencapai 6,41 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (101,76 persen) terhadap realisasi anggaran program (95,35 persen) sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 3.50
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)

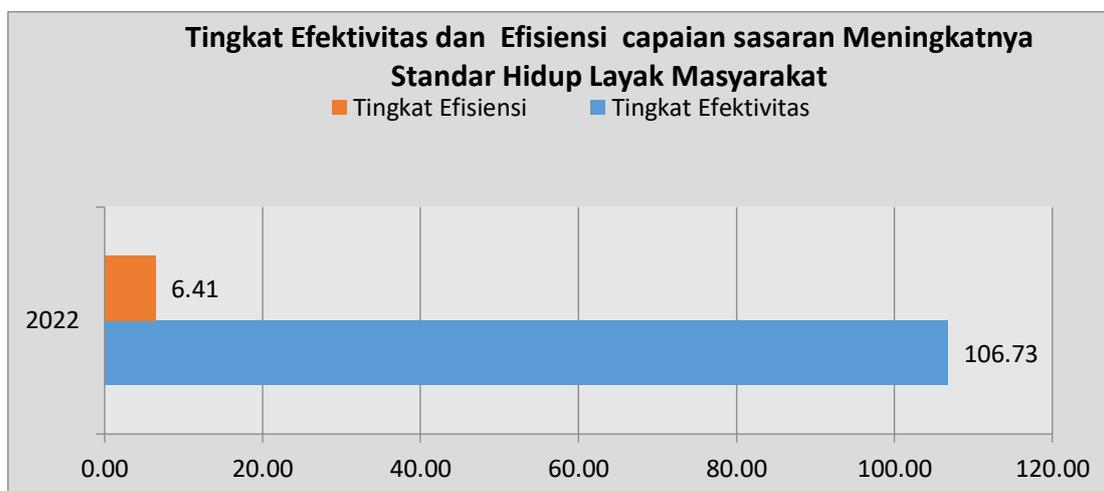
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	7.136.086.245,00	6.804.199.000,00	95,35	101,76	6,41

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2021 (unaudited)



Grafik 3.20

**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat)**



3.1.9 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing global. Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah, serta memperkuat daya saing antar daerah. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bangka sendiri sebenarnya juga membuka



lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Kabupaten Bangka. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Kabupaten Bangka pastinya sangat membutuhkan pengelolaan dan keterlibatan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Kabupaten Bangka itu sendiri.

Dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 mencantumkan infrastruktur menjadi salah satu misi yakni “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah”. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah *concern* terhadap pembangunan infrastruktur baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Kemudian dari misi tersebut di terjemahkan ke dalam sasaran pembangunan yakni fokus pada akses (pemerataan) dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur. Sehingga tidak hanya merata akan tetapi pembangunan juga memiliki kualitas yang baik.

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur diukur dengan dua indikator kinerja yang mencerminkan akses dan kualitas infrastruktur yaitu Indeks Kualitas Infrastruktur dan Indeks Pemerataan Infrastruktur. Indeks Pemerataan Infrastruktur diukur dari beberapa variabel yang memiliki peran yang sama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur, di antara variabel-nya seberapa luas jangkauan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, telekomunikasi dan listrik yang ada di kabupaten Bangka dalam konteks akses ke masyarakat. Kemudian masing-masing capaian variabel menjadi komposit untuk perhitungan rata-rata geometrik Indeks Pemerataan Infrastruktur.

Gambar 3.1

Logical Framework Pemerataan Infrastruktur





Indeks Kualitas Infrastruktur diukur dari beberapa variabel yang juga memiliki peran yang sama dalam mewujudkan kualitas infrastruktur, yakni seberapa jauh kualitas infrastruktur yang dibangun sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh standar kualitas masing-masing variabel. Variabel kualitas infrastruktur jalan dinilai dari panjang jalan yang dibangun (kilo meter) dibandingkan dengan Kualitas Pembangunan Jalan dengan parameter Standar Nasional Indonesia bidang jalan. Untuk variabel selanjutnya yaitu kualitas pembangunan infrastruktur diukur dari ketersediaan jaringan internet 4G di wilayah Kabupaten Bangka dari beberapa *provider*. Kemudian kualitas air bersih dan sanitasi masyarakat yang sampai pada level aman sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR terkait SPM Bidang Sanitasi dan Air Bersih.

Gambar 3.2

Logical Framework Kualitas Infrastruktur



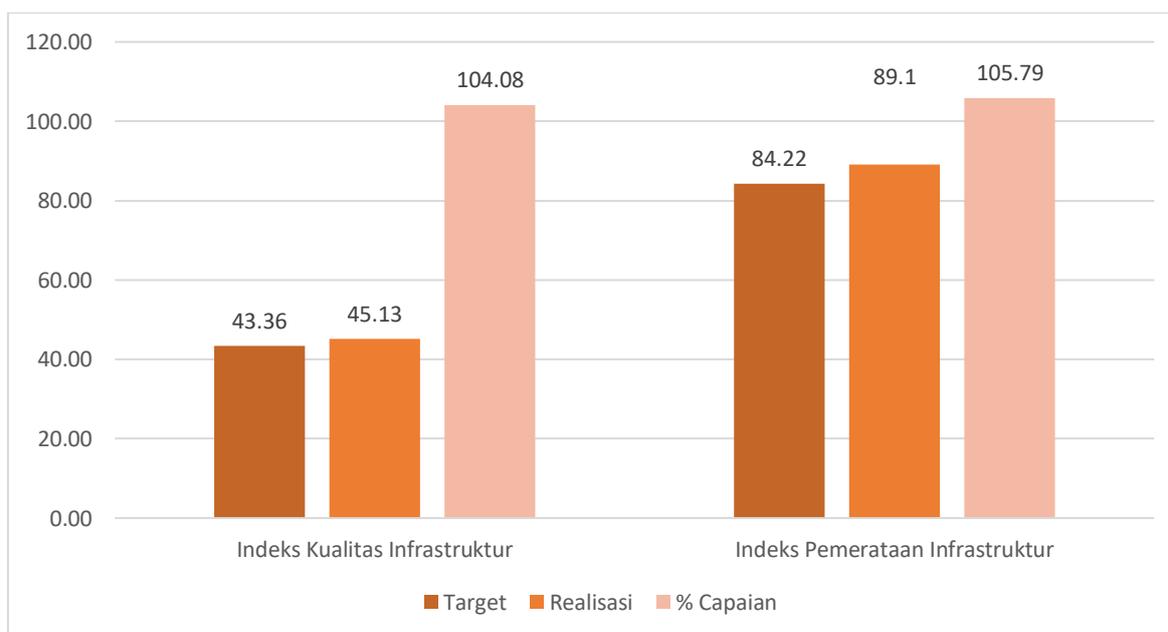
Setelah diketahui beberapa capaian variabel baik variabel pengukuran kualitas dan pemerataan infrastruktur kemudian dilakukan perhitungan rata-rata geometrik dari masing-masing komposit capaian variabel pendukung indikator. Untuk lebih jelasnya Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya pada tahun 2022 dijelaskan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:



Tabel 3.51
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Nilai	43,36	45,13	104,08	MT
2	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	84,22	89,10	105,79	MT
Rata- Rata Capaian					104,94	MT

Grafik 3.21
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2022
“Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur”



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, indikator sasaran yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur pada tahun 2022 memiliki rata-rata capaian kinerja 104,94 persen yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam kategori melampaui target. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bangka kuat di pemerataan akan tetapi masih lemah di kualitas. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur yang cukup rendah walaupun sudah mencapai target tersebut dikarenakan APBD tahun 2022 masih berfokus pada Infrastruktur kebinamargaan. Masalah yang lain adalah struktur APBD Kabupaten



Bangka yang masih sangat bergantung dari dana perimbangan serta kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal pada setiap urusan wajib yang terkait pelayanan dasar menjadikan pembiayaan kegiatan harus diprioritaskan dengan sangat seksama.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel dan grafik berikut:

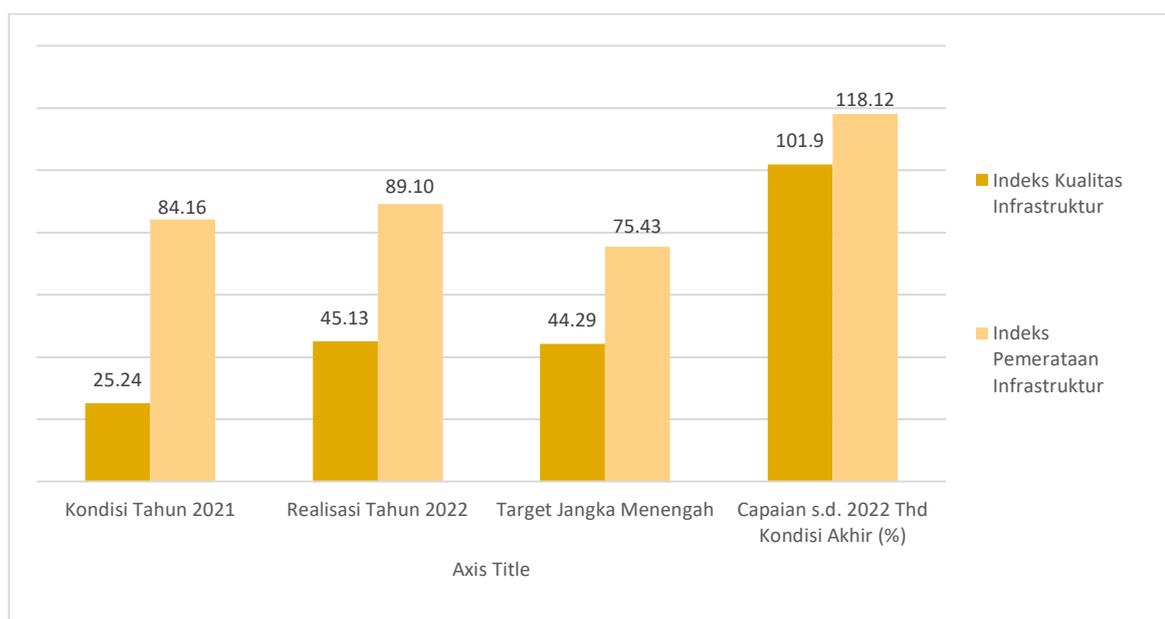
Tabel 3.52

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN S.D 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks skala 1-100	25,24	45,13	44,29	101,90
2	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks skala 1-100	84,16	89,10	75,43	118,12

Grafik 3.22

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD**





Jika perbandingan dilakukan terhadap kondisi tahun 2021, seluruh indikator baik aspek kualitas dan pemerataan mengalami peningkatan di tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks kualitas infrastruktur tercatat mengalami peningkatan angka sebesar 2,02 poin dari tahun sebelumnya dan untuk indeks pemerataan infrastruktur mengalami kenaikan angka sebesar 4,94 poin.

Perbandingan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa kinerja bidang infrastruktur sudah mencapai persentase yang sangat tinggi di aspek pemerataan yaitu berada diatas angka 100 persen. Pada tahun 2022, indeks pemerataan Infrastruktur berada pada angka 89,10 yang mana target akhir RPJMD hanya sebesar 75,43. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi dukungan pembangunan infrastruktur terhadap pemerataan pembangunan kebutuhan dasar di Kabupaten Bangka telah berjalan dengan baik. Seiring juga pada aspek kualitas infrastruktur, pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi masih belum bisa mendekati angka 50 masih berada di angka 45,13.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja indeks kualitas dan pemerataan infrastruktur dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang berkoordinasi dengan PT. Telkom.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terutama terkait penganggaran program dan kegiatan;
2. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama terkait penyediaan lahan;
3. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah terkait bersama tim pengadaan barang dan jasa/Unit Layanan Pengadaan agar pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Sinergitas prioritas, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan swasta dalam pendanaan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.



Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur didukung oleh pelaksanaan program-program berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (DPUPR);
2. Program Penataan Bangunan Gedung (DPUPR);
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (DPUPR);
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (DINPERKPP)
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (DPUPR);
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DPUPR);
7. Program Pengembangan Permukiman (DPUPR);
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (DPUPR);
9. Program Penyelenggaraan Jalan (DPUPR);
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (DPUPR);
11. Program Pengembangan Perumahan (DINPERKPP);
12. Program Kawasan Permukiman (DINPERKPP);
13. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP);
14. Program Pengelolaan Izin Lokasi (DINPERKPP);
15. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (DINPERKPP);
16. Program Penatagunaan Tanah (DINPERKPP);
17. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (DINHUB)

Berikut ini diuraikan beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur antara lain:

Tabel 3.53

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Permasalahan Utama Pencapaian sasaran infrastruktur ini terletak pada pembangunan hanya terfokus pada pemerataan akses	- Memetakan Kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit



MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
<p>tidak melihat dari aspek kualitas. Anggaran yang dialokasikan masih bersifat untuk memenuhi akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terlihat dari capaian yang timpang antara kinerja pemerataan infrastruktur yg sangat baik dibandingkan dengan capaian kualitas infrastruktur yg masih jauh dari yang di targetkan. Sebagai contoh dari variabel air minum dari sisi akses hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap air bersih akan tetapi air bersih tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk MCK, belum aman jika air yang diakses tersebut untuk diminum. Permasalahan sanitasi juga sama anggaran masih berfokus pada akses masyarakat terkait sanitasi, belum menyentuh pada akses sanitasi yang aman.</p>	<p>ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum refocusing telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memetakan Variabel Infrastruktur mana yang memiliki kelemahan dalam kualitas - Anggaran difokuskan untuk kegiatan yang mendongkrak nilai kualitas infrastruktur seperti pengadaan <i>septic tank</i> untuk masyarakat, pengolahan air minum, peningkatan kualitas jalan dan koordinasi dengan PT Telkom Indonesia terkait sebaran akses internet 4G di seluruh wilayah Kabupaten Bangka

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	94,95	104,94	110,52	Sangat Efektif

Sumber : Analisis, 2023



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dapat dicapai sebesar 104,94 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 94,95 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 110,52 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau sangat efektif. Hal ini disebabkan anggaran lebih difokuskan ke aspek pemerataan akses belum secara optimal menyentuh kepada kualitas pembangunan infrastruktur.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.55

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)**

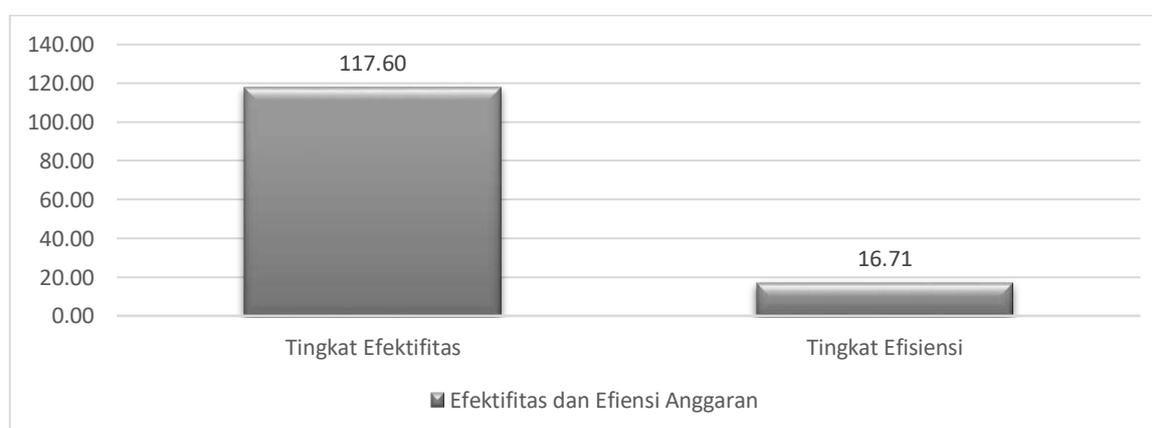
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	160.943.618.554,00	152.808.591.686,83	94,95	111,66	16,71

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 160.943.618.554,- dengan realisasi belanja mencapai Rp. 152.808.591.686,83 atau sebesar 94,95 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 16,71 persen.

Grafik 3.23

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)**





3.1.10 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan

Kabupaten Bangka menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian daerah pasca timah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep *sport tourism*, kearifan dan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta ekowisata.

Untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penambahan fasilitas dan kualitas kepariwisataan seperti akomodasi, transportasi, infrastruktur, layanan pelaku pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata daerah ini bukan hanya dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan, namun seberapa banyak wisatawan membelanjakan uangnya selama berwisata. Oleh



karena itu, sasaran dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka yaitu “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yaitu *Spending of Money*.

Spending of Money dihitung berdasarkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka dan membelanjakan uangnya selama berwisata di Kabupaten Bangka. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu wisatawan lokal yang berasal dari wilayah Pulau Bangka, wisatawan nusantara yaitu wisatawan dari luar Pulau Bangka tetapi berdomisili di Indonesia, dan wisatawan mancanegara yang berasal dari luar Indonesia. Perhitungan *Spending of Money* dibagi menjadi beberapa jenis pengeluaran wisatawan berdasar Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah yaitu (1) akomodasi; (2) makanan, minuman dan tembakau; (3) Angkutan Udara; (4) Transportasi selain udara; (5) BBM; (6) Sewa kendaraan; (7) Rekreasi, seni dan budaya; (8) Belanja cindra mata; (9) Kesehatan; dan (10) Lainnya.



Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran *Spending of Money* pada tahun 2022 beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	<i>Spending of Money</i>	Milyar Rupiah	126,22	154,28	122,23	MT
Rata-Rata Capaian					122,23	MT

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 122,23 persen yang berarti pencapaian melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan *spending of money* atau uang yang dibelanjakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka selama Tahun 2022 sebesar 154,28 miliar rupiah sementara target yang ditetapkan sebesar 126,23 miliar rupiah.

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan target indikator kinerja sasaran strategis *spending of money* tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjungn berbagai macam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini:



Grafik 3.24

Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 85.102 orang wisatawan, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 100.345 orang wisatawan, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19 dengan jumlah kunjungan sebanyak 91.563 orang wisatawan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan pasca covid-19 menjadi 234.455 orang wisatawan. Sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat dengan jumlah kunjungan sebanyak 251.292 orang wisatawan atau meningkat sebesar 7,16 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Jumlah kunjung wisatawan ke Kabupaten Bangka berdasarkan kategori wisatawan (wisatawan lokal, wisatawan nusantara, dan wisatawan mancanegara) serta masing-masing jumlah kunjungan berdasarkan kategori pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.57

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kategori Wisatawan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022**

KATEGORI WISATAWAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)		
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Lokal	57.660	193.610	195.950
Nusantara	33.898	40.845	55.312
Mancanegara	5	0	30
TOTAL	91.563	234.455	251.292

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun, 2023

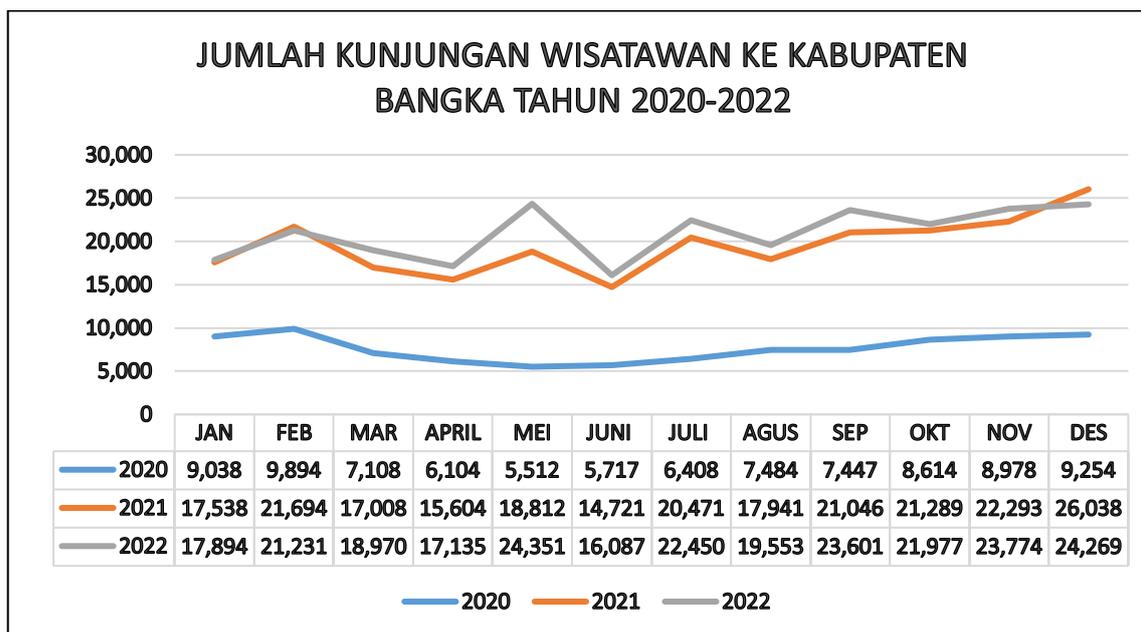
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka didominasi oleh wisatawan lokal yaitu wisatawan yang berasal dari Pulau Bangka yang pada tahun 2020 berjumlah 57.660 orang wisatawan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 193.610 orang wisatawan dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 195.950 orang wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan yang berasal dari luar Pulau Bangka pada tahun 2020 berjumlah 33.898 orang wisatawan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 40.845 orang wisatawan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 55.312 orang wisatawan. Sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 berjumlah 5 orang wisatawan, pada 2021 tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara yang salah satu penyebabnya yaitu pembatasan kunjungan dari luar negeri ke Indonesia serta tidak diselenggarakannya event-event internasional di Kabupaten Bangka seperti *Sungailiat Triathlon*, *Sungailiat Trail Run*, dan *Bangka Culture Wave Festival*. Sedangkan pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 30 orang wisatawan.

Sementara perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka per bulan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.25

Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Bulan Tahun 2020 - 2022



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mulai terjadi peningkatan pada bulan November dan Desember. Peningkatan kunjungan wisatawan ini berkaitan dengan libur akhir tahun dan bertepatan dengan libur sekolah.

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka tidak terlepas dari banyaknya objek wisata baik objek wisata pantai, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata agro maupun wisata pendidikan. Pengembangan objek wisata baru juga memberikan andil yang besar terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata dan peningkatan uangan yang dibelanjakan oleh wisatawan. Objek wisata baru di Kabupaten Bangka antara lain yaitu Bukit Pilar Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Kebun Bunga “*Celosia Garden Ake*” di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Telaga Emas Bersinar di Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat, Pantai Cemara di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat, Aek Lelap Bedelew di Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu, Kampung Reklamasi Air Jangkang Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang dan Konservasi Biodiversity Sungai Upang Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, di samping beberapa lokasi wisata yang telah lama ada dan tetap menarik untuk dikunjungi. Selengkapnya beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3.58

Objek Wisata di Kabupaten Bangka

JENIS OBJEK WISATA	OBJEK WISATA
Wisata Pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai Matras di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Jambosag di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Tanjung Kelayang di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Turun Abang di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Parai Tenggara di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Teluk Pikat di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Indah Batu Bedaun di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Batu Berakit di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Tongaci & De Locomotief di Kel. Matras Kec. Sungailiat • Pantai Bangka Bay Resort (BBR) di Kelurahan Jelitik Kec. Sungailiat • Pantai Rambak di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Teluk Uber di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tanjung Pesona di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tikus Mas di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Batu Barisan di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tikus di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Cemara Beach Resort di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Mang Kalok di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Indah Rebo di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Takari di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Temberan di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Pukan di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Penyusuk di Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu • Pantai Romodong di Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu • Pantai Batu Bedinding di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pantai Levar di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pantai Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pantai Tuing Indah Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pantai Pulau Tiga Desa Deniang Kecamatan Riau Silip
Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Kota di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat • Tasya Hot Spring Eco Park di Desa Pemali Kecamatan Pemali • Pelabuhan Tanjung Gudang di Kelurahan Mantung Kec. Belinyu • Pulau Lampu di Kecamatan Belinyu



	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Karang di Kecamatan Belinyu • Tanjung Putat di Kecamatan Belinyu • Pulau Putri di Kecamatan Belinyu • Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip • Kolam Renang Loka Tirta di Kecamatan Sungailiat • Wisata Alam Bebas/BIO di Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Desa Wisata Air Simpur di Kecamatan Pemali • Desa Wisata Konservasi Biodiversity Sungai Upang di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar • Jembatan Kaca Pagoda Nusantara di Desa Rebo Kec. Sungailiat • Telaga Emas Bersinar Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat • Bukit 7 Sempan di Desa Sempan Kecamatan Pemali • Bukit Pilar Matras di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Aek Lelap Bedelew di Kecamatan Belinyu • Celosia Garden Ake di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat • Kebun Raya Rimbe Mambang di Desa Dalil Kecamatan Bakam • Hutan Nyato di Desa Kimak Kecamatan Merawang • Eco Park di Kecamatan Pemali • Kampung Reklamasi Air Jangkang Kec. Merawang • Danau Ampar Red Hill Desa Riding Panjang Kec. Merawang • Air Terjun Kaki Gunung Maras Desa Berbura Kecamatan Riau Silip
<p>Wisata Sejarah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Makam N Leveysen di Belakang Ruko Puncak di Kec. Sungailiat • Tugu Kemerdekaan di Terminal Sungailiat di Kecamatan Sungailiat • Makam Akek Siam di Bukit Betung di Kecamatan Sungailiat • Makam Depati Bahrin di Desa Kimak Kecamatan Merawang • Makam Nek Pok di Desa Kimak Kecamatan Merawang • Benteng Kota Waringin di Kecamatan Puding Besar • Makam Pahlawan IV di Kecamatan Merawang • Benteng Kuto Panji di Kecamatan Belinyu • Tugu dan Pahlawan XII di Kecamatan Mendo Barat • Situs Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat • Makam Cermin Jati Desa di Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam • Makam Keramat Batu di Kecamatan Bakam • Makam Nek Wet di Kecamatan Bakam



	<ul style="list-style-type: none"> • Makam Umar Mansyur di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat
Wisata Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Beduk Terbesar Masjid Agung di Kecamatan Sungailiat • Vihara Dewi Kwan Im di Kecamatan Sungailiat • Puri Tri Agung di Kecamatan Sungailiat • Padepokan Babel di Kecamatan Sungailiat • Acara Agama 1 Muharam Terdapat di Kecamatan Sungailiat • Acara Sepintu Sedulang di Seluruh Kecamatan • Klenteng Cetya Dharma Abadi di Kecamatan Sungailiat • Phak Kak Liang Terdapat di Kecamatan Belinyu • Mandi Belimau Terdapat di Kecamatan Merawang • Rebo Kasan Terdapat di Kecamatan Merawang • Klenteng Amal Bakti • Klenteng Jaya Bakti • Maulid Nabi Muhammmad SAW di Kec. Mendo Barat • Klenteng Kuto Panji di Kecamatan Belinyu • Desa Wisata Gedong/Suku Hakka di Kecamatan Belinyu • Klenteng Fajar di Kecamatan Sungailiat • Klenteng Kwan Im di Kecamatan Sungailiat • Klenteng Gedong Lumut di Kecamatan Belinyu • Gua Bunda Maria di Kecamatan Belinyu • Desa Wisata Kampung Kapitan di Kecamatan Belinyu
Wisata Agro	<ul style="list-style-type: none"> • Agro Wisata Hendro Terdapat di Kec. Sungailiat • Perkebunan Jambu Mente Terdapat di Kec. Mendo Barat • Kebun Karet tersebar di 8 Kecamatan • Kebun Kelapa Sawit tersebar di 8 Kecamatan • Kebun Lada Putih tersebar di 8 Kecamatan
Wisata Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kampus Politeknik Maufaktur Timah di Sungailiat • Universitas Bangka Belitung di Desa Balunujuk Kecamatan Merawang • Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka juga didukung oleh berbagai macam event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sepanjang tahun 2022 seperti *sport tourism*, *expo* dan pagelaran kebudayaan yang menghadirkan peserta dari berbagai daerah baik dari dalam maupun luar Provinsi Kep. Bangka Belitung, bahkan peserta dari manca negara.



**Gambar 3.3 Event Jelajah Alam Sepintu Sedulang (JELASS)
Adventure Trail Tahun 2022**



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Adapun event-event pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.59

Event-Event Wisata di Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	EVENT WISATA	LOKASI	JUMLAH PENGUNJUNG/ PESERTA
1.	Pemilihan Bujang Miak	Ballroom Aurora Tanjung Pesona	63 Peserta
2.	Bangka Expo	Komplek Pemda Bangka	3.000 Pengunjung
3.	Trail Run	Pantai Tikus Emas	580 Peserta
4.	Sungailiat Adventure Trail	Pantai Tikus Emas	500 Peserta
5.	Exotic Bangka Festival	Kantor Bupati Bangka	219 Peserta
6.	Sungailiat Duathlon	Kantor Bupati Bangka	200 Peserta
7.	Jelajah Alam Sepintu Sedulang (JELASS)	Sungailiat	800 Peserta

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka saat ini juga mengembangkan desa wisata yang merupakan alternatif tempat wisata yang menjadi tren bagi para wisatawan. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Kabupaten Bangka sudah memiliki 4 (empat) desa wisata yaitu Desa Wisata Kampung Kapitan Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Kampung Gedong Desa Lumut Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Sungai Upang Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar dan Desa Wisata Air Anyir Kecamatan Merawang.

**Gambar 3.4 Desa Wisata Sungai Upang Desa Tanah Bawah
Kecamatan Puding Besar**



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator kinerja sasaran *spending of money* yang capaiannya melebihi target dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka terutama wisatawan nusantara dan mancanegara membelanjakan uangnya untuk membayar akomodasi, seperti untuk biaya tempat tinggal selama berwisata baik di hotel, penginapan ataupun *homestay* yang ada di Kabupaten Bangka. Daftar



hotel, penginapan atau homestay di Kabupaten Bangka dan jumlah tamu yang menginap pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60

**Daftar Hotel/ Penginapan/ Homestay dan Jumlah Tamu
Di Kabupaten Bangka Tahun 2022**

NO	NAMA HOTEL/ PENGINAPAN/HOMESTAY	ALAMAT	JUMLAH TAMU
1	Parai Beach Resort & Spa	Jl. Parai Tenggara Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat	7.141
2	Hotel Tanjung Pesona	Jl. Pantai Rebo Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	11.943
3	Novilla Boutique Resort	Jl. Laut Lingkungan Kampung Pasir Kelurahan Matras Kec. Sungailiat	4.505
4	Pesona Bay	Jl. Pantai Rebo Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	1.778
5	Bos Hotel	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Paritpadang Kec. Sungailiat	5.483
6	ST 12 Hotel	Jl. Cut Nyak Dhien Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat	2.578
7	Hotel Tri Mustika	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2B Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	446
8	Pondok Wisata Moelya	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat	211
9	Penginapan Sederhana	Jl. Muhidin No.150 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat	2.424
10	Golden Dragon	Jl. Depati Barin No.11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu	1.224
11	Sam Pesaren	Jl. Pantai Pesaren No. 1 Dusun Pesaren Desa Bintet Kec. Belinyu	416
12	Hotel Jatimas	Jl. Depati Amir No.03 Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang	3.301
13	Penginapan 2004	Jl. Depati Barin Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu	4.343
14	Penginapan 2009	Jl. R.A. Kartini No.1 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu	1.946



15	Hotel Aksi Natural Resort	Jl. Mentok Gang Aksi No.432 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat	2.447
16	Wisma Kelekak Bunda	Jl. Sungailiat - Pangkalpinang No.100 Kelurahan Kec. Sungailiat	1.471
17	Mink Mink Inn	Jl. Panji Baru No.29 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu	629
18	Guest House Sutos	Komplek Sutos Jl. Muhidin Lingkungan Air Anyut Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat	1.962
19	Hotel Manunggal	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat	1.064
20	Puri Ansell	Batavia Banka Beach Jl. Laut Lingkungan Kampung Pasir Kelurahan Matras Kec. Sungailiat	816
21	Hotel Sejati	Jl. Jenderal Sudirman No.107 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat	1.821
22	Charsy Homestay	Jl. Jenderal Sudirman Gg. Kelud Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat	1.488
23	Empat Putra Homestay	Jl. Jenderal Sudirman Gg. Kelud Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat	816
24	Yasmin Hotel & Restaurant	Jl. Depati Amir No.07 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat	417
25	Dekamil Cottage Villa Kebun	Jl. Merbabu No.77 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat	291

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023 (data diolah)

Untuk meningkatkan capaian indikator sasaran strategis “*spending of money*”, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022. Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.61
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata
Di Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	NAMA PELATIHAN	SASARAN PESERTA	JUMLAH PESERTA
1.	Pelatihan Pengelolaan Homestay/Pondok Wisata	Pelaku Usaha Homestay/Pondok Wisata	40 Peserta
2.	Pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Pengelola Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	40 Peserta
3.	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Wisata	Pengelola Desa Wisata, Pokdarwis, Petugas Pantai, dan Pelaku Usaha Pariwisata	40 Peserta
4.	Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner	Pelaku Usaha Kuliner	40 Peserta
5.	Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata)	Pengelola Destinasi Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	40 Peserta

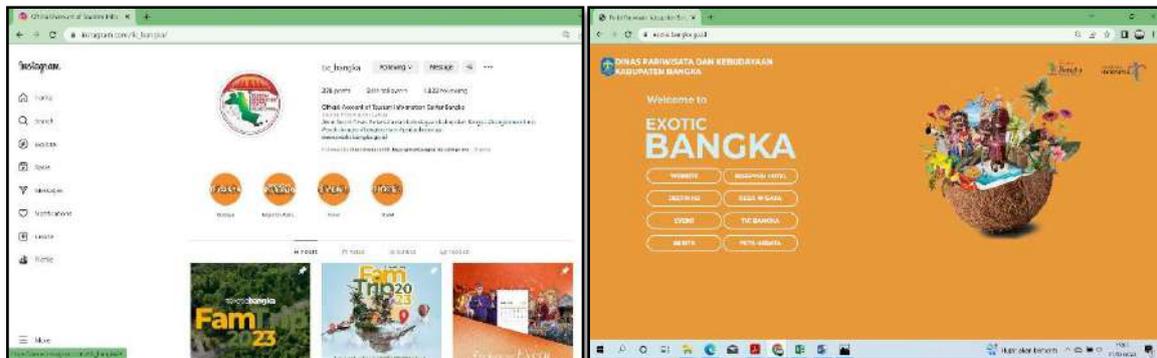
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator kinerja sasaran *spending of money* yang meningkat pada tahun 2022 juga tidak terlepas dari promosi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Promosi yang dilakukan berupa penyelenggaraan Bangka Expo yang menampilkan berbagai produk kreatif masyarakat di Kabupaten Bangka dan promosi melalui media sosial “instagram tic_bangka” yang memiliki *follower* sebanyak 9.111 orang dan sampai saat ini sudah memposting 278 postingan tentang budaya Bangka, kegiatan-kegiatan pariwisata, event pariwisata dan informasi hotel di Kabupaten Bangka. Promosi pariwisata juga dilakukan melalui website: exotic.bangka.go.id yang menginformasikan destinasi wisata, kalender



event pariwisata, reservasi hotel, desa wisata, berita terkait pariwisata Bangka dan peta wisata.

Gambar 3.5
Promosi Pariwisata Melalui Instagram tic_bangka
dan Website exotic.bangka.go.id



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator kinerja sasaran *spending of money* yang meningkat pada tahun 2022 juga tidak terlepas dari rasa aman wisatawan selama berkunjung ke Kabupaten Bangka. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bangka melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki satuan Satpol PP Pariwisata yang bertugas menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di sejumlah objek pariwisata. Satpol PP Pariwisata ini dalam menjalankan tugasnya mengutamakan "*hospitality*" atau keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan rasa saling menghormati yang merujuk kepada hubungan dengan tamu atau wisatawan yang menikmati keindahan alam dan seni budaya di Kabupaten Bangka. Wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Bangka juga merasa aman karena di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 tidak pernah terjadi konflik sosial. Kondusifitas di Kabupaten Bangka ini menjadi modal awal dalam pembangunan pariwisata, dimana peran menjaga kondusifitas ini dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah, maka kondisi indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.62

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	<i>Spending of Money</i>	Milyar Rupiah	121,94	154,28	151,47	101,86

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran *spending of money* pada tahun 2020 sebesar 84,15 miliar rupiah, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 121,94 miliar rupiah atau meningkat sebesar 44,91 persen dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 154,28 miliar atau meningkat sebesar 26,52 persen. Apabila dibandingkan capaian Tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD maka capaian indikator "*spending of money*" sudah melebihi target akhir RPJMD yang mencapai 101,86 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 151,47 miliar rupiah.

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan" dengan indikator "*spending of Money*" pada tahun 2022 sudah baik dan melebihi target yang ditetapkan tetapi tetap perlu dilakukan perbaikan agar pariwisata di Kabupaten Bangka menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi masyarakat.

Berikut adalah permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka "Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan" dengan indikator "*spending of money*" agar target akhir RPJMD Kabupaten Bangka dapat tercapai antara lain :



Tabel 3.63

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
<ul style="list-style-type: none"> Investasi di sektor pariwisata masih rendah jika dibandingkan dengan potensi wisata daerah yang dapat digali, direvitalisasi dan diaktualisasi termasuk potensi budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi potensi wisata daerah secara intensif kepada investor pariwisata skala nasional dan global
<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelatihan magang bersertifikasi nasional dan atau internasional bagi pekerja sektor pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya event-event nasional maupun internasional yang dapat menarik minat wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan event bersekala nasional dan internasional serta masuk kedalam kalender event pariwisata nasional serta penyelenggaraan event yang diadakan setiap bulan dengan tema-tema yang dapat menarik wisatawan dengan jadwal yang sudah ditetapkan diawal tahun kalender
<ul style="list-style-type: none"> Transportasi menuju objek wisata sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi wisatawan dari bandara menuju destinasi wisata unggulan daerah dengan menyediakan bus pariwisata atau menyediakan transportasi wisata pada akhir pekan dari dan ke destinasi wisata unggulan
<ul style="list-style-type: none"> Akses menuju objek wisata masih kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, penerangan jalan menuju destinasi wisata
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produk UMKM sebagai cinderamata khas 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan produk kreatif UMKM berbasis keunikan lokal,



daerah masih sangat terbatas	meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi serta meningkatkan jaringan pemasaran
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor pendukung industri pariwisata seperti hotel, penginapan, homestay, restoran, pusat oleh-oleh dan rental kendaraan wisata belum dirangkul sepenuhnya dalam satu sirkel yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pemerintah daerah untuk merangkul seluruh stakeholder pariwisata agar saling bersinergi membentuk satu sirkel industri pariwisata bersama
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata daerah terutama kebersihan objek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata

Selain itu, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka, mulai tahun 2018 pemerintah daerah telah mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang lebih 600 ha dari 948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka dan telah mendapat persetujuan dari Dewan KEK Nasional. Pada kawasan ini akan dibangun *golf resort*, *leisure and entertainment*, *cultural resort*, *wellness resort*, dan *tourism village* seperti disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.6

Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka



Pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” tidak terlepas dari adanya 8 (delapan) program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Program Pengembangan Kebudayaan;
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.64

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)**

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	89,51	122,23	136,56	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 122,23 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 89,51 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 136,56 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.65

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)**

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	18.883.869.285,00	16.903.259.549,00	89,51	122,23	32,72

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 (unaudited)

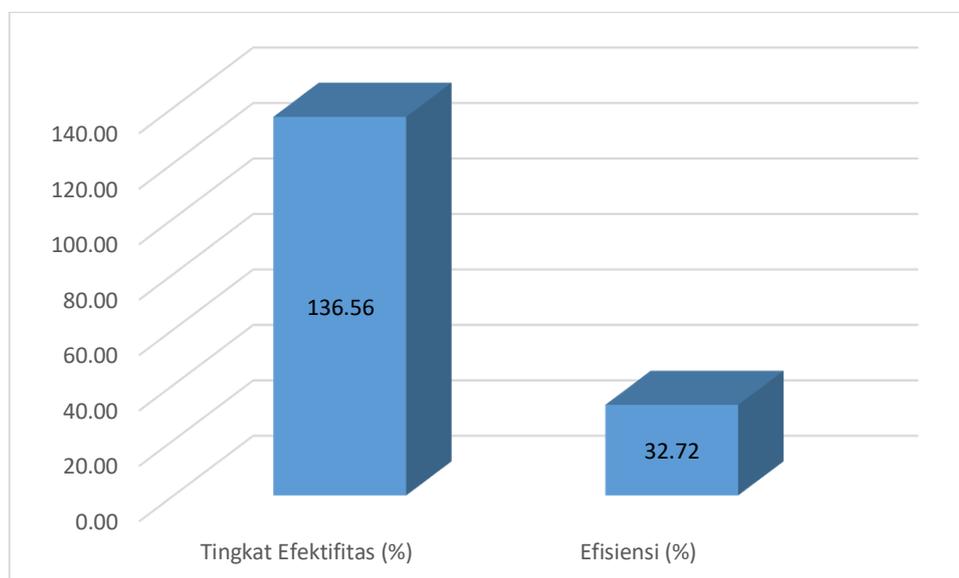
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp.18.883.869.285,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp.16.903.259.549,00 atau sebesar 89,51 persen. Sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 122,23 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar 32,72 persen dalam



pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan”.

Grafik 3.26

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)**



3.1.11 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka diukur dari pencapaian indikator sasaran peningkatan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah dan standar pertumbuhan kemakmuran sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sekaligus pembanding tingkat kemakmuran.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa pada tahun 2022 diukur dengan indikator pencapaian sasaran Indeks PDRB beserta target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.66
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks PDRB	Indeks	88,54	91,60	103,46	MT
Rata-rata Capaian					103,46	MT

Dalam kurun waktu tahun 2020-2022, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik. Hal ini diindikasikan capaian PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang terus meningkat. Data lengkap perbaikan perekonomian dalam tiga tahun terakhir tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.67
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022

TAHUN	PDRB PER KAPITA (RIBU RP)	PERTUMBUHAN (%)
2020	42,81	- 0,71
2021	49,01	7,46
2022	53,71	4,87
Rataan	48,51	3,88

Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan positif dari PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan metode terbaru, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2022 adalah sebesar 53,71 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 4,87 persen dari 49,01 juta rupiah pada tahun 2021. Selama periode 2020-2022, PDRB perkapita Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan rata-rata 3,88 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian dan pengolahan masih menjadi *prime mover* penggerak ekonomi Kabupaten Bangka. Sektor pertanian merupakan salah satu komoditas strategis yang memegang peranan yang relatif besar dalam perekonomian, khususnya komoditas perkebunan dan



perikanan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kontribusi sektor pertanian mampu menduduki peringkat kedua dari seluruh sektor ekonomi dengan share berfluktuasi dari sebesar 21,51 tahun 2020 menjadi 19,92 tahun 2022 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Bangka. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga memiliki kontribusi terbesar terhadap share PDRB sejak tahun 2020 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 21,63 persen dan pada tahun 2022 sebesar 26,01 persen. Tiga sektor lainnya yang memiliki *share* terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022 adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor pertambangan dan penggalian dan konstruksi serta kontribusi masing-masing sebesar 13,13 persen, 9,44 persen dan 9,09 persen (lihat Tabel dibawah ini).

Tabel 3.68

**Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2022**

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21.51	20.44	19,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	9.45	10.59	9,44
3.	Industri Pengolahan	21.63	24.22	26,01
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.26	0.26	0,23
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0.02	0.02	0,02
6.	Konstruksi	10.18	9.58	9,09
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.03	12.29	13,13
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.30	2.22	2,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.89	2.85	2,96
10.	Informasi dan Komunikasi	2.44	2.29	2,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.57	2.46	2,60
12.	Real Estate	3.69	3.45	3,35
13.	Jasa Perusahaan	0.25	0.24	0,25
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	5.46	5.03	4,51



NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022
	dan Jaminan Sosial Wajib			
15.	Jasa Pendidikan	2.42	2.22	2,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	1.09	1,03
17.	Jasa Lainnya	0.82	0.75	0,75
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan antara realisasi indikator atas sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 terlihat bahwa realisasi indikator pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai 91,60 persen dari target yang ditetapkan, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.69

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Indeks PDRB	Indeks	88,44	91,60	73,28	125,00

Selanjutnya dijelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa” dan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain:



Tabel 3.70

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Penurunan produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian, perkebunan terutama karet, lada, dan kelapa sawit.	- Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan kelapa sawit).
- Penurunan harga beberapa komoditas pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mengikuti harga dunia (lada, karet, kelapa sawit).	- Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian.
- Pelaku usaha di sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit) mengalami Keterbatasan permodalan.	- Memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka meningkatkan hasil produksi.

Terdapat 17 (tujuh belas) program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa, yaitu:

1. Program Pengembangan
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Penendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian



10. Program Penyuluhan Pertanian
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
17. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas Program-Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa mencapai 90,35 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 103,46 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 114,51 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.71

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)**

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	90.35	103,46	114,51	Sangat Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa mencapai 13,11 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (103,46 persen) terhadap realisasi anggaran program (90,35 persen) sebagaimana tertera pada tabel berikut:



Tabel 3.72

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)**

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	29.107.950.998,00	26.300.050.057,00	90,35	103,46	13,11

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

3.1.12. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu sejalan dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Apabila distribusi pendapatan masyarakat tidak merata, maka akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Ukuran pemerataan pendapatan atau ukuran kepincangan pembagian pendapatan adalah suatu ukuran kuantitatif untuk menggambarkan melenceng tidaknya pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya pengukuran pemerataan atau kepincangan pendapatan ini adalah menghitung deviasi antara satu tingkat pendapatan dengan rata-ratanya. Melalui metode statistik hal ini bisa dilakukan dengan cara:

1. Menghitung range-nya, yaitu selisih antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah.
2. Menghitung variannya, yaitu dengan mencari deviasi (penyimpangan) tiap nilai dengan rata-ratanya.
3. Menghitung standar deviasinya dengan menggunakan persamaan yang maksudnya untuk mengetahui secara lebih jelas distribusi pendapatan pada kelompok-kelompok yang lebih rendah pendapatannya.

Secara empiris ada beberapa metode yang dikemukakan, diantaranya yang paling mudah dan paling dikenal sekarang ini adalah dengan menghitung Gini Ratio-nya atau dengan menggunakan Kurva Lorenz.



Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Secara teoritis, perhitungan angka Gini Ratio dengan menggunakan angka pendapatan akan memberikan hasil yang lebih baik, karena bisa memberikan informasi tentang kondisi pembagian pendapatan yang sebenarnya. Tetapi karena data pendapatan sukar diperoleh, maka biasanya digunakan data pengeluaran sebagai proksi atau pendekatan terhadap data pendapatan.

Penjelasan rinci untuk capaian kinerja indikator Indeks Gini Kabupaten Bangka tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.73
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Gini	Indeks	0,255	0,219	114,12	MT
Rata-rata Capaian					114,12	MT

Tabel di atas memberikan informasi bahwa realisasi Indeks Gini tahun 2022 berada pada angka 0,219 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,255 atau secara persentase mencapai 114,12%. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1 yang mana



semakin kecil capaian Indeks Gini berarti semakin rendah pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang positif dalam pencapaian sasaran pemerataan pendapatan.

Tabel 3.74

Perkembangan Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

Tahun	Indeks Gini	Keterangan
2019	0,269	Relatif Rendah
2020	0,262	Relatif Rendah
2021	0,256	Relatif Rendah
2022	0,219	Relatif Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tergambar perkembangan Indeks Gini yang positif dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2019 Indeks Gini Kabupaten Bangka berada pada angka 0,269. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan yang positif sampai dengan tahun 2022 menjadi 0,219. Ini berarti Indeks Gini Kabupaten Bangka selama periode 2019-2022 tergolong dalam klasifikasi relatif rendah.

Selanjutnya jika perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah atau akhir RPJMD, maka didapat hasilnya adalah tahun 2022 telah melampaui target akhir RPJMD dengan persentase 114,12 %. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bangka telah berhasil menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Perkembangan Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka tahun 2019 -2022 tersaji dalam table berikut:

Tabel 3.75

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Indeks Gini	Nilai	0,256	0,219	0,264	117,05

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2023



Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Pemerataan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan pada hamper seluruh subsektor utama dan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dan ekspor serta belanja pemerintah daerah;
2. Peningkatan alokasi dana proyek infrastruktur yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat;
3. Investasi swasta meningkat terutama *core sector* perekonomian daerah.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, antara lain:

Tabel 3.76
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Pandemi covid-19 yang menyebabkan terkontraksinya beberapa sektor unggulan daerah seperti pariwisata, transportasi, pertambangan dan penggalian, dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian stimulus ekonomi sektor unggulan daerah ▪ <i>Refocusing</i> dan realokasi anggaran ▪ Pemberian insentif dan relaksasi Pajak dan Retribusi ▪ Perlindungan sosial

Pandemi covid-19 telah berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Beberapa sektor unggulan daerah yang terdampak adalah sektor pariwisata dan sektor pendukungnya seperti UMKM, industry perhotelan, makan minum dan transportasi. Kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan investasi di Kabupaten Bangka di tengah tidak kondusifnya perekonomian nasional dan global. Terkontraksinya beberapa sektor unggulan daerah sangat berpengaruh terhadap kontraksi PDRB per kapita Kabupaten Bangka. Namun, jika diperhatikan kontraksi tersebut tidak cukup dalam disebabkan peran sektor pertanian sebagai *supporting sector* (sektor penyangga) dalam perekonomian Kabupaten Bangka.



Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan berbagai langkah termasuk di bidang perpajakan dalam penanganan dampak pandemi covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial- ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan untuk penanganan kesehatan, *social safety net*, maupun dunia usaha termasuk UMKM. Dukungan terhadap kesehatan dilakukan terutama melalui dukungan anggaran kesehatan, penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan gratis tes rapid antigen dalam penanganan covid-19. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap dunia usaha, insentif perpajakan diberikan baik melalui insentif dan relaksasi pajak serta retribusi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan tidak terlewat dari 8 (delapan) program yang dilakukan yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja;
2. Program Hubungan Industrial;
3. Program Penataan Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada table berikut:

Tabel 3.77
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	97,28	114,12	117,31	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan satu indikator utama dapat dicapai sebesar



114,12 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 97,28 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 117,31 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

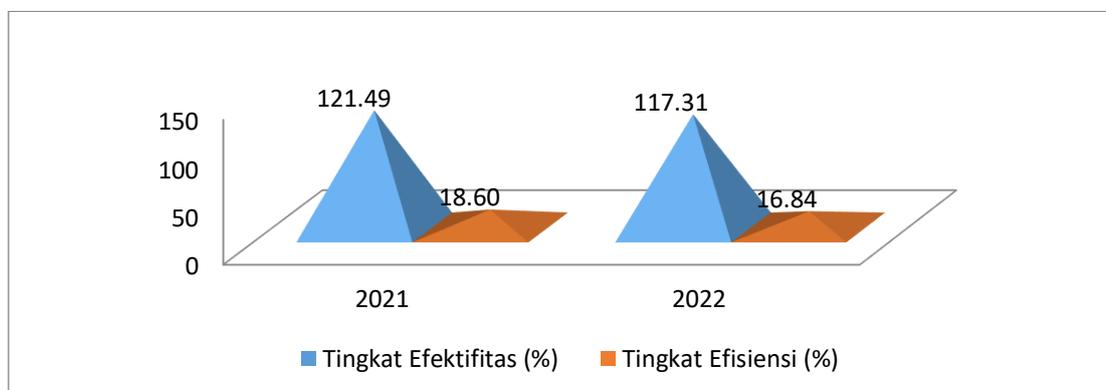
Tabel 3.78
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	8.287.761.905,00	8.062.650.880,00	97,28	114,12	16,84

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Pemerataan Pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp 8.287.761.905,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp.8.062.650.880,00 atau sebesar 97,28 persen, sementara capaian kinerja sasaran sebesar 114,12 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 16,84 persen.

Grafik 3.27
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2021 - 2022
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)





3.1.13. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menjadi jaminan bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya di lingkungan yang baik dan sehat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan.

Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan hidup daerah ini adalah Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah. Untuk memastikan kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka maka ditetapkan dua indikator sasaran, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup berikut target dan capaiannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.79
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

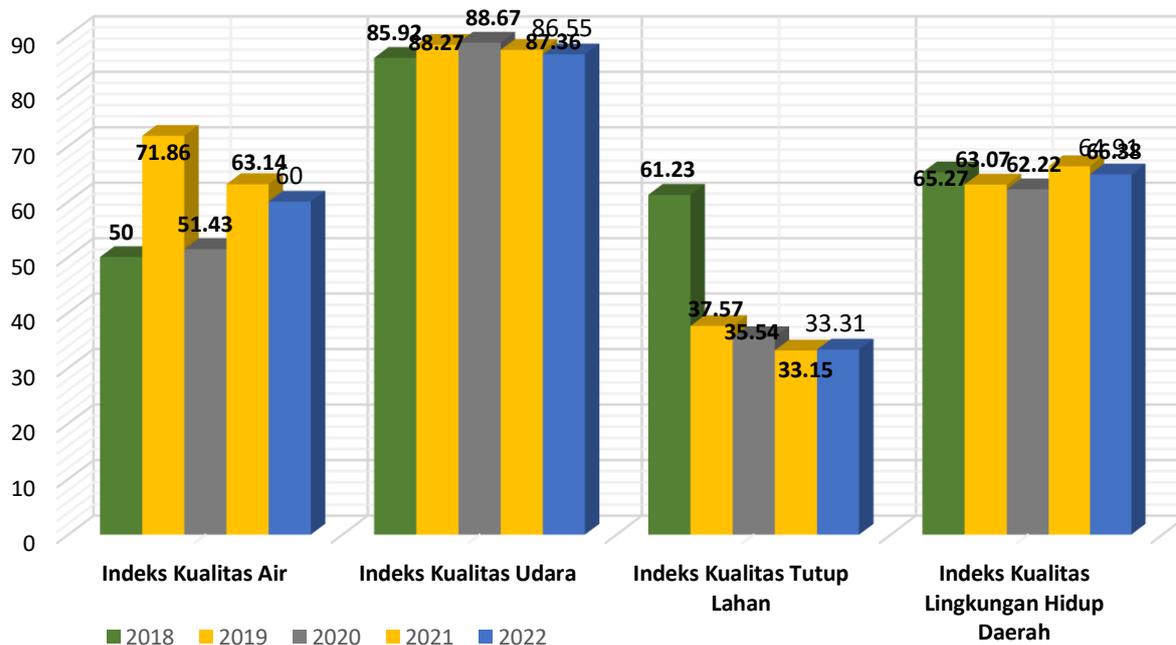
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,07	64,91	99,75	TT
2.	Indeks Resiko Bencana	indeks	168,40	168,40	100,00	T
Rata - Rata Capaian					99,88	TT

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 mencapai 64,91, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 66,38. Penurunan IKLH tersebut menurun 2,21% dari pencapaian indeks di tahun 2021 dan hanya mencapai 99,75% dari target pencapaian indeks pada



tahun 2022, yang berarti tidak mencapai target. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan akumulasi dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Perkembangan komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.28
Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022



Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air permukaan. Metode yang digunakan dalam mengukur IKA adalah Indeks Pencemaran (sesuai peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup). Parameter yang digunakan adalah pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat, dan *Fecal Coli* yang akan dimasukkan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah parameter kualitas udara ambien yang diukur berdasarkan parameter pengukuran SO₂ dan NO₂ di wilayah Kabupaten Bangka. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas tutupan lahan dengan luas wilayah administratifnya dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang digunakan adalah: (1) Luas tutupan hutan (*Forest Cover*



Index) dan perubahan tutupan hutan (*Forest Performance Index*); (2) Kondisi tutupan tanah (*Soil Condition Index*); (3) Konservasi sempadan sungai/danau/pantai (*Water Health Index*); dan (4) Kondisi habitat (*Land Habitat Index*).

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pengukuran indeks kualitas air sebesar 60,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat penurunan kualitas air di Kabupaten Bangka. Namun, jika dilihat dari tolak ukur kualitas air, maka kualitas air di Kabupaten Bangka masih masuk kategori tercemar ringan.

Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 86,55, mengalami penurunan dibanding hasil pengukuran IKU pada tahun 2021 memiliki nilai 87,36. Hasil pengukuran ini termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO_2 yang rata-rata berasal dari sektor transportasi masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO_2 yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah.

Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), luas tutupan lahan di Kabupaten Bangka seluas 35.589,8730 hektar dari luas wilayah administrasi 302.879,47 hektar sehingga skor IKTL pada tahun 2022 sebesar 33,31. Nilai ini meningkat dari angka IKTL Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebesar 33,15. Namun jika dibandingkan dengan skor IKTL tahun 2020 sebesar 35,54 mengalami penurunan. Dengan skor IKTL Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 33,31 menunjukkan bahwa indeks kualitas lahan Kabupaten Bangka berada pada kriteria kurang. Untuk itu perlu upaya untuk penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan perlu publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Indikator lain yang menjadi indikator kinerja pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah Indeks Resiko Bencana. Indeks resiko bencana menggambarkan kondisi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian resiko bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing wilayah.



Komponen bahaya meliputi fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan komponen kapasitas adalah unsur ketahanan daerah yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistic, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 168,40. Nilai tersebut masih sama dengan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2021. Angka ini mengategorikan Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten dengan resiko bencana yang tinggi. Kabupaten Bangka secara geografis memang tidak berada dekat dengan pertemuan lempeng tektonik utama sehingga dapat dikatakan memiliki resiko rendah terhadap kejadian bencana yang dipengaruhi faktor geologis. Namun secara geografis, Kabupaten Bangka dapat dikatakan cukup rentan terhadap bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang pasang ekstrim, abrasi, dan kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, karena topografi wilayah Kabupaten Bangka yang merupakan dataran rendah dan berbukit. Selain itu isu pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu bumi menyebabkan jarang terjadinya hujan, namun apabila terjadi hujan, maka curah hujannya akan berlebihan. Suhu rata-rata saat musim panas akan jadi sangat panas karena panas menjadi terperangkap, sementara itu saat musim dingin akan menjadi sangat dingin karena pemanasan tidak bisa menjangkau daerah yang jauh dari matahari. Cuaca menjadi lebih membahayakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya petir, angin puting beliung, angin kencang, banjir, tanah longsor, hujan es, kekeringan, dan bencana lainnya.

Tingginya ancaman dan kerentanan wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Bangka, terhadap bencana seharusnya dibarengi dengan tingginya pemahaman masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana. Sepanjang 2 (dua) tahun terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka telah menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan dalam skala yang kecil, baik melalui pendanaan APBD Kabupaten maupun APBN. Hal ini mengakibatkan cakupan masyarakat yang terlatih dan tersosialisasi masih sangat minim dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPBD Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kapasitas Kabupaten Bangka dalam menghadapi bencana.



Kesadaran masyarakat atas kejadian bencana yang masih rendah serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi 2 (dua) hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bangka.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air dan udara dilakukan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung dikarenakan belum terkreditasinya laboratorium lingkungan di Kabupaten Bangka;
2. Pengambilan sampel masih terbatas di wilayah perkotaan saja;
3. Kegiatan penambangan timah yang masih marak terjadi
4. Keterbatasan anggaran untuk mengintervensi masalah pencemaran lingkungan
5. Komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan amanah RTRW Kabupaten Bangka melalui penganggaran penyusunan RDTR dan turunannya; dan
6. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah.
7. Kesiapan tim penanggulangan bencana Kabupaten Bangka.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.80

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPJMD
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,38	64,91	65,10	99,71
2.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	168,40	168,40	140,00	83,14



Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yakni dari 66,38 menjadi 64,91 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator IKLH belum tercapai. Sebaliknya, jika membandingkan capaian indikator Indeks Resiko Bencana, maka dapat dilihat bahwa capaian IRB Kabupaten Bangka tahun 2022 baru mencapai 79,71% dari target yang harus dicapai pada tahun 2023. Untuk itu, masih diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Bangka, yaitu penurunan Indeks Resiko Bencana menjadi 140,00 (kategori sedang).

Hambatan/permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka terkait pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu:

Tabel 3.81

**Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Laboratorium DLH yang belum memenuhi standar	- Melakukan peremajaan, rehabilitasi laboratorium, peningkatan kapasitas pegawai sebagai upaya peningkatan standar laboratorium
- Komitmen perusahaan yang masih rendah terhadap pengelolaan limbah cair	- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka
- Luas tutupan lahan yang mengalami penurunan karena aktifitas penambangan illegal	- Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang - Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan



	Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga masih ditemukan masyarakat membuang sampah sembarangan terutama di aliran sungai	- Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai
- Musim kemarau panjang yang memicu kebakaran lahan dan hutan	- Mencegah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta menghimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar
- Belum optimalnya usaha pengurangan resiko bencana	- Pengoperasian Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Kabupaten Bangka

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari pelaksanaan 9 (sembilan) program pada Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
5. Program Pengelolaan Persampahan;
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
9. Program Penanggulangan Bencana.



Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.82
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2022	96,45	99,88	103,55	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 99,88 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 96,45 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 103,55 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.83
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2022	13.664.154.300,00	13.179.042.712,00	96,45	99,88	3,43

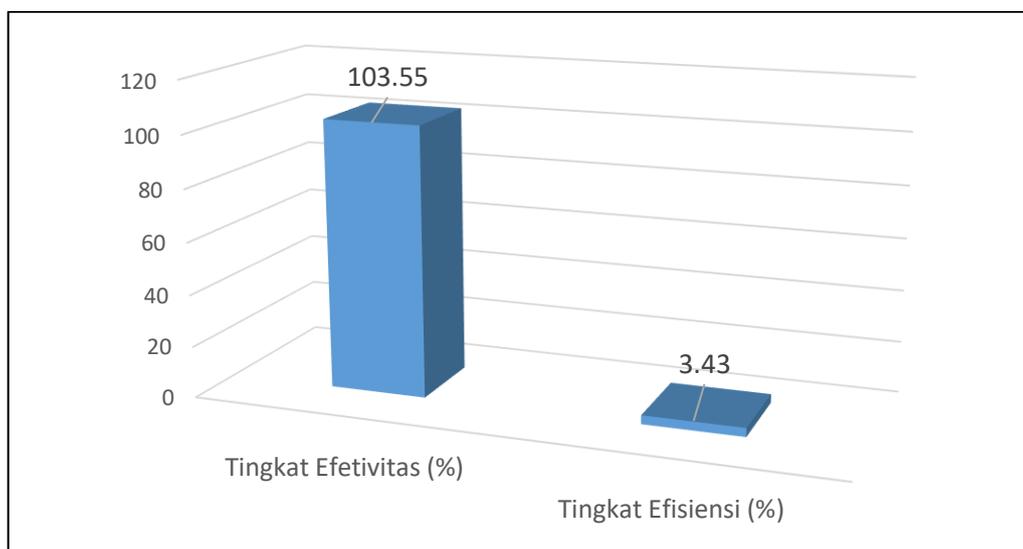
Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2022 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar Rp.13.664.154.300 dengan realisasi belanja mencapai Rp.13.179.042.712 atau sebesar 96,45 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,43 persen.



Grafik 3.29

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**



3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 diuraikan berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang disajikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan program-program utama yang mendukung pencapaian kinerja sasaran.

Adapun rincian target dan realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*) disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.84

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	1.305.675.039.221,00	1.405.507.082.077,13	99.832.042.856,13	107,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.303.935.200,00	186.489.553.928,57	33.185.618.728,57	121,65
PENDAPATAN TRANSFER	1.138.963.401.821,00	1.205.779.140.938,00	66.815.739.117,00	105,87
LAIN-LAIN	13.407.702.200,00	13.238.387.210,56	(169.314.989,44)	98,74



PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
BELANJA DAERAH	1.428.064.472.737,07	1.299.818.898.715,34	(128.245.574.021,73)	91,02
BELANJA OPERASI	1.037.536.324.848,47	931.631.069.685,67	(105.905.255.162,80)	89,79
BELANJA MODAL	252.966.922.483,60	233.234.112.180,67	(19.732.810.302,93)	92,20
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.593.480,00	2.397.478.875,00	(2.603.114.605,00)	47,94
BELANJA TRANSFER	132.560.631.925,00	132.556.237.974,00	(4.393.951,00)	100,00
SURPLUS / DEFISIT	-122.389.433.516,07	105.688.183.361,79	228.077.616.877,86	-86,35
PEMBIAYAAN DAERAH	122.389.433.516,07	125.201.931.505,43	2.812.497.989,36	102,30
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.389.433.516,07	128.201.931.505,43	2.812.497.989,36	102,24
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	122.389.433.516,07	125.201.931.505,43	2.812.497.989,36	102,30
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	230.890.114.867,22	230.890.114.867,22	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun 2022 (un audited)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar Rp.1.305.675.039.221,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.153.303.935.200,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.138.963.401.821,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 13.407.702.200,00. Di sisi pengeluaran, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.428.064.472.737,07 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.1.037.536.324.848,47, Belanja Modal sebesar Rp.252.966.922.483,60, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5.000.593.480,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.132.560.631.925,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.122.389.433.516,07. Sementara realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar Rp.1.405.507.082.077,13 atau mencapai 107,65 persen. Belanja Daerah terealisasi hingga sebesar Rp.1.299.818.898.715,34 atau mencapai 91,02 persen dari target dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 230.890.114.867,22.

Dalam pencapaian sasaran kinerja utama Pemerintah Daerah, tentunya diperlukan komitmen yang sangat kuat dan kerja sama antar elemen yang secara



parsial berorientasi pada pembangunan daerah. Dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah tersebut, Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam tataran pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun. Selain perencanaan yang matang, upaya dalam merealisasikan program-program prioritas tentu menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah. Namun, hal ini perlu dukungan finansial yang memadai yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dukungan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian sasaran kinerja daerah.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 yang dianggarkan untuk mendukung program prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian sasaran diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.85

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022
Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka**

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	720.833.146.677,00	640.013.944.575,15	88,79
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	152.585.132.035,00	147.622.503.233,00	96,75
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	87.246.501.870,00	83.321.752.564,00	95,50
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	111.886.648.010,07	96.783.011.914,00	86,50
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	109.808.970.658,00	101.819.438.501,36	92,72
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4.226.136.700,00	3.367.817.724,00	79,69
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	3.454.495.500,00	2.832.635.869,00	82,00
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	7.136.086.245,00	6.804.199.000,00	95,35
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	160.943.618.554,00	152.808.591.686,83	94,95
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	18.883.869.285,00	16.903.259.549,00	89,51



NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	29.107.950.998,00	26.300.050.507,00	90,35
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	8.287.761.905,00	8.062.650.880,00	97,28
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13.664.154.300,00	13.179.042.712,00	96,45
TOTAL ANGGARAN BELANJA		1.428.064.472.737,07	1.299.818.898.715,34	91,02

3.3. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.428.064.472.737,07 dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.299.818.898.715,34 maka diperoleh perhitungan efisiensi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp.128.245.574.021,73 atau 15,28 persen dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan, sementara masih terdapat penghematan anggaran.

Jika efisiensi anggaran dilihat per sasaran strategis, efisiensi anggaran terbesar yaitu efisiensi anggaran program pada sasaran **Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan** yaitu sebesar **32,72 persen**, sedangkan efisiensi anggaran terkecil yaitu efisiensi anggaran program pada sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** yaitu sebesar **0,25 persen**. Untuk lebih rinci efisiensi anggaran masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.86

Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)			EFISIENSI ANGGARAN		EFEKTIVITAS (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	(Rp)	%	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	720.833.146.677,00	640.013.944.575,15	88,79	80.819.202.101,85	0,25	100,28
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	152.585.132.035,00	147.622.503.233,00	96,75	4.962.628.802,00	3,25	103,36
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	87.246.501.870,00	83.321.752.564,00	95,50	3.924.749.306,00	7,23	107,58
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	111.886.648.010,07	96.783.011.914,00	86,50	15.103.636.096,07	13,60	115,72
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	109.808.970.658,00	101.819.438.501,36	92,72	7.989.532.156,64	17,46	118,83
6	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	4.226.136.700	3.367.817.724	79,69	858.318.976,00	21,16	126,55
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	3.454.495.500,00	2.832.635.869,00	82,00	621.859.631,00	17,98	121,93
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	7.136.086.245,00	6.804.199.000,00	95,35	331.887.245,00	6,41	106,73
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	160.943.618.554	152.808.591.686,83	94,95	8.135.026.867,17	9,99	110,52
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	18.883.869.285,00	16.903.259.549,00	89,51	1.980.609.736,00	32,72	136,56
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	29.107.950.998,00	26.300.050.507,00	90,35	2.807.900.491,00	13,11	114,51
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	8.287.761.905,00	8.062.650.880,00	97,28	225.111.025,00	16,84	117,31
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13.664.154.300,00	13.179.042.712,00	96,45	485.111.588,00	3,43	103,55
RATA-RATA				91,22	128.245.574.021,73	12,57	114,11

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 (unaudited), (data diolah)



BAB IV PENUTUP

Konsep akuntabilitas kinerja pada setiap instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka masih perlu dilakukan pendalaman dan pemahaman secara sistematis dan komprehensif, baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten maupun pada level Perangkat Daerah serta semua jenjang manajemen yang terlibat dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka, terutama pada jenjang *top* dan *middle management*, melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

Penyusunan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka mengacu pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka serta Indikator Tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan melalui proses pengarahan melalui *focus group discussion* yang melibatkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah. Proses ini dilakukan mulai dalam tahap perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar tetap mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap indikator kinerja setingkat *outcome*, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022, diketahui bahwa 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran atau sebesar 61,90 persen termasuk dalam kategori Melebihi Target (MT), sebanyak 5 (lima) indikator kinerja utama atau sebesar 23,81 persen termasuk dalam kategori Tercapai (T), sementara 3 (tiga) indikator kinerja utama lainnya atau sebesar 14,29 persen termasuk kategori Tidak Tercapai (TT).
2. Tingkat capaian kinerja akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :



- a. Target Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.305.675.039.221,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.405.507.082.077,13 atau mencapai 107,65%.
 - b. Target Belanja Daerah sebesar Rp.1.428.064.472.737,07 dengan realisasi sebesar Rp.1.299.818.898.715,34 atau mencapai 91,02%.
3. Pencapaian kinerja pembangunan tahun anggaran 2022 yang dipresentasikan terhadap tingkat pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan terus mengalami peningkatan derajat capaian yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran yang sudah disesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja yang berbasis pada penjangkaran potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atas hasil pengukuran kinerja sasaran sebagai bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** melalui upaya:
 - (i) Penyempurnaan seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran strategis, pohon kinerja, dan indikator kinerja utama) seluruh Perangkat Daerah serta keberlanjutan implemementasi manajemen kinerja;
 - (ii) Perlu dilakukan penyempurnaan aplikasi silakip yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - (iii) Melakukan perbaikan kualitas dokumen laporan kinerja perangkat daerah;
 - (iv) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja selanjutnya;
 - (v) Arsitektur SPBE kedepan akan diperbaiki. Penjelasan tentang visi misi akan ditambahkan dan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK akan disesuaikan dengan muatan rencana induk SPBE serta menyertakan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai akan



- dilakukan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola Kabupaten Bangka; (vi) Semua aspek Penerapan Manajemen SPBE kedepannya akan segera diterapkan secara maksimal.
2. **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel** melalui: (i) Mengoptimalkan pencatatan, pengamanan dan inventarisasi BMD yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; (ii) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan; (iii) Melakukan pengawasan atas perbaikan permasalahan-permasalahan penatausahaan aset perangkat daerah; (iv) Melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat** melalui upaya peningkatan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik prosedur maupun persyaratan pelayanan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik
 4. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** melalui: (i) Mengoptimalkan kembali program perburuan anak putus sekolah (Bunaktuslah) dalam rangka menekan angka putus sekolah sampai ke level desa dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (ii) Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin; (iii) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); (iv) Menyekolahkan semua tenaga pengajar ke jenjang pendidikan Strata I; (v) Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II; (vi) Memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar; (vii) Melakukan pengawasan secara berkala kepada tenaga tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum sekolah; (viii) Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah; (ix) Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil; (x) Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan.



5. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** melalui: (i) sosialisasi konsumsi pangan lokal melalui gerakan panganekaragaman pangan berbasis B2SA; (ii) sosialisasi gerakan SENJA SELAPIS RATA KASIH JUJUR SABILI (senin Jagung, Selasa Pisang, Rabu Talas Kamis Singkong, Jumlat Bijur sabtu Gemili); (iii) memberikan penyuluhan PHBS dengan pendekatan komunikasi antar pribadi (KAP) oleh petugas promkes kepada rumah tangga tentang bahaya merokok dan dampak terpapar merokok akibat orangtua atau anggota keluarga ada yang merokok di rumahtangga; (iv) Pendekatan juga dapat dilakukan melalui kunjungan rumah terintegrasi dengan PIS-PK memberikan edukasi dan konseling dampak stunting yang disebabkan resiko terpapar asap merokok dan memberi sanksi bagi anggota keluarga yang merokok yang mempunyai balita stunting dengan tidak mendapat bantuan PBI; (v) Membantu keluarga dan bayi yang belum mendapat JKN dan PBI, mendata peserta PBI dengan tepat sasaran; (vi) seluruh OPD terkait ikut meningkatkan pemberdayaa masyarakat untuk berpartisipasi di Posyandu; (vii) Penguatan pelaksanaan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas PONEB dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas; (viii) Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka; (ix) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya setempat sehingga dapat menginformasikan melalui kantor desa maupun layanan publik pemerintahan terdekat; (x) Peningkatan kapasitas layanan SPGDT; (xi) Pendampingan ibu hamil oleh petugas kesehatan dan kader dapat menekan angka kematian ibu melahirkan; (xii) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyediaan gizi keluarga untuk mengurangi angka balita gizi buruk; (xiii) Menggiatkan peran ibu-ibu PKK di desa dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak; (xiv) Pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA; (xv) Mengoptimalkan pelaksanaan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); (xvi) Mengoptimalkan pelayanan kelas ibu hamil dengan melibatkan peran serta suami maupun



keluarga dalam peningkatan pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta sehingga cepat dan tanggap dalam pengambilan keputusan.; (xvii) Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait dalam menundaan kehamilan bagi pasangan usia subur yang beresiko dan menderita penyakit; (xviii) Peningkatan penyediaan PONEK dan PONEK selama 24 jam, tetap melakukan pelayanan Kesehatan ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir sesuai dengan pedoman covid 19 dengan memanfaatkan buku KIA; (xix) Mengoptimalkan pemantauan ibu hamil resiko tinggi dengan melakukan kunjungan rumah (membuat kesepakatan terlebih dahulu) serta melaksanakan inovasi masa berkarya (manajemen sasaran berbasis kader wilayah); (xx) Penambahan sarana NICU pada fasilitas kesehatan rujukan; (xxi) Penambahan tenaga dokter spesialis.

6. **Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** melalui: (i) Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan; (ii) Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan; (iii) Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan; (iv) Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan; (v) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan; (vi) Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan.
7. **Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda** melalui: (i) Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan; (ii) Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan; (iii) Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan; (iv) Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan; (v) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan; (vi) Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan



Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan; (vii) Menyediakan fasilitas umum dengan sarana berbasis gender; (viii) Mengoptimalkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; (ix) Menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak; (x) Menyediakan data profil anak mulai dari tingkat desa sampai kabupaten; (xi) Mengoptimalkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak; (xii) Penyediaan SDM penyelenggara registrasi kelahiran yang telah mendapatkan pelatihan KHA; (xiii) Meningkatkan peranan forum anak dalam percepatan kepemilikan kutipan akte kelahiran; (xiv) Meningkatkan sinergitas LM, DU, dan MM; (xv) Menetapkan peraturan/kebijakan tentang fasilitas (Informasi Layak Anak); (xvi) Penyediaan SDM penyelenggara ILA yang dilatih KHA; (xvii) Pengoptimalan partisipasi anak untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan- pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah; (xviii) Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; (xix) Optimalisasi pencegahan perkawinan anak; (xx) penguatan program PUSPAGA; (xxi) Optimalisasi SDM pada pusat layanan yang dilatih KHA; (xxii) Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya; (xxiii) Optimalisasi Sekolah Ramah Anak yang terstandarisasi; (xxiv) Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah; (xxv) Optimalisasi Pusat Kreativitas Anak yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas; (xxvi) Penetapan Perdes Desa Layak Anak; (xxvii) Peningkatan pembentuk Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan; (xxviii) Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak; (xxix) Penyediaan Perda tentang



- Kepemudaan; (xxx) Penyediaan data Profil Kepemudaan; (xxxii) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; (xxxiii) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (xxxiv) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (xxxv) Optimalisasi program kewirausahaan kepemudaan dan pelibatan pemuda dalam sektor ekonomi; (xxxvi) Optimalisasi program kepeloporan kepemudaan, Program perlindungan pemuda dan organisasi kepemudaan; (xxxvii) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
8. **Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat** melalui: (i) Mikro Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan Untuk UMKM; (ii) Revitalisasi UMKM Dan Pariwisata; (iii) Pelatihan Enterpreunership Terintegrasi Bursa Kerja; (iv) APBD Berbasis Padat Karya; (v) Fasilitasi Kemudahan Investasi; (vi) Integrasi Dan Transformasi Bantuan Sosial.
 9. **Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur** melalui: (i) Memetakan Kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum refocusing telah ditetapkan; (ii) Memetakan Variabel Infrastruktur mana yang memiliki kelemahan dalam kualitas; (iii) Anggaran difokuskan untuk kegiatan yang mendongkrak nilai kualitas infrastruktur seperti pengadaan *septic tank* untuk masyarakat, pengolahan air minum, peningkatan kualitas jalan dan koordinasi dengan PT Telkom Indonesia terkait sebaran akses internet 4G di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.
 10. **Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan** melalui: (i) Melakukan promosi potensi wisata daerah secara intensif kepada investor pariwisata skala nasional dan global; (ii) Menyelenggarakan pelatihan magang bersertifikasi nasional dan atau internasional bagi pekerja sektor pariwisata; (iii) Menyelenggarakan event bersekala nasional dan internasional serta masuk kedalam kalender event pariwisata nasional serta penyelenggaraan event yang diadakan setiap bulan dengan tema-tema yang dapat menarik wisatawan dengan jadwal yang sudah ditetapkan diawal tahun kalender; (iv) Memfasilitasi wisatawan dari



bandara menuju destinasi wisata unggulan daerah dengan menyediakan bus pariwisata atau menyediakan transportasi wisata pada akhir pekan dari dan ke destinasi wisata unggulan; (v) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, penerangan jalan menuju destinasi wisata; (vi) Mendorong pengembangan produk kreatif UMKM berbasis keunikan lokal, meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi serta meningkatkan jaringan pemasaran; (vii) Mendorong pemerintah daerah untuk merangkul seluruh stakeholder pariwisata agar saling bersinergi membentuk satu sirkel industri pariwisata bersama; (viii) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata.

11. **Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa** melalui: (i) Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan kelapa sawit); (ii) Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian; (iii) Memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka meningkatkan hasil produksi.
12. **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan** melalui: (i) Pemberian stimulus ekonomi sektor unggulan daerah; (ii) *Refocusing* dan realokasi anggaran; (iii) Pemberian insentif dan relaksasi Pajak dan Retribusi; (iv) Perlindungan sosial.
13. **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** melalui: (i) Melakukan peremajaan, rehabilitasi laboratorium, peningkatan kapasitas pegawai sebagai upaya peningkatan standar laboratorium; (ii) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka; (iii) Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang; (iv) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah; (v) Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai; (vi) Mencegah dan memberikan informasi



kepada masyarakat agar waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta menghimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar; (vii) Pengoperasian Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Kabupaten Bangka.



BUPATI BANGKA
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULKAN, SH.,MH

Jabatan : BUPATI BANGKA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah Seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Bangka, 10 Oktober 2022

BUPATI BANGKA

MULKAN, SH.,MH

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB
		2	Indeks SPBE	Indeks	2,76
		3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,95
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	4	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,26
		7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,79
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,28
		9	Angka Stunting	%	1,68
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	10	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,35
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,89
		12	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
		13	Status Kabupaten Layak Pemuda	Kategori	Pratama
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	14	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/Orang/Tahun	12.640
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	15	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	43,36
		16	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	84,22
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan	17	<i>Spending Of Money</i>	Miliar Rp	126,22
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	18	Indeks PDRB	Indeks	88,54
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	19	Indeks Gini	Indeks	0,255
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,07
		21	Indeks Resiko Bencana	Indeks	168,40

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SELURUH PERANGKAT DAERAH)	711.243.742.572,00	APBD
2	Program Pengelolaan Arsip (DKP)	362.677.250,00	APBD
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1.134.941.745,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	455.135.600,00	APBD
5	Program Perekonomian dan Pembangunan (SETDA)	1.240.600.000,00	APBD
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik (DINKOMINFOTIK)	2.248.865.340,00	APBD
7	Program Aplikasi Informatika (DINKOMINFOTIK)	1.551.046.820,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (DINKOMINFOTIK)	32.706.650,00	APBD
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (DINKOMINFOTIK)	39.285.000,00	APBD
10	Program Kepegawaian Daerah (BKPSDMD)	1.474.299.550,00	APBD
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD)	1.049.846.150,00	APBD
12	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD)	142.493.717.005,00	APBD
13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPPKAD)	3.447.823.000,00	APBD
14	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPKAD)	6.165.932.030,00	APBD
15	Program Penyelenggaraan Pengawasan (INSPEKTORAT)	362.180.000,00	APBD
16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (INSPEKTORAT)	115.480.000,00	APBD
17	Program Promosi Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	14.030.000,00	APBD
18	Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	74.539.000,00	APBD
19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	471.932.000,00	APBD
20	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	25.000.000,00	APBD

21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (KECAMATAN)	10.276.616.807,00	APBD
22	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	54.458.483.940,00	APBD
23	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (BAKESBANGPOL)	972.989.783,00	APBD
24	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL)	10.000.000,00	APBD
25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	20.007.658.700,00	APBD
26	Program Pencatatan Sipil (DINDUKPENCAPIL)	935.251.640,00	APBD
27	Program Pengelolaan Pendidikan (DINDIKPORA)	74.454.930.260,07	APBD + DAK
28	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (DINDIKPORA)	36.809.974.100,00	APBD + DAK
29	Program Pembinaan Perpustakaan (DKP)	591.743.650,00	APBD
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (BAKESBANGPOL)	30.000.000,00	APBD
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)	99.409.411.423,00	APBD + DAK
32	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (DINDIKPORA)	8.517.343.040,00	APBD
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINKES)	488.570.620,00	APBD + DAK
34	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DINKES)	464.987.800,00	APBD + DAK
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (DINKES)	778.657.775,00	APBD + DAK
36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DINPANPERTAN)	150.000.000,00	APBD
37	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (DP2KBP3A)	2.353.339.300,00	APBD
38	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (DP2KBP3A)	1.721.040.000,00	APBD
39	Program Pengendalian Penduduk (DP2KBP3A)	151.757.400,00	APBD
40	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A)	195.058.000,00	APBD

41	Program Perlindungan Perempuan (DP2KBP3A)	364.747.000,00	APBD
42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (DP2KBP3A)	4.965.505,00	APBD
43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (DP2KBP3A)	194.379.495,00	APBD
44	Program Perlindungan Khusus Anak (DP2KBP3A)	362.053.000,00	APBD
45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (DINDIKPORA)	2.333.292.500,00	APBD
46	Program Pemberdayaan Sosial (DINSOS)	1.310.780.000,00	APBD
47	Program Rehabilitasi Sosial (DINSOS)	282.300.000,00	APBD
48	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DINSOS)	5.543.006.245,00	APBD
49	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (DPUPR)	11.851.717.260,00	APBD + DAK
50	Program Penataan Bangunan Gedung (DPUPR)	2.397.611.000,00	APBD + DAK
51	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (DPUPR)	200.000.000,00	APBD
52	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (DINPERKPP)	955.619.050,00	APBD
53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (DPUPR)	9.839.013.000,00	APBD + DAK
54	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DPUPR)	1.026.342.150,00	APBD + DAK
55	Program Pengembangan Permukiman (DPUPR)	7.391.616.000,00	APBD + DAK
56	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (DPUPR)	803.356.500,00	APBD
57	Program Penyelenggaraan Jalan (DPUPR)	103.702.728.329,00	APBD + DAK
58	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (DPUPR)	1.132.000.000,00	APBD
59	Program Pengembangan Perumahan (DINPERKPP)	85.000.000,00	APBD
60	Program Kawasan Permukiman (DINPERKPP)	2.858.320.850,00	APBD + DAK
61	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP)	161.890.800,00	APBD

62	Program Pengelolaan Izin Lokasi (DINPERKPP)	23.565.700,00	APBD
63	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (DINPERKPP)	44.376.200,00	APBD
64	Program Penatagunaan Tanah (DINPERKPP)	1.019.944.915,00	APBD
65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (DINHUB)	17.450.516.800,00	APBD
66	Program Pengembangan Kebudayaan (DINPARBUDAYA)	875.580.000,00	APBD
67	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (DINPARBUDAYA)	126.184.890,00	APBD
68	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINPARBUDAYA)	6.659.906.482,00	APBD
69	Program Pemasaran Pariwisata (DINPARBUDAYA)	602.730.000,00	APBD
70	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DINPARBUDAYA)	824.635.558,00	APBD
71	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SATPOL PP)	9.548.221.355,00	APBD
72	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (BAKESBANGPOL)	183.080.000,00	APBD
73	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (BAKESBANGPOL)	63.531.000,00	APBD
74	Program Pengembangan UMKM (DPMP2KUKM)	232.327.400,00	APBD
75	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (DPMP2KUKM)	12.000.000,00	APBD
76	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DPMP2KUKM)	179.472.600,00	APBD
77	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (DPMP2KUKM)	5.000.000,00	APBD
78	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (DPMP2KUKM)	20.000.000,00	APBD
79	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (DINPANPERTAN)	949.006.180,00	APBD
80	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DINPANPERTAN)	1.164.113.000,00	APBD + DAK

81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DINPANPERTAN)	629.788.600,00	APBD
82	Program Penendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DINPANPERTAN)	163.583.680,00	APBD
83	Program Penyuluhan Pertanian (DINPANPERTAN)	3.541.425.560,00	APBD
84	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (DINAKERPERINDAG)	3.232.947.000,00	APBD
85	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DINAKERPERINDAG)	67.000.000,00	APBD
86	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (DINAKERPERINDAG)	76.000.000,00	APBD
87	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (DINAKERPERINDAG)	16.408.674.508,00	APBD + DAK
88	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (DINAKERPERINDAG)	29.740.000,00	APBD
89	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	1.778.886.900,00	APBD + DAK
90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	617.985.570,00	APBD
91	Program Penempatan Tenaga Kerja (DINAKERPERINDAG)	84.996.000,00	APBD
92	Program Hubungan Industrial (DINAKERPERINDAG)	60.000.000,00	APBD
93	Program Penataan Desa (DINPEMDES)	114.306.000,00	APBD
94	Program Administrasi Pemerintahan Desa (DINPEMDES)	1.319.072.800,00	APBD
95	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (DINPEMDES)	3.500.590.630,00	APBD
96	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (KECAMATAN)	929.633.125,00	APBD
97	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (KECAMATAN)	1.970.665.450,00	APBD
98	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (KECAMATAN)	308.497.900,00	APBD
99	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)	583.152.760,00	APBD
100	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (DLH)	1.537.674.180,00	APBD

101	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (DLH)	34.485.200,00	APBD
102	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (DLH)	11.503.000,00	APBD
103	Program Pengelolaan Persampahan (DLH)	8.003.242.850,00	APBD + DAK
104	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (DLH)	280.000.000,00	APBD
105	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (DLH)	15.625.000,00	APBD
106	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SATPOL PP)	2.220.426.850,00	APBD
107	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	978.044.460,00	APBD
	TOTAL	1.428.064.472.737,07	



Bangka, 10 Oktober 2022

BUPATI BANGKA

MULKAN, SH.,MH

**MATRIK PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KINERJA TAHUN 2022		
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka oleh Kementerian PAN dan RB	Kementerian PAN dan RB	BB	BB	100,00
		2	Indeks SPBE	Terdiri dari Komponen Indeks Domain Kebijakan, Indeks Domain Tata Kelola, dan Indeks Domain Layanan	Kementerian Kominfo	2,76	1,85	67,03
		3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja	BKPSDMD Kab. Bangka	63,95	64,00	100,08
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	4	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	BPK	WTP	WTP	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,00	85,27	102,73
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	8,26	8,27	100,12
		7	Angka Harapan Lama Sekolah	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	12,79	12,80	100,08
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	71,28	71,37	100,13
		9	Angka Stunting	$\text{Angka Stunting} = \frac{\text{Jumlah Baduta Stunting}}{\text{Jumlah Baduta}} \times 100\%$	Hasil Pemantauan Status Gizi pada e-PPBGM	1,68	1,34	120,24
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	10	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	Jumlah Anak yang Akan Dipunyai Seorang Wanita Selama Masa Reproduksi per 1000 Wanita	DP2KBP3A Kab. Bangka	2,35	2,33	100,85
7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	11	Indeks Pembangunan Gender	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	88,89	88,84	99,94
		12	Status Kabupaten Layak anak	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian P3A	Madya	Madya	100,00
		13	Status Kabupaten Layak Pemuda	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kemenpora	Pratama	Pratama	100,00
8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	14	Pengeluaran Per Kapita	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	12.640	12.863	101,76
9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	15	Indeks Kualitas Infrastruktur	$\sqrt[4]{\text{kualitas jalan baik} \times \text{kualitas air bersih} \times \text{kualitas internet 4G} \times \text{kualitas sanitasi layak}} \times 100$	Data Infrastruktur Diolah	43,36	45,13	104,08
		16	Indeks Pemerataan Infrastruktur	$\sqrt[5]{\text{akses jalan} \times \text{akses air} \times \text{akses sanitasi} \times \text{akses telekomunikasi} \times \text{akses listrik}} \times 100$	Data Infrastruktur Diolah	84,22	89,10	105,79
10	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	17	Spending of Money	Rata-Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Rekap Data Kunjungan Wisatawan Diolah	126,22	154,28	122,23
11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	18	Indeks PDRB	$\text{Indeks PDRB}_n = \left[\frac{(\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan}_n - \text{Garis Kemiskinan}_n)}{(\text{PDRB Atas Dasar harga Konstan}_{2022} - \text{Garis Kemiskinan}_n)} \right] \times 100$	Data BPS Diolah	88,54	91,60	103,46
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	19	Indeks Gini	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	BPS Kab. Bangka	0,255	0,219	114,12
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$	DLH Kab. Bangka	65,07	64,91	99,75
		21	Indeks Resiko Bencana	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	168,40	168,40	100,00
RATAAN								102,02

**MATRIK PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

SASARAN	NO	INDIKATOR	PROGRAM		ANGGARAN PROGRAM (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4		5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SELURUH PERANGKAT DAERAH)	711.243.742.572,00	631.764.076.755,15	88,83
			2	Program Pengelolaan Arsip (DKP)	362.677.250,00	355.219.745,00	97,94
			3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1.134.941.745,00	868.752.077,00	76,55
			4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	455.135.600,00	289.665.488,00	63,64
			5	Program Perekonomian dan Pembangunan (SETDA)	1.240.600.000,00	1.103.718.578,00	88,97
	2	Indeks SPBE	6	Program Informasi dan Komunikasi Publik (DINKOMINFOTIK)	2.248.865.340,00	2.080.624.821,00	92,52
			7	Program Aplikasi Informatika (DINKOMINFOTIK)	1.551.046.820,00	1.508.078.688,00	97,23
			8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (DINKOMINFOTIK)	32.706.650,00	30.375.600,00	92,87
			9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (DINKOMINFOTIK)	39.285.000,00	36.212.681,00	92,18
	3	Indeks Profesionalitas ASN	10	Program Kepegawaian Daerah (BKPSDMD)	1.474.299.550,00	1.075.668.260,00	72,96
			11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD)	1.049.846.150,00	901.551.882,00	85,87
TOTAL					720.833.146.677,00	640.013.944.575,15	88,79

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	4	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	12	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD)	142.493.717.005,00	138.740.989.205,00	97,37
			13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPPKAD)	3.447.823.000,00	2.987.393.058,00	86,65
			14	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPKAD)	6.165.932.030,00	5.664.273.220,00	91,86
			15	Program Penyelenggaraan Pengawasan (INSPEKTORAT)	362.180.000,00	195.347.750,00	53,94
			16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (INSPEKTORAT)	115.480.000,00	34.500.000,00	29,88
				TOTAL	152.585.132.035,00	147.622.503.233,00	96,75
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	5	Indeks Kepuasan Masyarakat	17	Program Promosi Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	14.030.000,00	13.997.780,00	99,77
			18	Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	74.539.000,00	64.603.600,00	86,67
			19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	471.932.000,00	438.720.000,00	92,96
			20	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMP2KUKM)	25.000.000,00	21.797.000,00	87,19
			21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (KECAMATAN)	10.276.616.807,00	10.064.973.728,00	97,94
			22	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	54.458.483.940,00	51.994.963.683,00	95,48

			23	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (BAKESBANGPOL)	972.989.783,00	972.365.083,00	99,94
			24	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL)	10.000.000,00	9.741.030,00	97,41
			25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	20.007.658.700,00	18.813.460.580,00	94,03
			26	Program Pencatatan Sipil (DINDUKPENCAPII)	935.251.640,00	927.130.080,00	99,13
				TOTAL	87.246.501.870,00	83.321.752.564,00	95,50
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	27	Program Pengelolaan Pendidikan (DINDIKPORA)	74.454.930.260,07	63.221.348.430,00	84,91
	7	Angka Harapan Lama Sekolah	28	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (DINDIKPORA)	36.809.974.100,00	33.020.860.142,00	89,71
			29	Program Pembinaan Perpustakaan (DKP)	591.743.650,00	538.553.342,00	91,01
			30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (BAKESBANGPOL)	30.000.000,00	2.250.000,00	7,50
				TOTAL	111.886.648.010,07	96.783.011.914,00	86,50
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)	99.409.411.423,00	92.204.665.583,36	92,75
			32	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (DINDIKPORA)	8.517.343.040,00	7.840.161.805,00	92,05
			33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINKES)	488.570.620,00	434.749.730,00	88,98
	9	Angka Stunting	34	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DINKES)	464.987.800,00	452.846.658,00	97,39

			35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (DINKES)	778.657.775,00	737.447.875,00	94,71
			36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DINPANPERTAN)	150.000.000,00	149.566.850,00	99,71
				TOTAL	109.808.970.658,00	101.819.438.501,36	92,72
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	10	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	37	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (DP2KBP3A)	2.353.339.300,00	2.243.117.724,00	95,32
			38	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (DP2KBP3A)	1.721.040.000,00	1.012.059.000,00	58,81
			39	Program Pengendalian Penduduk (DP2KBP3A)	151.757.400,00	112.641.000,00	74,22
				TOTAL	4.226.136.700,00	3.367.817.724,00	79,69
Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	11	Indeks Pembangunan Gender	40	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A)	195.058.000,00	187.766.662,00	96,26
			41	Program Perlindungan Perempuan (DP2KBP3A)	364.747.000,00	157.618.700,00	43,21
			42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (DP2KBP3A)	4.965.505,00	4.965.500,00	100,00
	12	Status Kabupaten Layak Anak	43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (DP2KBP3A)	194.379.495,00	177.315.813,00	91,22
			44	Program Perlindungan Khusus Anak (DP2KBP3A)	362.053.000,00	214.573.191,00	59,27
	13	Status Kabupaten Layak Pemuda	45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (DINDIKPORA)	2.333.292.500,00	2.090.396.003,00	89,59
				TOTAL	3.454.495.500,00	2.832.635.869,00	82,00
Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	14	Pengeluaran Perkapita	46	Program Pemberdayaan Sosial (DINSOS)	1.310.780.000,00	1.269.881.740,00	96,88

			47	Program Rehabilitasi Sosial (DINSOS)	282.300.000,00	280.826.750,00	99,48
			48	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (DINSOS)	5.543.006.245,00	5.253.490.510,00	94,78
				TOTAL	7.136.086.245,00	6.804.199.000,00	95,35
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	15	Indeks Kualitas Infrastruktur	49	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (DPUPR)	11.851.717.260,00	11.465.274.831,00	96,74
			50	Program Penataan Bangunan Gedung (DPUPR)	2.397.611.000,00	2.359.997.900,00	98,43
			51	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (DPUPR)	200.000.000,00	136.357.382,00	68,18
			52	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (DINPERKPP)	955.619.050,00	118.212.260,00	12,37
	16	Indeks Pemerataan Infrastruktur	53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (DPUPR)	9.839.013.000,00	9.432.234.911,00	95,87
			54	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DPUPR)	1.026.342.150,00	920.021.274,00	89,64
			55	Program Pengembangan Permukiman (DPUPR)	7.391.616.000,00	7.087.475.605,00	95,89
			56	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (DPUPR)	803.356.500,00	518.246.163,00	64,51
			57	Program Penyelenggaraan Jalan (DPUPR)	103.702.728.329,00	99.095.393.157,83	95,56
			58	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (DPUPR)	1.132.000.000,00	908.970.116,00	80,30
			59	Program Pengembangan Perumahan (DINPERKPP)	85.000.000,00	82.749.680,00	97,35
			60	Program Kawasan Permukiman (DINPERKPP)	2.858.320.850,00	2.746.630.375,00	96,09

			61	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP)	161.890.800,00	151.117.644,00	93,35
			62	Program Pengelolaan Izin Lokasi (DINPERKPP)	23.565.700,00	21.684.270,00	92,02
			63	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (DINPERKPP)	44.376.200,00	31.860.000,00	71,80
			64	Program Penatagunaan Tanah (DINPERKPP)	1.019.944.915,00	599.706.240,00	58,80
			65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (DINHUB)	17.450.516.800,00	17.132.659.878,00	98,18
				TOTAL	160.943.618.554,00	152.808.591.686,83	94,95
Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan	17	<i>Spending of Money</i>	66	Program Pengembangan Kebudayaan (DINPARBUDAYA)	875.580.000,00	774.098.030,00	88,41
			67	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (DINPARBUDAYA)	126.184.890,00	119.900.780,00	95,02
			68	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINPARBUDAYA)	6.659.906.482,00	4.883.245.843,00	73,32
			69	Program Pemasaran Pariwisata (DINPARBUDAYA)	602.730.000,00	579.323.628,00	96,12
			70	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DINPARBUDAYA)	824.635.558,00	772.785.263,00	93,71
			71	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SATPOL PP)	9.548.221.355,00	9.530.696.695,00	99,82
			72	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (BAKESBANGPOL)	183.080.000,00	181.076.900,00	98,91

			73	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (BAKESBANGPOL)	63.531.000,00	62.132.410,00	97,80
				TOTAL	18.883.869.285,00	16.903.259.549,00	89,51
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	18	Indeks PDRB	74	Program Pengembangan UMKM (DPMP2KUKM)	232.327.400,00	227.034.400,00	97,72
			75	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (DPMP2KUKM)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
			76	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DPMP2KUKM)	179.472.600,00	178.348.905,00	99,37
			77	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (DPMP2KUKM)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			78	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (DPMP2KUKM)	20.000.000,00	19.000.000,00	95,00
			79	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (DINPANPERTAN)	949.006.180,00	942.392.390,00	99,30
			80	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DINPANPERTAN)	1.164.113.000,00	1.152.871.500,00	99,03
			81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DINPANPERTAN)	629.788.600,00	616.041.759,00	97,82
			82	Program Penendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DINPANPERTAN)	163.583.680,00	162.970.320,00	99,63
			83	Program Penyuluhan Pertanian (DINPANPERTAN)	3.541.425.560,00	3.020.983.402,00	85,30
			84	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (DINAKERPERINDAG)	3.232.947.000,00	2.522.009.902,00	78,01

			85	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (DINAKERPERINDAG)	67.000.000,00	52.833.000,00	78,86
			86	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (DINAKERPERINDAG)	76.000.000,00	67.034.843,00	88,20
			87	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (DINAKERPERINDAG)	16.408.674.508,00	15.109.808.158,00	92,08
			88	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (DINAKERPERINDAG)	29.740.000,00	8.684.000,00	29,20
			89	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DINPERKAN)	1.778.886.900,00	1.627.359.480,00	91,48
			90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (DINPERKAN)	617.985.570,00	575.678.448,00	93,15
				TOTAL	29.107.950.998,00	26.300.050.507,00	90,35
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	19	Indeks Gini	91	Program Penempatan Tenaga Kerja (DINAKERPERINDAG)	84.996.000,00	82.127.738,00	96,63
			92	Program Hubungan Industrial (DINAKERPERINDAG)	60.000.000,00	58.633.842,00	97,72
			93	Program Penataan Desa (DINPEMDES)	114.306.000,00	113.815.140,00	99,57
			94	Program Administrasi Pemerintahan Desa (DINPEMDES)	1.319.072.800,00	1.287.288.302,00	97,59
			95	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (DINPEMDES)	3.500.590.630,00	3.424.688.374,00	97,83
			96	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (KECAMATAN)	929.633.125,00	913.959.545,00	98,31
			97	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (KECAMATAN)	1.970.665.450,00	1.874.047.939,00	95,10

			98	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (KECAMATAN)	308.497.900,00	308.090.000,00	99,87
				TOTAL	8.287.761.905,00	8.062.650.880,00	97,28
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	99	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)	583.152.760,00	544.588.000,00	93,39
			100	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (DLH)	1.537.674.180,00	1.481.742.991,00	96,36
			101	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (DLH)	34.485.200,00	23.742.120,00	68,85
			102	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (DLH)	11.503.000,00	11.360.000,00	98,76
			103	Program Pengelolaan Persampahan (DLH)	8.003.242.850,00	7.766.018.357,00	97,04
			104	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (DLH)	280.000.000,00	233.279.374,00	83,31
			105	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (DLH)	15.625.000,00	15.625.000,00	100,00
	21	Indeks Resiko Bencana	106	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SATPOL PP)	2.220.426.850,00	2.191.689.970,00	98,71
			107	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	978.044.460,00	910.996.900,00	93,14
				TOTAL	13.664.154.300,00	13.179.042.712,00	96,45
Total APBD & Realisasi				GRAND TOTAL	1.428.064.472.737,07	1.299.818.898.715,34	91,02



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	1.305.675.039.221,00	1.405.507.082.077,13	99.832.042.856,13	107,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.303.935.200,00	186.489.553.928,57	33.185.618.728,57	121,65
Pajak Daerah	67.324.310.750,00	63.924.431.267,48	-3.399.879.482,52	94,95
Retribusi Daerah	8.034.806.500,00	8.678.759.954,00	643.953.454,00	108,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.427.500.000,00	5.789.289.832,02	1.361.789.832,02	130,76
Lain-lain PAD yang Sah	73.517.317.950,00	108.097.072.875,07	34.579.754.925,07	147,04
PENDAPATAN TRANSFER	1.138.963.401.821,00	1.205.779.140.938,00	66.815.739.117,00	105,87
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.008.254.465.600,00	1.120.687.396.178,00	112.432.930.578,00	111,15
Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.708.936.221,00	85.091.744.760,00	-45.617.191.461,00	65,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.407.702.200,00	13.238.387.210,56	-169.314.989,44	98,74
Pendapatan Hibah - LRA	13.212.306.000,00	13.042.991.000,00	-169.315.000,00	98,72
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	195.396.200,00	195.396.210,56	10,56	100,00
BELANJA DAERAH	1.428.064.472.737,07	1.299.818.898.715,34	-128.245.574.021,73	91,02
BELANJA OPERASI	1.037.536.324.848,47	931.631.069.685,67	-105.905.255.162,80	89,79
Belanja Pegawai	501.382.213.669,68	437.149.234.967,00	-64.232.978.702,68	87,19
Belanja Barang dan Jasa	489.111.167.664,79	450.063.522.895,51	-39.047.644.769,28	92,02
Belanja Subsidi	500.000.000,00	260388170	-239.611.830,00	52,08
Belanja Hibah	40.604.193.514,00	38.446.800.953,16	-2.157.392.560,84	94,69
Belanja Bantuan Sosial	5.938.750.000,00	5.711.122.700,00	-227.627.300,00	96,17
BELANJA MODAL	252.966.922.483,60	233.234.112.180,67	-19.732.810.302,93	92,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.830.036.253,60	62.965.864.127,83	-13.864.172.125,77	81,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.776.512.669,00	48.648.039.422,84	-1.128.473.246,16	97,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.001.993.311,00	121.264.201.430,00	-4.737.791.881,00	96,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	358.380.250,00	356.007.200,00	-2.373.050,00	99,34
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.593.480,00	2.397.478.875,00	-2.603.114.605,00	47,94
Belanja Tidak Terduga	5.000.593.480,00	2.397.478.875,00	-2.603.114.605,00	47,94
BELANJA TRANSFER	132.560.631.925,00	132.556.237.974,00	-4.393.951,00	100,00
Belanja Bagi Hasil	7.535.911.725,00	7.535.911.725,00	-	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	125.024.720.200,00	125.020.326.249,00	-4.393.951,00	100,00
SURPLUS / DEFISIT	-122.389.433.516,07	105.688.183.361,79	228.077.616.877,86	-86,35
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.389.433.516,07	128.201.931.505,43	2.812.497.989,36	102,24
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.339.422.816,07	125.339.422.816,43	0,36	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.010.700,00	2.862.508.689,00	2.812.497.989,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	122.389.433.516,07	125.201.931.505,43	2.812.497.989,36	102,30
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	230.890.114.867,22	230.890.114.867,22	-

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022 (unaudited), BPPKAD Kabupaten Bangka, 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 700/ 35 /INSPEKTORAT/2023

Kami telah mereviu Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah ini.

Sungailiat, 29 Maret 2023

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,



**DARIUS, S.Sos., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197006171998031004**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

Sungailiat, 29 Maret 2023

Nomor : 700/ 35 /LHR/Inspektorat/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Capaian Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2022

Kepada :
Yth. Bupati Bangka

di
Sungailiat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bangka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah ini.

2. Dasar Reviu

- a. Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/33/Inspektorat/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pada

Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

- b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bangka, Nomor: 700/35/SPT/Inspektorat/2023 tanggal 15 Maret 2023.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 31 Maret 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Sasaran reviu adalah Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 6.1.1.1. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah seluruhnya menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
- 6.1.1.2. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- 6.1.1.3. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai, semua

indikator kinerja utama telah diukur;

6.1.1.4. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;

6.1.1.5. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah menyajikan upaya perbaikan kedepan; yakni dalam badan laporan "Ringkasan Eksekutif" dan "Bagian Kesimpulan/Penutup", serta menyajikan uraian ringkas upaya perbaikan kedepan pada masing masing sasaran dan indikator kinerja sasaran;

6.1.1.6. Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah seluruhnya menyajikan akuntabilitas keuangan.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

6.1.2.1. Laporan Capaian Pembangunan Daerah Instansi Pemerintah telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;

6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah didukung dengan data yang memadai;

6.1.2.3. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan di setiap SKPD terkait/unit kerja;

6.1.2.4. Analisis/penjelasan dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah diketahui oleh unit kerja terkait, yang disampaikan melalui forum rapat pembahasan capaian kinerja masing-masing indikator.

6.1.3 Subtansi

Kesimpulan terhadap Subtansi Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

6.1.3.1. Sasaran dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja;

6.1.3.2. Sasaran dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah selaras dengan RPJMD;

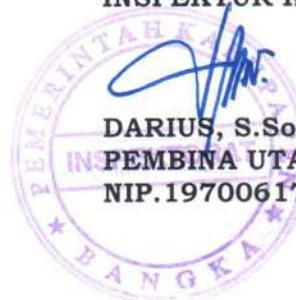
- 6.1.3.3. Target Indikator Kinerja Sasaran dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah sesuai dengan target Indikator Kinerja Sasaran dalam Revisi Perjanjian Kinerja;
- 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan;
- 6.1.3.5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur sasaran;
- 6.1.3.7. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART;
- 6.2. Rekomendasi
Laporan Capaian Pembangunan Dearah telah sesuai dengan Kertas Kerja Reviu (KKR) berdasarkan Program Kerja Reviu Capaian Pembangunan Daerah.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 telah ditindaklanjuti pada proses penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
INSPEKTUR PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197006171998031004

Tembusan :
Yth. Kepala Bappeda Kab. Bangka di Sungailiat

VISI

BANGKA SETARA Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan Kondisi Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah, dan Optimalisasi Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka dalam Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional

Kata Mulia merefleksikan kualitas masyarakat Kabupaten Bangka yang setara dengan masyarakat di daerah yg sudah maju melalui peningkatan Sumber Daya Manusia yg Berkualitas & Berintegritas serta didukung oleh Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi



Misi 1

• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi.

Masyarakat harus mendapat layanan publik yg bermutu melalui tata kelola pemerintahan oleh aparaturnya yg profesional berlandaskan prinsip *good and clean governance* dgn indikator keberhasilan yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**

Misi 2

• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas.

SDM yg berkualitas & berintegritas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah yg ditunjukkan semakin membaiknya taraf pendidikan & kesehatan masyarakat dgn mengedepankan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dgn indikator keberhasilan yaitu **Indeks Pembangunan Manusia**

Misi 3

• Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah.

Pembangunan infrastruktur antar wilayah yg merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pengembangan potensi daerah & kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah & peningkatan kesejahteraan masyarakat dgn indikator keberhasilan yaitu **Indeks Daya Saing Infrastruktur**

Misi 4

• Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional.

Sektor pariwisata dengan fungsi *multiplier effect*-nya merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka dgn indikator keberhasilan yaitu **Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB**

Misi 5

• Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Potensi sumber daya alam yang melimpah baik yang tersimpan di dalam maupun di permukaan bumi serta di lautan dalam wilayah Kabupaten Bangka merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat dengan indikator keberhasilan yaitu **Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 1

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi”

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

- Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

- Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
- Indeks SPBE
- Indeks Profesionalitas ASN

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

- Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

- Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS OPD

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA)	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur (BKPSDMD)	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT)	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (BPPKAD)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (DINPMP2KUKM)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan (DKP)	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat (DINHUB)
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan (BAPPEDA)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas (BKPSDMD)	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DINKOMINFOTIK)	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT)		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan (DINKES)	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan (DINDIKPORA)	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DINHUB)
Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat (BAPPEDA)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian (SETDA)			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat (DINDUKPENCAPIL)	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka (DINDUKPENCAPIL)	Meningkatnya Layanan Fasilitas Kinerja DPRD (SETWAN)
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan (BAPPEDA)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (SETDA)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah (DKP)					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah (SELURUH PD)						

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 2

"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"

TUJUAN

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SDM

- Indeks Pembangunan Manusia

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Lama Sekolah

MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

- Angka Harapan Hidup
- Angka Stunting

TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

- *Total Fertility Rate*

MENINGKATNYA KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA

- Indeks Pembangunan Gender
- Status Kabupaten Layak Anak
- Status Kabupaten Layak Pemuda

MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT

- Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

SASARAN STRATEGIS OPD

Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat (DINDIKPORA)

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (DINDIKPORA)

Menurunnya Angka Kelahiran (DP2KBP3A)

Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah (DINDIKPORA)

Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah (DINAKERPERINDAG)

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)

Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan (DINDIKPORA)

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat (DINKES)

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka (DINDUKPENCAPIL)

Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing (DINPMP2KUKM)

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan (DINKES)

Meningkatnya Keberagaman dan keseimbangan Gizi yang dikonsumsi masyarakat (DINPANPERTAN)

Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (DINPANPERTAN)

Peningkatan Produksi Perkebunan (DINPANPERTAN)

Meningkatnya Keamanan Pangan Segar (DINPANPERTAN)

Meningkatnya Hasil Peternakan (DINPANPERTAN)

Meningkatnya Produksi Perikanan (DINPERKAN)

Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS (DINSOS)

Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS (DINSOS)

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 3

"Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah"

TUJUAN

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- Indeks Daya Saing Infrastruktur

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR

- Indeks Kualitas Infrastruktur
- Indeks Pemerataan Infrastruktur

SASARAN STRATEGIS OPD

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur (DPUPR)	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar (DPUPR, DINDIKPORA, DINKES)	Meningkatnya pemenuhan rumah yang layak bagi masyarakat (DINPERKPP, DPUPR)	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh (DINPERKPP, DINLH, DINKES)	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan (DINPERKPP, DPUPR, BPPKAD)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DINHUB)			

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

TUJUAN

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DALAM Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

- Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA JUMLAH UANG YANG DIBELANJAKAN WISATAWAN

- Spending of Money

SASARAN STRATEGIS OPD

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan (DINPARBUDAYA, DINPMP2KUKM, DINAKERPERINDAG, DPUPR, DINKOMINFOTIK, DINHUB, DINPEMDES, DINDIKPORA)	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah (DINPARBUDAYA, DINKOMINFOTIK, DINPEMDES, DKP, DINDIKPORA)	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATPOLPP, DINLH)	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan (BANKESBANGPOL, DINDIKPORA)	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat (BANKESBANGPOL, DINDIKPORA)
---	---	---	--	--

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 5

"Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

TUJUAN

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

- Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA

- Indeks PDRB

MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN

- Indeks Gini

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
- Indeks Resiko Bencana

SASARAN STRATEGIS OPD

Meningkatnya Produksi Perikanan (DINPERKAN)	Meningkatnya Hasil Peternakan (DINPANPERTAN)	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa (DINPEMDES)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan (KECAMATAN)	Meningkatnya Produksi Perikanan (DINPERKAN)	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang (DPUPR)	Meningkatnya pengelolaan sampah (DINLH, DPUPR)
Peningkatan Produksi Perkebunan (DINPANPERTAN)	Meningkatnya Layanan Informasi Publik (DINKOMINFOTIK)	Meningkatnya Hasil Peternakan (DINPANPERTAN)	Peningkatan Produksi Perkebunan (DINPANPERTAN)	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (DINPANPERTAN)	Meningkatnya pengelolaan lingkungan (DINLH)	Penanggulangan Kebakaran (SATPOLPP)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (DINPANPERTAN)	Meningkatnya Investasi Daerah (DINPMP2KUKM)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing (DINPMP2KUKM)	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan (DINPERKPP)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DINSOS)	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS (DINSOS)	Meningkatnya Investasi Daerah (DINPMP2KUKM)		
Meningkatnya Jumlah & Ragam Tenaga Siap Kerja Yang ditempatkan di Lingkungan Kerja Yang Layak (DINAKERPERINDAG)	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing (DINPMP2KUKM)					
Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah (DINDIKPORA)	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DINSOS)					

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(1)

- 1 PENGHARGAAN OPINI WTP TERHADAP PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 2 PENGHARGAAN ATAS KINERJA TERBAIK PENYALURAN DAK FISIK LINGKUNGAN HIDUP SE PROVINSI KEP BABEL TAHUN ANGGARAN 2021 DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB BANGKA
- 3 PENGHARGAAN ATAS KINERJA TERBAIK PENYALURAN DAK FISIK PENDIDIKAN TERCEPAT SE PROVINSI KEP BABEL TAHUN ANGGARAN 2021 DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB BANGKA
- 4 PENGHARGAAN KAMPUNG TEGAP MANDIRI DARI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK KTM KAMPUNG SIDODADI KELURAHAN SRIMENANTI KECAMATAN SUNGAILIAT KATEGORI FAVORIT BIDANG INFORMATIKA DAN INOVASI
- 5 PENGHARGAAN KAMPUNG TEGAP MANDIRI DARI POLISI REPUBLIK INDONESIA UNTUK KTM KAMPUNG SIDODADI KELURAHAN SRIMENANTI KECAMATAN SUNGAILIAT
- 6 PENGHARGAAN ATAS KINERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021 DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN KATEGORI B
- 7 PENGHARGAAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN KATEGORI BB
- 8 PENGHARGAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BABEL TAHUN 2022 DARI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNTUK DESA AIR ANYIR DAN DESA TIANG TARAH
- 9 PENGHARGAAN PENILAIAN LOMBA DESA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI GUBERNUR BABEL PERINGKAT 1 UNTUK KELURAHAN JELITIK

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(2)

- 10 PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PERINGKAT MADYA TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 11 PENGHARGAAN KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERINGKAT TERBAIK I UNTUK INOVASI AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021 UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 12 PENGHARGAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2022 DARI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 13 PENGHARGAAN KABUPATEN /KOTA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN 2021 DARI DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 14 PENGHARGAAN PERINGKAT I SEPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PENILAIAN KINERJA 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTUR JENDRAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
- 15 PENGHARGAAN TOP 10 KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT PROV TAHUN 2021 UNTUK INOVASI SAPI KURBAN (SUBSIDI USAHA PERORANGAN/MIKRO MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT BUNGA NOL PERSEN) DINPMP2KUKM KAB BANGKA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 16 PENGHARGAAN TOP 10 KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT PROV TAHUN 2021 UNTUK INOVASI PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA (PEMANFAATAN KOLONG BEKAS TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR) DINAS PERIKANAN KAB BANGKA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(3)

- 17 PENGHARGAAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI UNTUK KELURAHAN JELITIK KABUPATEN BANGKA DARI PEMERINTAH PROVINSI BABEL TAHUN 2022
- 18 PENGHARGAAN TOP 3 KELURAHAN TERBAIK REGIONAL SUMATERA UNTUK KELURAHAN JELITIK KABUPATEN BANGKA DARI DIREKTORAT BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI TAHUN 2022
- 19 PENGHARGAAN PERINGKAT I LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) INOVASI TINGKAT PROVINSI UNTUK SDR. HARI MULYO SANYOTO KELURAHAN JELITIK KABUPATEN BANGKA BABEL TAHUN 2022 DARI PEMERINTAH PROVINSI BABEL
- 20 PENGHARGAAN TOP 3 LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TINGKAT NASIONAL UNTUK SDR. HARI MULYO SANYOTO KELURAHAN JELITIK KABUPATEN BANGKA BABEL TAHUN 2022 DARI PUSAT PENGEMBANGAN DAYA DESA KEMENDES PDDT
- 21 PENGHARGAAN TOP 16 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH SE-INDONESIA DARI MENTERI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS TAHUN 2022
- 22 PENGHARGAAN TERBAIK I PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENCAPAIAN DAN INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH SE-PROVINSI DARI GUBERNUR PROV KEP BABEL TAHUN 2022
- 23 PENGHARGAAN TOP III PENYAMPAIAN LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA UNTUK KABUPATEN BANGKA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BABEL TAHUN 2022
- 24 PENGHARGAAN TOP 99 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK INTAN ANGGUN (PINJAMAN TANPA BUNGA TANPA AGUNAN) BAPPEDA KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN PAN RB

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(4)

- 25 PENGHARGAAN ANUGRAH REVOLUSI MENTAL 2022 DARI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
- 26 PENGHARGAAN NASIONAL SATYALENCANA ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN SOSIAL DAN PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA (PNKT)
- 27 PENGHARGAAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 PERINGKAT I SE PROVINSI BABEL DARI OMBUDSMAN RI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KATEGORI A ZONA HIJAU OPINI KUALITAS TERTINGGI
- 28 PENGHARGAAN NASIONAL KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 DARI OMBUDSMAN RI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KATEGORI A ZONA HIJAU OPINI KUALITAS TERTINGGI
- 29 PENGHARGAAN INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA) NASIONAL 2022 UNTUK KATEGORI KABUPATEN SEBAGAI KABUPATEN TERINOVATIF TAHUN 2022
- 30 PENGHARGAAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI UNTUK KELURAHAN JELITIK KABUPATEN BANGKA DARI PEMERINTAH PROVINSI BABEL TAHUN 2022
- 31 PENGHARGAAN UPAKARYA WANUA NUGRAHA TAHUN 2022 KEPADA BUPATI BANGKA ATAS PEMBINAAN KEPADA KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT REGIONAL I (WILAYAH SUMATERA) TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
- 32 PENGHARGAAN PERINGKAT I PROVINSI LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 DARI UNTUK KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA JUARA DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(5)

- 33 PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENGAJUAN DAK FISIK TERCEPAT UNTUK SUB BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 DARI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI
- 34 PENGHARGAAN TOP 5 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) TINGKAT PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG UNTUK INOVASI “**SAPI KURBAN**” TAHUN 2022
- 35 PENGHARGAAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 DARI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
- 36 PENGHARGAAN PERINGKAT II CAPAIAN ODF TERBAIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 DARI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 37 PENGHARGAAN PERINGKAT II INOVASI PERCEPATAN PENURUNAN AKI, AKB DAN STUNTING TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 DARI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 38 PENGHARGAAN PERINGKAT II NASIONAL LOMBA KREASI KADER POSYANDU UNTUK POSYANDU RAFLESIA TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- 39 PENGHARGAAN SEKOLAH LITERASI NASIONAL 2022 KATEGORI EXCELLENCE UNTUK SEKOLAH SMAN 1 RIAU SILIP DARI ITHO INDOSTOCK SMARTESCHOOL
- 40 PENGHARGAAN ATAS JASA PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022 UNTUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA DARI KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- 41 PENGHARGAAN KADER POSYANDU TELADAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(6)

- 42 PENGHARGAAN PERINGKAT II TINGKAT PROVINSI KETEPATAN INPUT KOMDAT/MICROSITE PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022 DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 43 PENHARGAAN BEST AWARD TERBAIK I ATAS PERSENTASE VAKSINASI PMK TAHUN 2022 SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 44 PENHARGAAN BEST AWARD TERBAIK I ATAS PERSENTASE PENANDAAN TERNAK DALAM PENANGANAN PMK TAHUN 2022 SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DARI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 45 PENGHARGAAN PERINGKAT I LONBA KEBUN LADA TAHUN 2022 KEPADA SUKIRMAN PETANI LADA KABUPATEN BANGKA DARI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 46 PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2022 UNTUK KELURAHAN JELITIK DARI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 47 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA KEMUJA KEC MENDOBARAT DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 48 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA PETALING BANJAR KEC MENDOBARAT DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 49 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA PETALING KEC MENDOBARAT DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PENCAPAIAN PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 ...(7)

- 50 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA PUDING BESAR KEC PUDING BESAR DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 51 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA KARYA MAKMUR KEC PEMALI BESAR DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 52 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA PEMALI KEC PEMALI BESAR DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 53 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA AIR RUAY KEC PEMALI BESAR DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
- 54 PENGHARGAAN DESA MANDIRI TAHUN 2022 UNTUK DESA BATU RUSA KEC MERAWANG BESAR DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PENGHARGAAN KABUPATEN
BANGKA TAHUN 2021 - 2022

INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2022



SAKIP TAHUN 2021



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKIRMAN KAY 18, JAKARTA 12180
TELEPON (021) 7393351 - 7393342, FAKSIMILE (021) 7393323, SITUS: <http://www.mprpan.go.id>

Nomor : B/251/AA.02/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
7 Maret 2022

Yth. Bupati Bangka
di
Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka memperoleh nilai 72,27 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berjalan dengan sangat baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut acuan sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	23,67	23,75
b. Pengukuran Kinerja	26	16,00	18,15
c. Pelaporan Kinerja	15	10,30	10,40
d. Evaluasi Internal	10	6,37	6,53
e. Capaian Kinerja	20	13,26	13,44
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,60	72,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

atas prestasinya dalam:

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

dengan Predikat Nilai



Jakarta, 5 April 2022

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



TJAHJO KUMOLO

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKARNOPATI KAYU MANGROVE, JAKARTA 12150
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : BV234/RB.06/2022 7 Maret 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

Yth. Bupati Bangka
di

Sunggallai

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka (Pemkab Bangka). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bangka.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemkab Bangka tahun 2021 adalah 61,94 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan			
	I. Hasil Antara Area Perubahan	20,00	11,53	11,62
	II. Reform	10,00	9,18	6,55
	III. Reform	30,00	12,53	12,75
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,24	30,92

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,91	8,01
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83	8,74
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,83	8,22
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,36	6,05
	Total Komponen Hasil	40,00	30,92	31,02
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	61,17	61,94



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
atas prestasinya dalam:
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021
dengan Predikat Nilai



Jakarta, 5 April 2022

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TJAHJO KUMOLO

ANUGERAH REVOLUSI MENTAL 2022



TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 “INTAN ANGGUN”



PENGHARGAAN DALAM PENYALURAN DAK FISIK LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022



PENGHARGAAN 8 AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 2022 TINGKAT NASIONAL



PENGHARGAAN AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 2021



PENGHARGAAN KLA TAHUN 2022



LHE KAPABILITAS APIP TH. 2022

Nomor : PE.06.03/LHP-594/PW29/6/2022 23 November 2022
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat
Kabupaten Bangka

Yth. Bupati Bangka
di Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada **Level 3 (delivered) dengan skor 3** dengan rincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	3	3	3	3
2.	Praktik Profesional	3	3	3	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3	3	3
5.	Struktur Tata Kelola	3	3	3	3
6.	Peran dan Layanan	3	3	3	3

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement (AoI)* yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

No.	Topik	Area of Improvement (AoI)
1.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Terhadap program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran kinerja pada DLUD Puskesmas telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka, namun demikian masih terdapat AoI sebagai berikut: - Pelaksanaan audit kinerja hanya dilakukan pada satu program sehingga masih belum secara utuh mendukung

No.	Topik	Area of Improvement (AoI)
		<p>capaian sasaran strategis daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan audit kinerja hanya untuk satu program. - Audit kinerja masih dalam proses pelaksanaan.
2.	Perencanaan Pengawasan	<p>Perencanaan pengawasan telah berbasis risiko dan PKPT telah disusun berdasarkan identifikasi faktor risiko (pertimbangan manajemen) dan register risiko. Namun demikian penetapan objek pengawasan tersebut masih terdapat AoI yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan prioritas pengawasan belum berdasarkan atas register risiko yang terkait dengan sasaran strategis dan program yang berisiko tinggi (register risiko masih berbasis OPD). - Belum dilakukan evaluasi atas register risiko dari OPD secara memadai. - Belum seluruh OPD menyusun penilaian risiko.

Berdasarkan data profil APIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, masih terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP yaitu:

1. Persentase anggaran pengawasan APIP dibandingkan total belanja daerah tahun 2022 sebesar 0,73%. Hal ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun 2022 sebesar 0,75%.
2. Tidak terdapat anggaran pada Program Peningkatan SDM untuk tahun 2022. Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Bangka agar menginstruksikan Inspektur Bangka untuk:
 1. Menambah kegiatan audit kinerja pada area strategis daerah guna mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
 2. Mengukur tingkat risiko pada area sasaran strategis maupun program daerah dalam penyusunan perencanaan pengawasan agar dapat dijadikan acuan dalam menentukan kegiatan pengawasan yang lebih utuh dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
 3. Melakukan evaluasi atas register risiko yang disusun oleh OPD secara memadai;
 4. Mendorong agar seluruh OPD melakukan penilaian risiko setiap tahun;

2

5. Memastikan jumlah usulan alokasi anggaran pengawasan APIP tahun 2023 sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
6. Menambah anggaran program peningkatan pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga terwujud peran dan layanan APIP yang efektif dan mampu memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan.

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*), yakni Inspektorat Kabupaten Bangka agar melakukan peningkatan pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga terwujud peran dan layanan APIP yang efektif dan mampu memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Festah Cahyo Nugroho

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Bangka



HASIL PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021


OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 142 /PC/ 021/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

18 Januari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 SURUNG, TERWA
 NOMOR SURAT : 045 / 0214
 TANGGAL : 18/1/2022

Kepada Yth.
Bupati Bangka
di
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa guna percepatan penilaian kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Atas hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik dan hasil penilaian kepatuhan diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka, dari 68 produk layanan administrasi diperoleh nilai 98,35 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi sebagaimana rincian terlampir.

Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar Seudara:

- a. Memberikan apresiasi kepada pimpinan unit pelayanan publik yang memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan upaya dalam memenuhi komponen standar pelayanan.
- b. Memantau konsistensi tingkat kepatuhan dalam implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


 Ketua Ombudsman Republik Indonesia,
 Mochamad Najih


Laporan Produk Layanan Kepatuhan Tahun 2021
 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

No.	Nama Peminta	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
1	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/ Catering	98,59
2	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Serasi Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	96,59
3	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Surat Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis	98,59
4	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	98,59
5	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	98,59
6	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Rekomendasi SP Bidan	98,59
7	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Kesehatan	Rekomendasi Ijin mendirikan basketmas	87,64

08	Pemerintah Kab. Bangka	Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu	Jasa Usaha Perkebunan (JUP)	100
Nilai Rata-Rata				98,35
Zona Kepatuhan				Hijau

98,84
38 pagen

Keterangan Kategori Penilaian:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0-50,00	Rendah	Berah
51,00-80,00	Sedang	Kuning
81,00-100	Tinggi	Hijau

SERTIFIKAT LOMBA POSTER INOVASI GERMAS HARI KESEHATAN NASIONAL KE-58 TAHUN 2022



CAPAIAN ODF TERBAIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022



INOVASI PERCEPATAN PENURUNAN AKI, AKB DAN STUNTING TAHUN 2022



KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa hasil akhir penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

-11-

No	Kabupaten	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
12.	Tegal	92.05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Batang Hari	92.03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Deli Serdang	91.99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Cilacap	91.88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Jembrana	91.70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Bengkalis	91.60	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Sleman	91.57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Bantul	91.43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Sragen	91.38	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemalang	91.32	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Bangka	91.00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Karimun	90.92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Rembang	90.86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Blora	90.84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Natuna	90.64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Karangasem	90.47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Siak	90.36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Brebes	90.32	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Wonosobo	90.25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Musi Rawas	90.24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Sukoharjo	90.19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Kebumen	90.04	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Humbang Hasundutan	89.80	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Gianyar	89.77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Muara Enim	89.63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Demak	89.39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Manokwari	89.30	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39.	Serdang Bedagai	89.21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Ogan Komering Ulu Timur	89.09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Kaur	89.01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

PENGHARGAAN PEKAN IMUNISASI DUNIA 2022



PENGHARGAAN BAGI INSTITUSI YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN



SERTIFIKAT KADER POSYANDU TELADAN TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sertifikat
Diberikan Kepada:

Nama : Sutimi
Posyandu : Sakura
Desa : Air Duren
Kecamatan : Pemali
Kabupaten : Bangka

Sebagai :
Kader Posyandu Teladan Tahun 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. H. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.
NIP. 196709092001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SERTIFIKAT KETEPATAN PENGINPUTAN KOMDAT/MICROSITE PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sertifikat
Diberikan Kepada:
KABUPATEN BANGKA
PERINGKAT III

**Ketepatan Penginputan Komdat/Mocrosite Promkes dan Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Hari Kesehatan Nasional ke – 58
Tahun 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. H. ANDRI NURITTO, M.A.R.S.
NIP. 196709092001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

PIAGAM TARGET KEGIATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2022



TOP 5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGUMUMAN
NOMOR : 050 / 097 / VI / 2022

TENTANG
TOP 5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2022

Dalam rangka penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Tim Sekretariat KIPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pleno Tim Juni KIPP pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terhadap 10 judul proposal Inovasi Pelayanan Publik yang telah dinyatakan lulus seleksi presentasi dan wawancara, telah ditetapkan Top 5 Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang dinyatakan berhak mendapatkan penghargaan.
2. Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 terpilih sebagaimana terlampir dan diumumkan sesuai urutan abjad dan melalui web JIPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (<http://www.jipp.babelprov.go.id/>).
3. Selanjutnya akan dilakukan penetapan Top 5 Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

P. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN FAUZANULLUDDIN

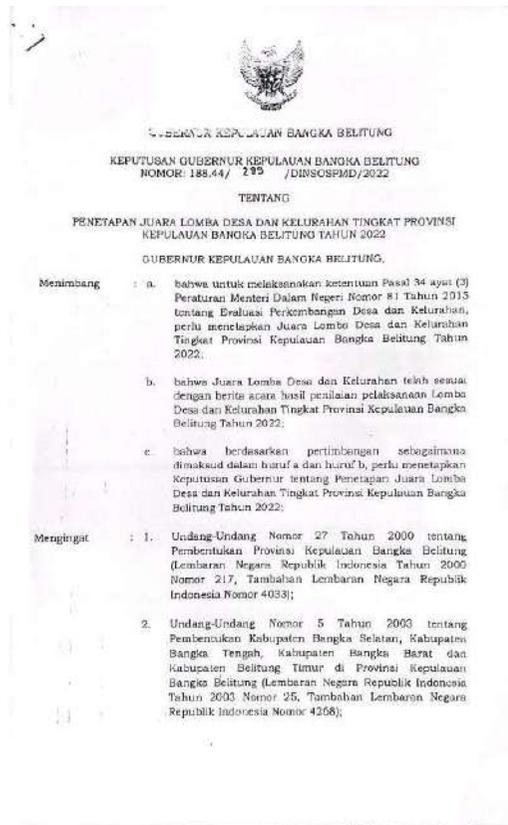
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Korutan Air Laut Pangkalpinang 33146, Faksinle (0717) 439320 Email : belaprov@bel.babelprov.go.id

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR : 050 / 097 / VI / 2022
TANGGAL : OKTOBER 2022

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK TOP 5
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Judul Inovasi	Keterangan
1.	Kabupaten Bangka Barat	Dalam Sepi Menulis Emas (Data Lempu Semakin Rapi Menggunakan Aplikasi)	
2.	Kota Pangkalpinang	Pedekete Berkah (Pegantin Dapat Kartu Keluarga, KTP-el, Beserta Akta)	
3.	Kabupaten Bangka	Sapi Kurban (Subsidi Usaha Perorangan/Mikro Melalui Kredit Usaha)	
4.	Kabupaten Belitung	Sikantan (Sirkulasi Koleksi Antar Perpustakaan)	
5.	Kabupaten Bangka Selatan	Yuk Kilo (Yuk Konsultasi di Rumah Sakit Mengenai Informasi Kesehatan)	

JUARA LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



OPINI BPK ATAS LAPORAN KUANGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021



Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelengkapan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kapabilitas terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualan
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
 - a. Pengamanan administrasi atas aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka belum sepenuhnya terisi;
 - b. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya terisi;
 - c. Pengalihan belanja penyilesaian kewajiban di luar bencorot perantara di Sekretariat Daerah belum terisi;
 - d. Kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD senilai Rp682.236.000,00; dan
 - e. Pengecualan atas pekerjaan rehabilitasi Gedung Kantor Pemadam (DID) Dinas Kesehatan belum dilakukan secara sempurna, jumlah pelaksanaan belum terisi/terisi senilai Rp347.689.502,37 dan denda yang belum dibayar senilai Rp218.420.550,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk:
 - a) Lebih optimal dalam memuat, mengamankan dan menginventarisasi BMD yang berada dalam pengusutannya;
 - b) Melakukan pengawasaan atas perbaikan permasalahan-permasalahan penatausahaan aset tetap.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga untuk memerintahkan Tim BOS Sekolah pada 126 SD Negeri dan 21 SMP Negeri di Kabupaten Bangka supaya memproses dan mempertanggungjawabkan belanja honor tim BOS Sekolah yang tidak sesuai ketentuan dengan cara menyetorkan ke rekening Dana BOS APBN sekolah senilai total Rp401.923.600,00;
3. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan KPA dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah supaya memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran realisasi Belanja BMD dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp546.392.750,00;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas 24 paket pekerjaan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp682.236.000,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp242.689.502,37 dan pembayaran denda senilai Rp218.420.550,00 oleh penyedia barang/jasa ke rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 81.A/LHP/XVIII/PPG/05/2022, dan Nomor 81.B/LHP/XVIII/PPG/03/2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atas penjelasan tersebut terdapat lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya Bupati Bangka, kami ucapkan terima kasih.



- Tambahan:
1. Anggita V BPK;
 2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bangka;
 4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
 5. Kepala Direktorat Utama Kelembagaan BPK;
 6. Inspektur Utama BPK;
 7. Inspektur Kabupaten Bangka.

PENGHARGAAN KUR TAHUN 2021



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN**
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta 10710 Tlp.021-3521843/3521976

Nomor : KUR/ Dt. D.I.M.EKON/01/2022 /2. Januari 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pengumuman Penghargaan
KUR Tahun 2021

Yth. (Daftar Penerima Undangan Terlampir)
di tempat

Dalam rangka penganugerahan Penghargaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021 Kepada Penyair KUR, Penjamin KUR, Pemrintah Daerah, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perdukungan Program KUR Terbaik, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tautan : <https://bit.ly/penghargaanKUR2021>

Mengingat pentingnya acara ini, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi Sr. Hana (0895-3137-0600) dan Rahman (0877-8171-5833) atau melalui alamat surel Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM kur@koni@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM


Iskandar Simorangkir

Tembusan Yth.:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai laporan).

Lampiran 1 Surat Undangan Deputi
Nomor : KUR/ Dt. D.I.M.EKON/01/2022
Tanggal : 12 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

Pemerintah Daerah

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
6. Gubernur Sulawesi Selatan;
7. Bupati Bora;
8. Bupati Katen;
9. Bupati Pacitan;
10. Walikota Probolinggo;
11. Bupati Purworejo;
12. Bupati Tulungagung;
13. Bupati Bangka;
14. Bupati Bangli;
15. Bupati Bintan;
16. Bupati Daiir;
17. Bupati Klungkung;
18. Bupati Mesuji.

Penyair KUR

1. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Bank Central Asia (Persero) Tbk;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
6. Direksi PT Bank Sinamas Tbk;
7. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
8. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
9. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
10. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
11. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
12. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
13. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa;
14. Pengurus KSP Guna Prima Dana;
15. Direksi ITC Multi Finance.

PENGHARGAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT NASIONAL



PENGHARGAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI



PENGHARGAAN SEKOLAH LITERASI NASIONAL 2022



PENGHARGAAN 8 AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 2022 TINGKAT PROVINSI



PENGHARGAAN PENGAJUAN DAK FISIK TERCEPAT



PENGHARGAAN DESA WISATA



PENILAIAN KEPATUHAN OMBUDSMAN TAHUN 2022

11

Ombudsman Republik Indonesia

pemenuhan standar pelayanan publik. Inovasi yang sangat menonjol adalah layanan Si Bulan (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran), dimana seorang ibu sehabis melahirkan otomatis akan mendapatkan Akta Kelahiran, hal ini dimaksud untuk mempercepat layanan adminduk untuk warga.

Hasil Penilaian Tingkat Pemerintah Kabupaten

Penilaian dilakukan pada 2719 unit layanan dan 322 produk layanan dengan hasil sebagai berikut:

No	Kabupaten	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
1.	Grobogan	98,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Badung	97,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Banyumas	95,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Klungkung	94,00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Buleleng	93,80	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Bangli	93,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Kendal	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Tabanan	93,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Kudus	92,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Tebo	92,50	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Fakfak	92,29	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Tegal	92,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Batang Hari	92,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Deil Serdang	91,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Cilacap	91,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Jembrana	91,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Bengkalis	91,60	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Sleman	91,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Bantul	91,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Sragen	91,38	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemalang	91,32	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Bangka	91,00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Karimun	90,92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Rembang	90,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Blora	90,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Natuna	90,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Karangasem	90,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Siak	90,36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Brebes	90,32	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Wonosobo	90,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Musi Rawas	90,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Sukoharjo	90,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Kebumen	90,04	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN ATAS KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KABUPATEN/KOTA	NILAI	ZONASI	KATEGORI	OPINI
BANGKA	91,00	HIJAU	B	KUALITAS TERTINGGI
PANGKALPINANG	87,90	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
BELITUNG	84,32	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
BANGKA SELATAN	82,60	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
BANGKA BARAT	81,51	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
BANGKA TENGAH	80,27	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
BELITUNG TIMUR	78,73	HIJAU	B	KUALITAS TINGGI
PROVINSI BABEL	75,48	KUNING	C	KUALITAS SEDANG

PENGHARGAAN JUMLAH PERSENTASE VAKSINASI PMK TERBANYAK



PENGHARGAAN CERDAS CERMAT PMK



PENGHARGAAN LOMBA KEBUN LADA



PENGHARGAAN LENCANA DESA MANDIRI


MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5860/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI




KEPADA :
INDRA, S.A.P
KEPALA DESA PUDING BESAR
KECAMATAN PUDING BESAR, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI
JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. (H. C. Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.




MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5856/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI




KEPADA :
JUNAIDI
KEPALA DESA BATU RUSA
KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI
JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. (H. C. Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



PENGHARGAAN LENCANA DESA MANDIRI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5854/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI



KEPADA:
AHMAD SUPANDI, S.IP
KEPALA DESA PETALING
KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. (H.C.) Dr. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5857/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI



KEPADA:
ROZALI, SE
KEPALA DESA AIR RUAI
KECAMATAN PEMALI, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. (H.C.) Dr. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



PENGHARGAAN LENCANA DESA MANDIRI


MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5855/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI



KEPADA :
MAHROB
KEPALA DESA PETALING BANJAR
KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr.(H.C.) Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.




MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 5855/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI



KEPADA :
M. ISTOHARI
KEPALA DESA KEMUJA
KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Dr.(H.C.) Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



PENGHARGAAN LENCANA DESA MANDIRI

